

363.5

SIH

P. 21

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN  
PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
DI MOJOSONGO SURAKARTA**

**TESIS**

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**SIHONO**  
NIM: L4DOO1209



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003**

**IUPT-PUSTAK-INDIP**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA  
PASCA PEREMAJAAN PERMUKIMAN  
DI MOJOSONGO SURAKARTA**

Tesis Diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

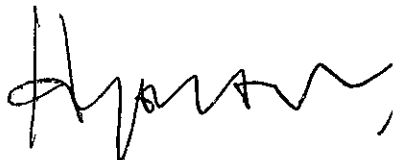
Oleh :  
**SIHONO**  
L4DOO1209

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 2003

Dinyatakan .....  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 2003

Pembimbing Pendamping



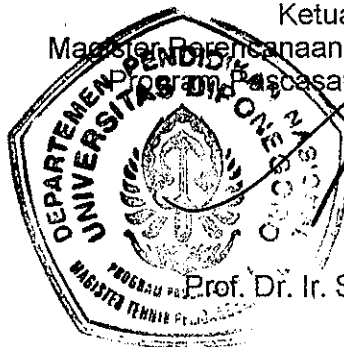
Ir. Hadi Wahyono, MA

Pembimbing Utama



Dr. Ari Pradhanawati, MS

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

## PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan Saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

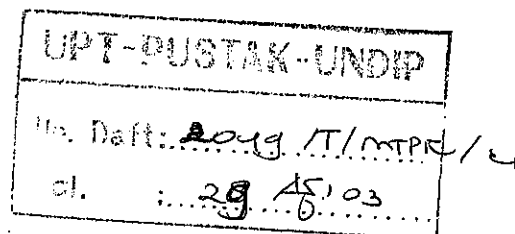
Semarang,

2003



**SIHONO**

NIM. L4 D001209



TAK SEORANG PUN TAHU KEPANDAIAAN APA YANG DIMILIKINYA  
SAMPAI IA MENCOBANYA DAN KEBANYAKAN ORANG TIDAK MAU  
MENCoba, JIKA MEREKA TIDAK DIPAKSA \* Basil W. Maturin.

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Bapak dan Ibuku tercinta : Djamin Hadisukarso (alm) dan Saripah

Om Jaman, Om Silam dan Tante Sriganti

Kakak dan Adikku tercinta : Mbak Sujik, Mbak Mami,

Mas Topo, Mbak Yani, Mas Wanto dan Ningsih.

Juga untuk Clara, Carel, Indro, Teguh dan Fajar.

Tak lupa untuk Maria Virginia Rahayu Septantina

serta teman-teman MPPWK I dan II

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena AnugerahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Tesis ini berjudul : “ *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo*”. Pengambilan topik ini didasari pemikiran bahwa banyak program-program pembangunan prasarana yang dilakukan Pemerintah seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan pasca pembangunan yang memadai. Di samping itu masyarakat sebagai pemakai berhak dan wajib untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan prasarana. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana yang dibangun dalam peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo dengan mengetahui bentuk, tingkat dan faktor-faktor penyebab peran serta masyarakat.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

- Dr. Ari Pradhanawati, MS selaku Mentor yang telah menyediakan waktu, memberikan bimbingan dan arahan terutama menyangkut konsep-konsep dasar tesis.
- Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Co Mentor yang telah memberikan bimbingan dan arahan terutama yang menyangkut pendekatan-pendekatan dan arah penulisan.
- Ir. Ragil Haryanto, MSP selaku pembahas yang memberikan masukan yang sangat berguna bagi kelayakan dan ketajaman tesis.
- Prof. Dr. Nurdien H. Kistanto, MA selaku penguji yang memberikan masukan yang sangat mendalam menyangkut materi peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana.
- Prof. Dr. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

- Ir Sidharta Saelan, MM selaku Kepala Balai Pendidikan Diploma dan Magister PUSDITEK-PU yang telah memberikan kesempatan dan dorongan moral untuk menyelesaikan studi.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ir. Nany Yuliasuti, MSP, Ir. Joko Sugiyono, MEng serta seluruh dosen, seluruh karyawan Program Magister perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota (MPPWK) dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Karya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran perbaiki agar pra tesis ini menjadi lebih baik dan terutama lagi agar karya ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2003

Penulis,

Sihono

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Permasalahan.....	7
1.3.    Tujuan dan Sasaran.....	8
1.4.    Manfaat Penelitian.....	9
1.5.    Ruang Lingkup.....	9
1.5.1.    Ruang Lingkup Materi.....	9
1.5.2.    Ruang Lingkup Wilayah.....	11
1.6.    Kerangka Pemikiran.....	13
1.7.    Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II    TINJAUAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN           PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN</b>	
2.1.    Tinjauan Peremajaan Lingkungan Permukiman.....	17
2.2.    Tinjauan Prasarana Lingkungan Permukiman.....	20
2.2.1.    Pengertian Prasarana Lingkungan.....	20
2.2.2.    Pengelolaan Prasarana oleh Masyarakat.....	22
2.3.    Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.....	22

2.3.1.	Pengertian Peran Serta Masyarakat.....	22
2.3.2.	Kebutuhan Peran Serta Masyarakat.....	24
2.3.3.	Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	26
2.3.4.	Ciri-ciri dan Hambatan dalam Peran Serta Masyarakat.....	27
2.3.5.	Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	29
2.3.6.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta.....	32
2.3.7.	Tinjauan Faktual Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana..	39
2.4.	Definisi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana Pasca Peremajaan Lingkungan Permukiman.....	42

### **BAB III METODE PENDEKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

3.1.	Jenis Penelitian.....	49
3.2.	Jenis Data.....	49
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel.....	51
3.5.	Metode Analisis.....	55

### **BAB IV GAMBARAN UMUM PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI MOJOSONGO**

4.1.	Gambaran Umum Kota Surakarta.....	64
4.1.1.	Arah dan Perkembangan.....	64
4.1.2.	Kebijakan Umum.....	66
4.1.2.1.	Program Perbaikan Lingkungan Permukiman di Surakarta.....	66
4.1.2.2.	Kebijakan Pelibatan Peran Serta Masyarakat.....	68
4.2.	Gambaran Umum Kelurahan Mojosongo.....	69
4.2.1.	Kondisi Fisik Wilayah.....	69
4.2.2.	Kondisi Sosial Ekonomi.....	70
4.2.3.	Potensi dan Masalah.....	71
4.3.	Gambaran Umum Kawasan Peremajaan di Mojosongo.....	72
4.3.1.	Kondisi Wilayah Sebelum Peremajaan.....	72
4.3.2.	Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan di Mojosongo.....	76
4.3.2.1.	Pendekatan Awal Pelaksanaan Peremajaan.....	76
4.3.2.2.	Proses Rembug Warga.....	78

4.3.2.3.	Pelaksanaan Konstruksi.....	79
4.3.3.	Kondisi Wilayah Setelah Peremajaan.....	86
4.3.3.1.	Kondisi Fisik Wilayah.....	86
4.3.3.2.	Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.....	91

**BAB V ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

5.1.	Analisis Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	102
5.1.1.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	102
5.1.2.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	105
5.1.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	107
5.1.3.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	109
5.1.3.2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	120
5.1.4.	Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	128
5.2.	Analisis Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	129
5.2.1.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	129
5.2.2.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	132
5.2.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	134
5.2.3.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	136
5.2.3.2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	153
5.2.4.	Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	167
5.3.	Analisis Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	168
5.3.1.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	168
5.3.2.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	170
5.3.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	173
5.3.3.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	175
5.3.3.2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	179
5.3.4.	Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	187
5.4.	Analisis Peran Serta Masyarakat di Seluruh Kawasan yang Diremajakan.....	188
5.4.1.	Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat.....	188
5.4.2.	Analisis Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	190

5.4.3.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat.....	194
5.4.4.	Hambatan Peran Serta Masyarakat.....	196
5.5.	Pembahasan.....	197

**BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

6.1.	Kesimpulan.....	205
6.2.	Rekomendasi.....	208

DAFTAR PUSTAKA.....	211
LAMPIRAN.....	215

## DAFTAR TABEL

TABEL II.1.	Variabel Penelitian.....	47
TABEL III.1.	Perhitungan Jumlah Sampel Penelitian.....	54
TABEL III.2.	Perhitungan Skor untuk Menentukan Tingkat Peran Serta.....	57
TABEL III.3.	Tabulasi Silang.....	59
TABEL III.4.	Tabel Kebutuhan Data.....	61
TABEL IV.1.	Tahapan Kegiatan Peremajaan Lingkungan di Mojosongo.....	80
TABEL V.1.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	104
TABEL V.2.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	105
TABEL V.3.	Hasil Perhitungan Chi Square RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	108
TABEL V.4.	Hubungan antara Jumlah Tetangga yang Dikenal dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	110
TABEL V.5.	Hubungan Bentuk Sumbangan dalam Peremajaan dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	113
TABEL V.6.	Hubungan Kehadiran Pemimpin dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	116
TABEL V.7.	Hubungan Besarnya Bantuan Pemerintah dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	119
TABEL V.8.	Hubungan Umur dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	121
TABEL V.9.	Hubungan Bentuk Sumbangan dalam Peremajaan dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	123
TABEL V.10.	Hubungan Persepsi Manfaat Kegiatan dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	125
TABEL V.11.	Hubungan Karakteristik Prasarana dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	127
TABEL V.12.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	131
TABEL V.13.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	132
TABEL V.14.	Hasil Perhitungan Chi Square RW II-VI.....	135

TABEL V.15.	Hubungan Umur dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI	137
TABEL V.16.	Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	141
TABEL V.17.	Hubungan Jumlah Tetangga yang Dikenal dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	146
TABEL V.18.	Hubungan Persepsi Tanggung Jawab Pengelolaan Prasarana dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	149
TABEL V.19.	Hubungan Peran Pihak Ketiga dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	152
TABEL V.20.	Hubungan Umur dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI	153
TABEL V.21.	Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	156
TABEL V.22.	Hubungan tingkat Peran Serta selama Peremajaan dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan di RW II-VI.....	158
TABEL V.23.	Hubungan Persepsi Manfaat Kegiatan Peran Serta dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	160
TABEL V.24.	Hubungan Pemberian Dana oleh Pemerintah dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	162
TABEL V.25.	Hubungan Pemberian Material oleh Pemerintah dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	165
TABEL V.26.	Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	170
TABEL V.27.	Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	171
TABEL V.28.	Hasil Perhitungan Chi Square di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	173
TABEL V.29.	Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	176
TABEL V.30.	Hubungan Jumlah Tetangga yang Dikenal dengan Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	178
TABEL V.31.	Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	179
TABEL V.32.	Hubungan Persepsi Manfaat Peran Serta dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	181

TABEL V.33.	Hubungan Jumlah Tetangga yang Dikenal dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	182
TABEL V.34.	Hubungan Lama Tinggal dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	184
TABEL V.35.	Hubungan Tingkat Peran Serta selama Peremajaan dengan Tingkat Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	186
TABEL V.36.	Bentuk Peran Serta Masyarakat pada Seluruh Kawasan yang telah Diremajakan.....	189
TABEL V.37.	Tingkat Peran Serta Masyarakat pada Seluruh Kawasan yang telah Diremajakan.....	190
TABEL V.38.	Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat di Seluruh Kawasan yang telah Diremajakan.....	195
TABEL V.39.	Hambatan Peran Serta Masyarakat di Seluruh Kawasan yang Diremajakan.....	197
TABEL V.40.	Tingkat Kesesuaian Hasil Peremajaan dengan Keinginan Warga.....	202

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	Peta Lokasi Wilayah Mojosongo.....	12
GAMBAR 1.2.	Bagan Pemikiran.....	16
GAMBAR 2.1.	Tipologi Tingkat Peran Serta Masyarakat dari Arstein.....	31
GAMBAR 4.1.	Arah Perkembangan Permukiman di Surakarta.....	65
GAMBAR 4.2.	Peta Kondisi Permukiman Sebelum Peremajaan.....	73
GAMBAR 4.3.	Peta Rumah Non Permanen Sebelum Peremajaan.....	75
GAMBAR 4.4.	Diagram Proses Umum rebug Warga.....	79
GAMBAR 4.5.	Proses Penataan Tanah Bantaran Barat dan Timur Kali Anyar.....	83
GAMBAR 4.6.	Peta Pelaksanaan Peremajaan.....	85
GAMBAR 4.7.	Peta Kondisi Permasalahan Drainase Setelah Peremajaan.....	88
GAMBAR 4.8.	Peta Daerah Kumuh Setelah Peremajaan.....	90
GAMBAR 4.9.	Komposisi Jumlah Penduduk Tiap RW.....	91
GAMBAR 4.10.	Prosentase Penduduk Menurut Umur.....	92
GAMBAR 4.11.	Prosentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	93
GAMBAR 4.12.	Prosentase Penduduk Menurut Pekerjaan.....	94
GAMBAR 4.13.	Prosentase Penduduk Menurut Tingkat Pendapatan.....	95
GAMBAR 4.14.	Prosentase Penduduk Menurut Lama Tinggal.....	96
GAMBAR 4.15.	Prosentase Penduduk Menurut Status Hunian.....	97
GAMBAR 5.1.	Peta Lokasi Peremajaan.....	100
GAMBAR 5.2.	Faktor yang Berpengaruh pada Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW I ( <i>Redevelopment</i> ).....	109
GAMBAR 5.3.	Faktor yang Berpengaruh pada Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW II-VI.....	136
GAMBAR 5.4.	Faktor yang Berpengaruh pada Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII ( <i>Resettlement</i> ).....	174

LAMPIRAN A : Kuesioner.....	215
LAMPIRAN B : Wawancara.....	221
LAMPIRAN C : Foto-foto Kegiatan Pengamatan Lapangan.....	222
LAMPIRAN D : Perhitungan Tingkat Peran Serta Masyarakat selama Peremajaan.....	225
LAMPIRAN E : Tabel Data Responden.....	226

**DAFTAR LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Peremajaan lingkungan permukiman dilakukan untuk mengoptimalkan ruang kegiatan masyarakat dengan melakukan penataan permukiman kumuh terutama yang dihuni oleh kelompok masyarakat kota berpenghasilan rendah. Dalam hal ini terdapat berbagai tipe peremajaan yang dapat dilakukan. Di Mojosoongo yang pada awalnya merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta, peremajaan dilakukan dengan redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan. Dalam peremajaan tersebut dibutuhkan adanya pengelolaan prasarana pasca pelaksanaan.

Tujuan penelitian ini adalah dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana dengan mengetahui bentuk peran serta, tingkat peran serta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisa kuantitatif dengan tabulasi silang yang didukung dengan diskriptif kualitatif.

Di Mojosoongo, bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana untuk tiap-tiap lingkungan yang terkena program peremajaan yang berbeda pada dasarnya sama. Untuk bentuk sumbangan dalam pengelolaan prasarana berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Kegiatan pertemuan dilakukan satu kali dalam sebulan dimana kehadiran warga diwakili oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan untuk tingkat RT dihadiri seluruh warga. Pertemuan tersebut dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya. Dalam hal ini untuk tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung sedangkan tingkat RW berbentuk peran serta tak langsung. Mengenai derajat kesukarelaan maka kegiatan yang ada berbentuk peran serta bebas.

Secara keseluruhan tingkat peran serta masyarakat tinggi dalam pengelolaan prasarana dan menurut kategori Arstein dapat digolongkan pada tingkat *delegated power*. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana di Mojosoongo tidak selamanya benar.

Mengenai faktor yang berpengaruh, di RW I (redevelopment), bentuk peran serta dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan dari pemerintah. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan, persepsi manfaat dan karakteristik prasarana. Di RW II-VI (program peremajaan tanpa merubah struktur kawasan), bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi oleh umur, jenis pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal, persepsi tanggungjawab dan bantuan pihak ketiga. Untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, tingkat pendapatan, tingkat peran serta selama peremajaan, persepsi manfaat, pemberian bantuan dana dan material oleh pemerintah. Pada akhirnya di RW VII (resettlement), bentuk peran serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang dikenal. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi manfaat peran serta, jumlah tetangga yang dikenal, lama tinggal dan tingkat peran serta selama peremajaan. Sehingga secara keseluruhan pada kawasan yang telah diremajakan bentuk peran serta dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal dan tingkat peran serta dipengaruhi persepsi manfaat kegiatan peran serta.

Dengan demikian untuk meningkatkan peran serta masyarakat di seluruh kawasan yang telah diremajakan di Mojosoongo maka faktor yang harus diperhatikan agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengelolaan prasarana adalah faktor jumlah tetangga yang dikenal dan faktor persepsi manfaat kegiatan. Upaya ini harus didukung dengan usaha-usaha untuk memperkecil hambatan-hambatan masyarakat dalam berperan serta terutama di bidang ekonomi dan birokrasi dari Pemerintah.

## ABSTRACT

The renewal of slum area is done to optimize the public space by arranging the public housing especially for the low cost housing. In this case there are some types of the renewal that can be used. In Mojosoongo, it was done by redevelopment, resettlement and the program without changing area structure. After implementation the program, they need infrastructure management.

The purpose of this research based to increase community participation in the infrastructure management by knowing the forms of participation, the level of participation and influence factors. In order to reach those goal, there is quantitative analyst by cross tabulation support by qualitative description.

In different area in Mojosoongo that have been improved with different program there are the same types of community participation in infrastucture management. In the form of donation, peoples like to give the force form and in the activity form, there is mass action to maintain and develop the infrastructure. The meeting activity done once a month that present a part of the society in the RW level, in the RT level present all of the society. Those meeting regularly done at the same time and different place or at different time and the same place. In this case for the RT level tend to form as direct participation while on the RW level is indirect participation. About the voluntary degree there is free participation form.

The community participation level in infrastructure management in Mojosoongo totally high and according to Arstein it can be classified at the delegated power level. It shows that the judgment about how low the level of community participation was not entirely correct.

Concerning the influence factors, in RW I (redevelopment), the form of participation be influenced by the number of neighbors known, the form of donation during the renewal that has be done, leader presence and how much the government assistance. For the participation level be influenced by the age, the form of donation during the renewal, perception the benefit of community participation and infrastructure characteristic. In RW II-VI, the form of participation be influenced by the age, occupation, the number of neighbors known, perception of the infrastucture management responsibility and role of external agencies. For the level of community participation be influenced the age, income level, the level of community participation during the renewal, perception of the benefit of community participation, the government help on fund and material. In RW VII (resettlement), the form of community participation be influenced by education level and the number of neighbors known. For the level of participation be influenced by education level, the perception of the benefit of community participation, the number of neighbors known, the long of the living and the level of participation during the renewal. As for the whole area improved, the form of community participation be influnced by the number of neighbor knowns and the level of community participation is influenced by the perception of the benefit of community participation in infrastructure management.

To increase the level of community participation in the whole area in Mojosoongo that has been improved in the renewal of slum area, the factors that must be concerned if the community more participate in infrastucture management are the number of neighbors factor and the perception of the benefit of community participation. This effort must be supported with the activities to decrease community participation constraints especially in the economic and government bureaucracy.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, kota merupakan sumber dari bermacam-macam lapangan pekerjaan yang menarik. Urbanisasi telah mendorong orang datang dan tinggal di kota yang akhirnya meningkatkan kepadatan penduduk kota. Kepadatan penduduk ini terkonsentrasi di kawasan-kawasan permukiman di penjurukota.

Di kota, peningkatan permintaan akan permukiman yang layak tidak sebanding dengan penyediaan sarana dan prasarana. Menurut Batubara (dalam Budiharjo, 1998:91-94), padatnya penduduk di kota akan mengakibatkan semakin kurang memadainya sarana dan prasarana permukiman. Padahal perumahan dan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan dasar dan merupakan faktor penting dalam peningkatan stabilitas sosial, dinamika dan produktifitas masyarakat. Tidak tersedianya perumahan dan prasarana lingkungan yang memadai mengakibatkan tumbuhnya "slums", kawasan permukiman kumuh, yang menimbulkan berbagai masalah kualitas lingkungan hidup kota yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan sosial ekonomi.

Sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah perkotaan, Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan peremajaan lingkungan permukiman. Peremajaan lingkungan permukiman dalam hal ini merupakan suatu proses penataan kembali kawasan kumuh perkotaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kegiatan masyarakat. Proses tersebut terutama diterapkan pada kawasan yang dihuni oleh kelompok masyarakat kota berpenghasilan rendah. (Cipta Karya, 1996: III-6).

Peremajaan lingkungan permukiman melibatkan beberapa komponen yang harus dibenahi. Salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi tersebut adalah prasarana. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Prasarana lingkungan adalah jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematuan (drainase) dan pencegahan banjir (Dirjend Cipta Karya, IAP, 1997:86). Di sini ditekankan bahwa prasarana berpengaruh pada kondisi lingkungan. Pemeliharaan dan perbaikan pada prasarana akan menjamin kualitas lingkungan permukiman.

Sejalan dengan hal-hal diatas, Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki permasalahan peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan penyediaan rumah yang layak. Hal ini ditandai dengan adanya permukiman kumuh telah tumbuh pesat di beberapa bagian kota. Sehubungan dengan kondisi tersebut beberapa usaha peremajaan telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman. Salah satu kegiatan peremajaan yang telah berhasil dilakukan adalah peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo.

Kawasan di Mojosoongo pada awalnya merupakan permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Sebagian warganya mempunyai masalah dengan status tanahnya, karena menempati tanah negara, bantaran sungai dan daerah yang termasuk dalam sempadan sungai. Kondisi ini diperburuk dengan adanya polusi akibat limbah kotoran maupun udara dari peternakan babi dan pabrik tahu.

Melihat hal tersebut maka Pemerintah (Ditjen Cipta Karya dan Pemda Kodya Surakarta) bersama Bank Dunia melalui *Semarang Surakarta Urban Development Program* (SSUDP) menetapkan Kalurahan Mojosoongo sebagai kawasan yang perlu ditata kembali untuk dapat mendukung perkembangan Kota Surakarta secara keseluruhan. Disadari bahwa

pembangunan fisik tidak dapat langsung dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu pendekatan untuk menyiapkan masyarakat secara sosial.

Proyek ini dimulai pada tahun 1996, dengan melakukan berbagai program peremajaan. Program *redevelopment* dilakukan pada daerah di Bantaran barat Kali Anyar untuk menata kembali kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai, program *resettlement* dilakukan dengan memindahkan warga di Bantaran timur Kali Anyar ke Kedung Tungkul dan program yang terakhir adalah peningkatan kualitas lingkungan secara umum yang dilakukan tanpa merubah struktur fisik kawasan yang telah ada dengan memperbaiki prasarana lingkungan yang ada.

Mengenai pendekatan ke masyarakat, pada tahap persiapan dan perencanaan masyarakat diajak untuk berperan serta dengan menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini masyarakat diminta untuk membuat usulan-usulan, prioritas dan keinginan-keinginannya berkaitan dengan proyek yang akan dilaksanakan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun 1998, dengan menghasilkan beberapa rencana, desain serta kesepakatan lainnya yang sebagian berfungsi sebagai masukan bagi pembangunan fisik. Setelah Nopember 1998 barulah kegiatan fisik dilaksanakan yang terdiri dari beberapa paket pembangunan dengan tanpa meninggalkan proses pendampingan masyarakat.

Proyek tersebut telah dinilai berhasil meningkatkan tingkat ekonomi, sosial, kesehatan, keamanan dan berhasil memacu peran serta. Menurut hasil laporan dari Departemen Kimpraswil (2001:4-7), peran serta masyarakat terlihat cukup mendukung dalam pelaksanaan proyek *peremajaan lingkungan permukiman*. Pada sektor ini beberapa penduduk yang sebagian lahannya terkena pelurusan jalan, saluran, hidran dan MCK bersedia menyerahkan tanpa ganti rugi, meskipun melalui pendekatan yang tidak mudah. Peran serta masyarakat pada sektor ini bisa dinilai memuaskan.

### *b. Data sekunder*

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah dioleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, et al,2001:19). Dalam hal ini data sekunder diperoleh misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

- a. *Kuesioner* yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup dengan pengertian bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan.

Skala yang dipakai untuk menentukan jumlah alternatif jawaban untuk data yang sifatnya ordinal dipakai skala Likert. Skala Likert menggunakan metode penilaian terakhir. Biasanya responden memberi tanda pada skala *1 sampai 5* dimana setengah soal positif dan setengahnya lagi negatif. Skor responden adalah jumlah seluruh skor pada soal-soal yang terpisah. Namun banyak peneliti yang memberikan penekanan pada kecenderungan responden untuk “mengamankan” dan untuk menempatkan jawaban mereka di tengah sebagai angka netral. Ini disebut pengaruh “kecenderungan sentral.” Sehingga beberapa

peneliti berusaha menghapuskan samasekali dengan menghilangkan angka netral dan mengurangi skala menjadi 4 angka (Sevilla, et al, 1993:225).

Dari pengertian di atas maka pada penelitian ini dipakai skala 1 sampai 4 untuk data yang sifatnya ordinal. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2002:63) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan skala Likert tidak terdapat aturan baku dimana dalam hal ini dapat dipakai dengan jumlah ganjil atau genap.

- b. *Wawancara* mendalam merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.
- c. *Observasi* yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang penting, sehingga penulis mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan.

### **3.4. Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun,1995:152). Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Dalam hal ini populasi berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir,1999:327).

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan individu atau seluruh gejala atau seluruh peristiwa yang akan diselidiki yang mempunyai karakteristik spesifik sebagai sumber data dan sebagai batasan generalisasi dari hasil penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang dijadikan populasi dalam

penelitian ini adalah warga Kelurahan Mojosongo Kecamatan Banjarsari yang telah diremajakan melalui proyek *Peremajaan lingkungan permukiman* yaitu RW I, II, III, IV, V, VI dan VII. Dimana untuk RW I terkena proyek peremajaan dengan program *redevelopment*, RW II-VI terkena proyek peremajaan dengan program peremajaan tanpa merubah struktur kawasan dan RW VII terkena proyek peremajaan dengan program *resettlement*.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel merupakan sebagian individu yang diselidiki (Hadi,2000:70). Pendapat lain mengatakan bahwa sampel adalah wakil dari populasi yang dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nasir,1999:325).

Berdasarkan hal di atas maka sampel yang akan diambil harus mewakili populasi dimana semakin besar populasi semakin besar pula sampelnya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sejumlah responden dari jumlah populasi yang ada sebagai sampel.

Sesuai dengan Schubeler (1996:21) mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan prasarana, sebagai catatan penting adalah bahwa unit dasar pengambilan keputusan dan tindakan memandang prasarana secara individual atau sebuah rumah tangga. Sehingga responden disini adalah *kepala keluarga* atau anggota keluarga lain yang memiliki peran penting dalam keluarga. Maksud dari pengambilan sampel adalah mereduksi jumlah responden yang akan diambil datanya. Dalam hal ini sampel akan mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *area probability sample* dilengkapi dengan *proportional sample*. *Area probability sample* atau *sampel wilayah* adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Sedangkan *proportional sample* dilakukan

untuk menyempurnakan penggunaan sample wilayah. Ada kalanya banyaknya subyek yang terdapat pada setiap strata atau setiap wilayah tidak sama. Oleh karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif, ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-masing wilayah. (Arikunto,1998:126-127).

Sedangkan mengenai jumlah warga yang akan dijadikan sampel terdapat beberapa pedoman. Untuk penelitian deskriptif kuantitatif ini dapat dipakai ukuran minimum dari Gay (dalam Sevilla,1993:163) pada penelitian deskriptif yaitu sebesar 10% dari populasi.

Untuk menentukan jumlah ukuran sampel dipakai formulasi dari Slovin (dalam Sevilla,1993:161) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana,

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

d<sup>2</sup> : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Dalam hal ini batas ketelitian yang dipakai dalam menentukan jumlah sampel adalah 10%.

Berdasarkan formulasi tersebut maka bila jumlah KK di RW I, II, III, IV, V, VI, dan VII adalah 2.773 KK maka ukuran sampelnya adalah :

$$n = \frac{2.773}{1 + 2.773 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = .97 \rightarrow n = 100$$

Jadi besarnya ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 Kepala Keluarga.

Untuk jumlah sampel pada masing-masing RW yang terkena program dapat dihitung berdasarkan teknik *proportional sampel* yang didasarkan pada prosentase jumlah penduduk di tiap-tiap RW yang diremajakan dengan *redevelopment*, peremajaan tanpa merubah struktur kawasan dan *resettlement*. Sehingga jumlah masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III.1  
PERHITUNGAN JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

RW	Jumlah Penduduk (orang)	Prosentase penduduk utk tiap program (%)	Jumlah Sampel (responden)
I	1.299	13,9	14
II-VI	7.430	79,2	79
VII	648	6,9	7
Jumlah	9.377	100	100

Sumber : Data Sekunder diolah, 2003

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas maka dapat diketahui besarnya sampel pada masing-masing program yaitu untuk RW I (*redevelopment*) sebanyak 14 responden, RW II-VI sebanyak 79 responden dan RW VII sebanyak 7 responden.

Setelah jumlah sampel yang akan diambil diketahui maka untuk teknis pelaksanaan dipakai *teknik purposive sampling*. Dalam hal ini responden yang dipilih adalah warga yang terlibat dalam proses peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta ataupun warga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan prasarana yang telah dibangun.

### 3.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan studi ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif didukung dengan kualitatif serta metode tabulasi silang. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

*a. Metode untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat.*

Untuk mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca *peremajaan lingkungan permukiman* dipakai metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil pengambilan data dari para warga maka dapat diketahui prosentase bentuk peran serta yang diinginkan dalam pengelolaan prasarana pasca *peremajaan lingkungan permukiman* baik bentuk sumbangan dalam berperan serta maupun bentuk kegiatan.

*b. Metode untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat.*

Menurut Schubeler (1996:32) peran serta dalam pengelolaan prasarana lebih merupakan proses dan bukan produk. Dengan demikian untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca *peremajaan lingkungan permukiman* dapat dilihat dari proses kegiatannya. Tingkat peran serta masyarakat ini diukur dengan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor dari indikator frekuensi kehadiran dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan membayar iuran atau sumbangan lain yang telah disepakati bersama. Dimana masing-masing indikator terdiri dari skala tinggi (4), agak tinggi (3), rendah (2) dan sangat rendah (1).

Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat peran serta masyarakat secara menyeluruh didasarkan skor kategori tingkat peran serta individu dikalikan dengan jumlah sampel. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat 4 kriteria dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 4. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu ( $4 \times 1$ ) adalah 4, maksimum skor yang

diperoleh untuk setiap individu ( $4 \times 4$ ) adalah 16. Maka bila jumlah sampel 100, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat peran serta masyarakat ( $100 \times 4$ ) adalah 400 dan skor maksimum ( $100 \times 16$ ) adalah 1600. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval,  $(1600 - 400)/4 = 300$ . Sehingga dapat diketahui tingkat peran serta masyarakat adalah

- |                                    |      |   |      |
|------------------------------------|------|---|------|
| ▪ Sangat Tinggi bila memiliki skor | 1301 | – | 1600 |
| ▪ Tinggi bila memiliki skor        | 1001 | – | 1300 |
| ▪ Rendah bila memiliki skor        | 701  | – | 1000 |
| ▪ Sangat rendah bila memiliki skor | 400  | – | 700  |

Metode ini juga dipakai untuk mengetahui range skala penilaian tingkat peran serta di RW I (*redevelopment*), RW II-VI dan RW VII (*resettlement*) dengan berbagai jumlah responden seperti yang terlihat pada Tabel III.2.

Sedangkan untuk mengukur tingkat peran serta masyarakat *selama perencanaan dan pelaksanaan peremajaan lingkungan permukiman* terdiri dari dua yaitu :

- a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam *proses pembuatan rencana dan pelaksanaan* dipakai metode analisis kuantitatif sama seperti di atas dengan indikator frekuensi kehadiran dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan membayar iuran atau sumbangan lain yang telah disepakati bersama, dan kemudian dikategorikan dalam tingkat peran serta tinggi bila memiliki skor 1301-1600, agak tinggi bila skor 1001-1300, rendah bila skor 701-1000 dan sangat rendah bila skor yang diperoleh 400-700.
- b. Tingkat peran serta masyarakat terhadap *hasil perencanaan dan pelaksanaan* dipakai metode kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan studi laporan proyek dengan tolok ukur sejauhmana pengaruh usulan warga terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini dipakai tipologi dari Arstein dan kemudian di kelompokkan

TABEL III.2.  
PERHITUNGAN SKOR UNTUK MENENTUKAN TINGKAT PERAN SERTA

Jml Rspdn	Perhitungan Range Tingkat Peran Serta							
	Untuk Tiap Kriteria				Untuk 4 Kriteria Sekaligus			
	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
1	1 - 1.75	1.75 - 2.5	2.5 - 3.25	3.25 - 4	4 - 7	7 - 10	10 - 13	13 - 16
2	2 - 3.5	3.5 - 5	5 - 6.5	6.5 - 8	8 - 14	14 - 20	20 - 26	26 - 32
3	3 - 5.25	5.25 - 7.5	7.5 - 9.75	9.75 - 12	12 - 21	21 - 30	30 - 39	39 - 48
4	4 - 7	7 - 10	10 - 13	13 - 16	16 - 28	28 - 40	40 - 52	52 - 64
5	5 - 8.75	8.75 - 12.5	12.5 - 16.25	16.25 - 20	20 - 35	35 - 50	50 - 65	65 - 80
6	6 - 10.5	10.5 - 15	15 - 19.5	19.5 - 24	24 - 42	42 - 60	60 - 78	78 - 96
7	7 - 12.25	12.25 - 17.5	17.5 - 22.75	22.75 - 28	28 - 49	49 - 70	70 - 91	91 - 112
8	8 - 14	14 - 20	20 - 26	26 - 32	32 - 56	56 - 80	80 - 104	104 - 128
9	9 - 15.75	15.75 - 22.5	22.5 - 29.25	29.25 - 36	36 - 63	63 - 90	90 - 117	117 - 144
10	10 - 17.5	17.5 - 25	25 - 32.5	32.5 - 40	40 - 70	70 - 100	100 - 130	130 - 160
11	11 - 19.25	19.25 - 27.5	27.5 - 35.75	35.75 - 44	44 - 77	77 - 110	110 - 143	143 - 176
12	12 - 21	21 - 30	30 - 39	39 - 48	48 - 84	84 - 120	120 - 156	156 - 192
13	13 - 22.75	22.75 - 32.5	32.5 - 42.25	42.25 - 52	52 - 91	91 - 130	130 - 169	169 - 208
14	14 - 24.5	24.5 - 35	35 - 45.5	45.5 - 56	56 - 98	98 - 140	140 - 182	182 - 224
15	15 - 26.25	26.25 - 37.5	37.5 - 48.75	48.75 - 60	60 - 105	105 - 150	150 - 195	195 - 240
16	16 - 28	28 - 40	40 - 52	52 - 64	64 - 112	112 - 160	160 - 208	208 - 256
17	17 - 29.75	29.75 - 42.5	42.5 - 55.25	55.25 - 68	68 - 119	119 - 170	170 - 221	221 - 272
18	18 - 31.5	31.5 - 45	45 - 58.5	58.5 - 72	72 - 126	126 - 180	180 - 234	234 - 288
19	19 - 33.25	33.25 - 47.5	47.5 - 61.75	61.75 - 76	76 - 133	133 - 190	190 - 247	247 - 304
20	20 - 35	35 - 50	50 - 65	65 - 80	80 - 140	140 - 200	200 - 260	260 - 320
21	21 - 36.75	36.75 - 52.5	52.5 - 68.25	68.25 - 84	84 - 147	147 - 210	210 - 273	273 - 336
22	22 - 38.5	38.5 - 55	55 - 71.5	71.5 - 88	88 - 154	154 - 220	220 - 286	286 - 352
23	23 - 40.25	40.25 - 57.5	57.5 - 74.75	74.75 - 92	92 - 161	161 - 230	230 - 299	299 - 368
24	24 - 42	42 - 60	60 - 78	78 - 96	96 - 168	168 - 240	240 - 312	312 - 384
25	25 - 43.75	43.75 - 62.5	62.5 - 81.25	81.25 - 100	100 - 175	175 - 250	250 - 325	325 - 400
26	26 - 45.5	45.5 - 65	65 - 84.5	84.5 - 104	104 - 182	182 - 260	260 - 338	338 - 416
27	27 - 47.25	47.25 - 67.5	67.5 - 87.75	87.75 - 108	108 - 189	189 - 270	270 - 351	351 - 432
28	28 - 49	49 - 70	70 - 91	91 - 112	112 - 196	196 - 280	280 - 364	364 - 448
29	29 - 50.75	50.75 - 72.5	72.5 - 94.25	94.25 - 116	116 - 203	203 - 290	290 - 377	377 - 464
30	30 - 52.5	52.5 - 75	75 - 97.5	97.5 - 120	120 - 210	210 - 300	300 - 390	390 - 480
31	31 - 54.25	54.25 - 77.5	77.5 - 100.75	100.75 - 124	124 - 217	217 - 310	310 - 403	403 - 496
32	32 - 56	56 - 80	80 - 104	104 - 128	128 - 224	224 - 320	320 - 416	416 - 512
33	33 - 57.75	57.75 - 82.5	82.5 - 107.25	107.25 - 132	132 - 231	231 - 330	330 - 429	429 - 528
34	34 - 59.5	59.5 - 85	85 - 110.5	110.5 - 136	136 - 238	238 - 340	340 - 442	442 - 544
35	35 - 61.25	61.25 - 87.5	87.5 - 113.75	113.75 - 140	140 - 246	245 - 350	350 - 455	455 - 560
36	36 - 63	63 - 90	90 - 117	117 - 144	144 - 252	252 - 360	360 - 468	468 - 576
37	37 - 64.75	64.75 - 92.5	92.5 - 120.25	120.25 - 148	148 - 259	259 - 370	370 - 481	481 - 592
38	38 - 66.5	66.5 - 95	95 - 123.5	123.5 - 152	152 - 266	266 - 380	380 - 494	494 - 608
39	39 - 68.25	68.25 - 97.5	97.5 - 126.75	126.75 - 156	156 - 273	273 - 390	390 - 507	507 - 624
40	40 - 70	70 - 100	100 - 130	130 - 160	160 - 280	280 - 400	400 - 520	520 - 640
41	41 - 71.75	71.75 - 102.5	102.5 - 133.25	133.25 - 164	164 - 287	287 - 410	410 - 533	533 - 656
42	42 - 73.5	73.5 - 105	105 - 136.5	136.5 - 168	168 - 294	294 - 420	420 - 546	546 - 672
43	43 - 75.25	75.25 - 107.5	107.5 - 139.75	139.75 - 172	172 - 301	301 - 430	430 - 559	559 - 688
44	44 - 77	77 - 110	110 - 143	143 - 176	176 - 308	308 - 440	440 - 572	572 - 704
45	45 - 78.75	78.75 - 112.5	112.5 - 146.25	146.25 - 180	180 - 315	315 - 450	450 - 585	585 - 720
46	46 - 80.5	80.5 - 115	115 - 149.5	149.5 - 184	184 - 322	322 - 460	460 - 598	598 - 736
47	47 - 82.25	82.25 - 117.5	117.5 - 152.75	152.75 - 188	188 - 329	329 - 470	470 - 611	611 - 752
48	48 - 84	84 - 120	120 - 156	156 - 192	192 - 336	336 - 480	480 - 624	624 - 768
49	49 - 85.75	85.75 - 122.5	122.5 - 159.25	159.25 - 196	196 - 343	343 - 490	490 - 637	637 - 784
50	50 - 87.5	87.5 - 125	125 - 162.5	162.5 - 200	200 - 350	350 - 500	500 - 650	650 - 800

Sumber : Data primer diolah, 2003

dalam kategori peran serta tinggi sampai sangat rendah agar dapat diukur kuantitasnya seperti berikut ini :

- Delegated power dan Citizen Control (tinggi)
- Placation & Partnership (agak tinggi),
- Informing & Consultation (rendah),
- Manipulation & Therapy (sangat rendah),

Metode kualitatif ini juga didukung dengan metode kuantitatif tingkat kesesuaian hasil proyek dengan keinginan dan usulan penduduk.

c. *Metode untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.*

Dalam mengamati hasil survey primer yang di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan model tabulasi silang. Prosedur tabulasi silang digunakan untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih, dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya.

Dalam studi ini, metode tabulasi silang digunakan untuk menganalisis hasil survey primer yang dilakukan terhadap responden di RW I (redevelopment), RW II-VI dan RW VII (*resettlement*) di Kalurahan Mojosongo. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta dengan faktor kemauan dan kemampuan masyarakat dan faktor dukungan dari pemerintah dan lembaga pendamping serta karakteristik prasarana.

Data-data dari tiap variabel tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori, dimana dari setiap kategori tersebut diberi skor untuk mempermudah perhitungan. Kemudian variabel-variabel yang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontigensi (*contingency coefficient*). Dalam hal ini koefisien kontigensi merupakan koefisien yang digunakan untuk melihat *ada* atau *tidak* serta *kuat* atau *lemahnya* hubungan diantara dua variabel.

Metode tabulasi silang akan mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris tabel tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis variabel-variabel tersebut dipakai dengan tabel dua dimensi (ixj) yang merupakan cara yang termudah.

TABEL III.3.  
FORMAT TABULASI SILANG

	1	2	....	j	....	k	
1	c <sub>11</sub>	c <sub>11</sub>	....	c <sub>1j</sub>	....	c <sub>1k</sub>	n <sub>1</sub>
2	c <sub>21</sub>	c <sub>11</sub>	....	c <sub>11</sub>	....	c <sub>2k</sub>	n <sub>2</sub>
....	....	....	....	....	....	....	....
i	c <sub>i1</sub>	c <sub>i2</sub>		c <sub>ij</sub>	....	c <sub>ik</sub>	n <sub>i</sub>
....	....	....	....	....	....	....	....
r	c <sub>r1</sub>	c <sub>r2</sub>	....	c <sub>ij</sub>	....	c <sub>rk</sub>	n <sub>r</sub>
Σ	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	....	n <sub>j</sub>	....	n <sub>k</sub>	n

Sumber: Nasir, 1999

Pengujian yang dilakukan bersifat pendekatan. Frekuensi yang diharapkan terjadi akan dinyatakan dengan  $e_{ij}$ , dengan rumus (Nasir, 1999:480):

$$e_{ij} = \frac{(n_i) \cdot (n_j)}{n}$$

Dimana :  $n_i$  = jumlah baris ke-i

$n_j$  = jumlah baris ke-j

Berdasarkan formula ini maka didapat

$$e_{11} = \frac{(n_1) \cdot (n_1)}{n} \quad e_{21} = \frac{(n_2) \cdot (n_1)}{n} \quad e_{23} = \frac{(n_2) \cdot (n_3)}{n}$$

dan seterusnya .....

maka :  $n = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_r) = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k)$

Selanjutnya dicari besaran  $\chi^2$  (dibaca chi-kuadrat) dengan memakai formula

(Nasir, 1999:481):

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(c_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

Setelah  $\chi^2$  diketahui, maka besarnya contingency coefficient (Cc) dapat dihitung

dengan menggunakan rumus :

$$C_c = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$$

Dimana besarnya Cc berada pada rentang skala antara 0 sampai 1, atau :

$$0 \leq C_c \leq 1$$

Bila  $C_c = 0$  berarti tidak ada hubungan

Bila  $C_c = 1$  berarti ada hubungan sempurna

Dalam hal ini semakin mendekati angka 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat dan semakin mendekati angka 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

TABEL III.4.  
TABEL KEBUTUHAN DATA

NO	KOMPONEN	VARIABEL	KEBUTUHAN DATA	SUMBER DATA	WAWANCARA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	
						KUESIONER	SKALA PENILAIAN
1	BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT	Bentuk sumbangan dalam berperan serta : Pikiran, Uang, Material, Tenaga Bentuk kegiatan dalam berperan serta ▪ Cara keterlibatan dlm pelaksanaan ▪ Cara keterlibatan dlm pertemuan ▪ Intensitas kegiatan ▪ Frekuensi kegiatan ▪ Derajat kesukarelaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data mengenai bentuk sumbangan dalam berperan serta</li> <li>Bentuk kegiatan dalam pengelolaan prasarana yg diinginkan apakah kerja bakti, melaksanakan dilingkungan sendiri atau mengupah seseorang.</li> <li>Data keikutsertaan dalam pertemuan <i>dihwatikan</i> atau <i>tidak</i></li> <li>Data kegiatan pengelolaan dilakukan rutin atau tidak</li> <li>Data jumlah kegiatan bersama dalam satu bulan</li> <li>Data pandangan warga bahwa peran serta dilaksanakan dengan <i>terpaksa</i> atau <i>tidak</i></li> <li>Data tingkat kehadiran dim pertemuan</li> <li>Data tingkat keaktifan berdiskusi warga dlm rapat</li> <li>Data tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan fisik</li> <li>Data tingkat kesediaan memberi iuran tepat pada waktunya</li> </ul>	Masyarakat	A.1	B.1. B.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diambil dari prosentase jumlah responden yang memilih bentuk sumbangan Pikiran, Uang, Material atau Tenaga utk berperan serta</li> <li>Diambil dari prosentase jml jawaban responden terhadap bentuk kegiatan dalam berperan serta.</li> </ul>
2	TINGKAT PERAN SERTA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN		<ul style="list-style-type: none"> <li>Data tingkat kesediaan memberi iuran tepat pada waktunya</li> </ul>	Masyarakat	A.2. A.3.	B.3. B.4. B.5. B.6. B.7. B.8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah</li> <li>Sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah</li> <li>Sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah</li> <li>Sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah</li> </ul>
3	FAKTOR INTERNAL MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usia</li> <li>Tingkat pendidikan</li> <li>Jenis pekerjaan</li> <li>Tingkat pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data prosentase usia responden</li> <li>Data prosentase tingkat pendidikan responden</li> <li>Data prosentase jenis pekerjaan warga</li> <li>Data rata-rata jumlah pendapatan warga tiap bulan dilihat dari besarnya pengeluaran</li> </ul>	Masyarakat	A.1. A.2.	A.1. A.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lebih dari 50 th, 41-50 th, 31-40 th, 20-30 th</li> <li>Tingkat pendidikan tinggi yaitu D3, Perti</li> <li>Tingkat pendidikan menengah yaitu SMP, SMA</li> <li>Tingkat pendidikan dasar yaitu SD</li> <li>Tidak tamat SD</li> <li>PNS/ABRI/Pensiunan, karyawan swasta, buruh, pedagang, wiraswasta, belum dapat pekerjaan</li> <li>&gt;1,2 jt, 800rb-1,2 jt, 400rb-800 rb, &lt;400rb</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data prosentase lama tinggal warga dalam satu RW.</li> <li>▪ Data status hunian hak milik, hak guna bangunan atau sewa/kontrak</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lebih dari 10 th, 5-10 th, 1-4 th, kurang dari 1 th</li> <li>▪ Status hunian hak milik, hak guna bangunan, sewa/kontrak 5 th atau lebih, sewa/kontrak kurang dari 5 th</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.5.</li> <li>▪ A.6.</li> </ul>		
3.2.	Ikatan psikologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lama tinggal</li> <li>▪ Status hunian</li> <li>▪ Jumlah tetangga yang dikenal</li> <li>▪ Bentuk sumbangan dan kegiatan dalam berperan serta selama perencanaan dan pelaksanaan peremajaan lingkungan</li> <li>▪ Tingkat peran serta masyarakat selama kegiatan peremajaan lingkungan permukiman yang telah dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data rata-rata jumlah tetangga yang dikenal</li> <li>▪ Data mengenai bentuk sumbangan dalam berperan serta selama peremajaan. Dan perlu diketahui apakah keterlibatan dlm perencanaan dan pelaksanaan atas kehendak sendiri atau diundang pemerintah serta derajat kesukarelaan keikutsertaan warga</li> <li>▪ Data kuantitatif tingkat peran serta masyarakat selama proses kegiatan proyek <i>peremajaan lingk. permukiman</i> yg tll dilakukan. Berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ frekuensi kehadiran,</li> <li>▪ keaktifan berdiskusi,</li> <li>▪ keterlibatan dlm fisik dan</li> <li>▪ kesediaan membayar iuran.</li> </ul> </li> <li>▪ Data kualitatif mengenai tingkat peran serta masyarakat terhadap hasil kegiatan. dimasukkan dalam kategori : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Delegated power dan Citizen Control (tinggi)</li> <li>▪ Placation &amp; Partnership (agak tinggi),</li> <li>▪ Informing &amp; Consultation (rendah),</li> <li>▪ Manipulation &amp; Therapy (sangat rendah),</li> </ul> </li> <li>▪ Data kuantitatif tingkat kesesuaian hasil kegiatan selama urban renewal dengan keinginan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ <i>Lap. Proyek</i></li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hampir semua &gt;75%, 50%-75%, 25%-50%, kurang dari 25%</li> <li>▪ Prosentase jwabn warga terhadap jumlah bentuk sumbangan selama perencanaan dan pelaksanaan peremajaan lingkungan</li> <li>▪ Selalu hadir, sering hadir, jarang hadir, tidak pernah hadir.</li> <li>▪ Sangat aktif, aktif, kurang aktif, tidak aktif.</li> <li>▪ Selalu hadir, sering hadir, jarang hadir, tidak pernah hadir.</li> <li>▪ Selalu tepat waktu, sering tepat waktu, jarang tepat waktu, tidak pernah tepat waktu</li> <li>▪ Tinggi, Agak Tinggi, Rendah dan Sangat Rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.1.</li> <li>▪ D.2.</li> <li>▪ D.3.</li> <li>▪ D.4.</li> <li>▪ D.5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.13.</li> <li>▪ A.14.</li> <li>▪ A.15.</li> </ul>	
3.3.	Persepsi kegiatan peran serta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesesuaian hasil kegiatan selama urban renewal dengan keinginan dan usulan masyarakat</li> <li>▪ Penilaian manfaat kegiatan peran serta</li> <li>▪ Persepsi mengenai tanggung jawab pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data penilaian warga terhadap manfaat kegiatan bersama warga RW</li> <li>▪ Data tanggapan warga mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun dlm <i>urban renewal</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai</li> <li>▪ Banyak sekali, banyak, sedikit, tidak ada</li> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ Masy. dibantu Pemerintah</li> <li>▪ Pemerintah dibantu masy</li> <li>▪ Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.16.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ D.12.</li> <li>▪ D.13.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B.1.</li> </ul>

3.4.	Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kehadiran pemimpin dalam setiap kegiatan bersama</li> <li>▪ Intensitas pengarahan pemimpin dlm setiap kegiatan</li> <li>▪ Dukungan warga terhadap pemimpin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data tingkat kehadiran pemimpin dlm setiap pertemuan atau acara atas undangan warga</li> <li>▪ Data intensitas pengarahan dari pemimpin dalam setiap kegiatan yang dilakukan</li> <li>▪ Data tingkat dukungan warga terhadap pemimpin mereka</li> </ul>	Masyarakat	A.5. A.6. A.7.	D.14.  D.15.  D.16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selalu hadir, sering hadir, jarang hadir, tidak pernah hadir</li> <li>▪ Selalu memberi arahan, sering mengarahkan, jarang mengarahkan, tidak pernah mengarahkan.</li> <li>▪ Sangat mendukung, mendukung, kurang mendukung, tidak mendukung</li> </ul>
4	<b>FAKTOR EKSTERNAL MASYARAKAT</b>						
4.1.	Peran Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stimulan konsultasi dan kemudahan</li> <li>▪ Stimulan dana</li> <li>▪ Stimulan material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data mengenai pemberian bantuan oleh pemerintah</li> <li>▪ Data prosentase jumlah bantuan yg telah diberikan pemerintah dgn total dana yg disediakan warga.</li> <li>▪ Data keterlibatan pihak ketiga sbg pendamping dalam kegiatan peran serta.</li> </ul>	Masyarakat Kalurahan Bappeda DPU	A.10. B.2. B.3. B.4.	D.17. D.18. D.19. D.20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan tanpa ada permintaan dari masyarakat.</li> <li>▪ Diberikan dgn ada permint. dari masyarakat dahulu,</li> <li>▪ Dengan meminta tetapi kadang diberi kadang tidak,</li> <li>▪ Tidak ada</li> <li>▪ &gt;75% dari total biaya, 50%-75%, 25%-50%, &lt;25%.</li> </ul>
4.2.	Peran pihak ketiga sebagai pendamping	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keaktifan pendamping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan tanpa ada permintaan dari masyarakat</li> <li>▪ Diberikan dgn ada permint. dari masyarakat dahulu.</li> <li>▪ Dengan meminta tetapi kadang diberi kadang tidak.</li> <li>▪ Tidak ada</li> </ul>	Masyarakat	A.10.	D.21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan tanpa ada permintaan dari masyarakat</li> <li>▪ Diberikan dgn ada permint. dari masyarakat dahulu.</li> <li>▪ Dengan meminta tetapi kadang diberi kadang tidak.</li> <li>▪ Tidak ada</li> </ul>
4.3.	Karakteristik prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi prasarana dan fungsi untuk melayani</li> </ul>	Masyarakat	A.8. A.9.	D.22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berfungsi dengan sebagian kecil yang rusak</li> <li>▪ Berfungsi tetapi banyak yang rusak,</li> <li>▪ Tidak berfungsi karena banyak yang rusak,</li> <li>▪ Tidak berfungsi walaupun tidak rusak</li> </ul>

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI MOJOSONGO**

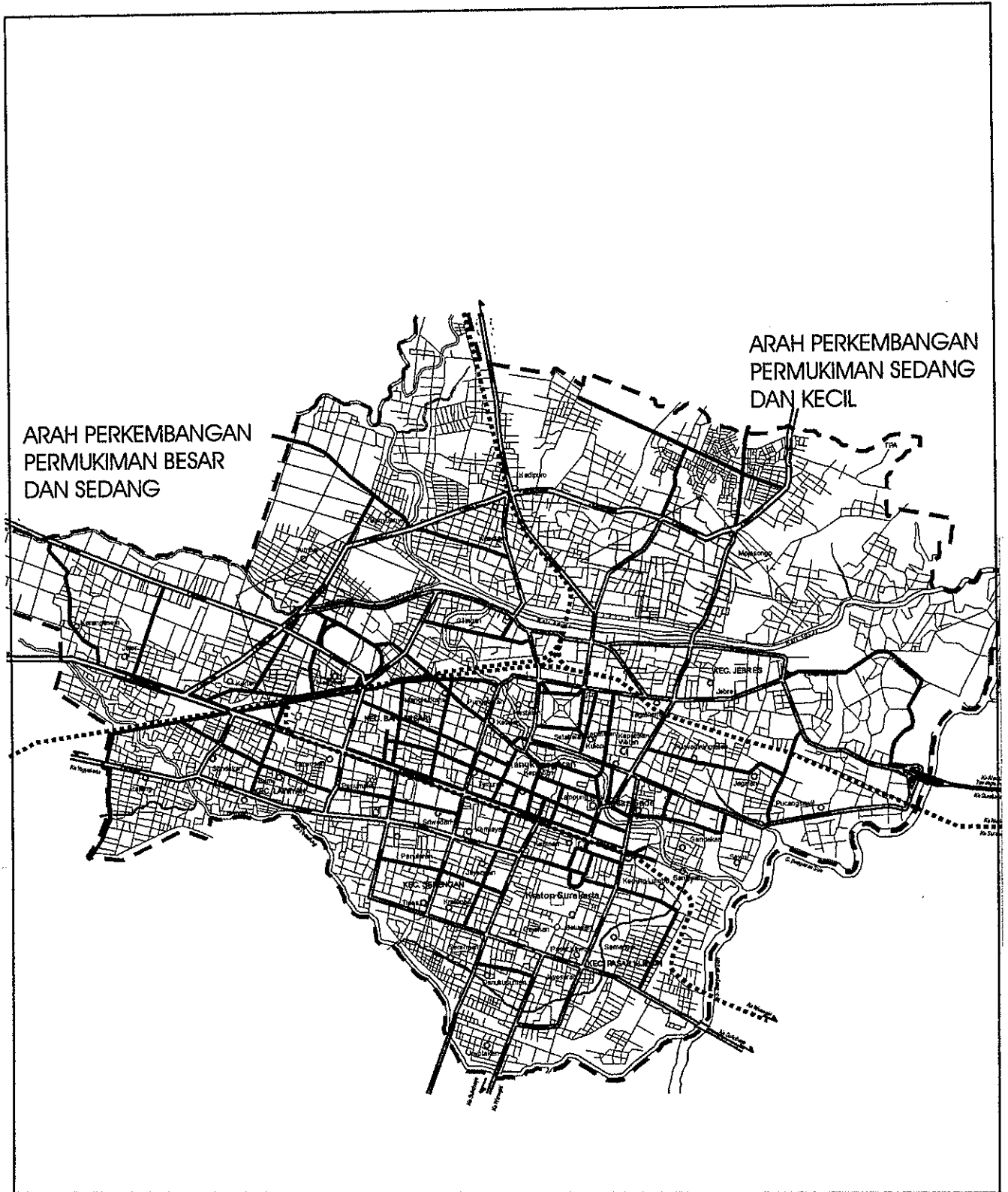
#### **4.1. Gambaran Umum Kota Surakarta**

##### **4.1.1. Arah dan Perkembangan**

Permasalahan perumahan secara umum di negara sedang berkembang khususnya Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua masalah yaitu yang diakibatkan adanya defisit penyediaan dibandingkan dengan permintaan di lingkungan perkotaan dan yang diakibatkan dari semakin kurang dan mahal nya lahan untuk permukiman di perkotaan sehingga menimbulkan lingkungan permukiman yang kumuh. Dasar dari permasalahan tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi berlangsungnya kegiatan sehari-hari mereka seperti air bersih, drainase, MCK dan sebagainya.


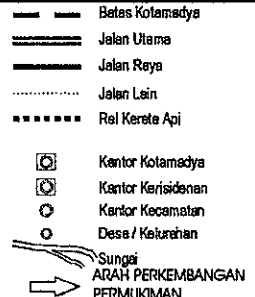


Kawasan perumahan di Kota Surakarta hampir menyebar merata di seluruh kota. Di kawasan Laweyan terdapat perumahan dengan kapling-kapling besar yang mempunyai sejarah dalam perbatikan di kota. Kawasan perumahan besar lain terdapat di Banjarsari dan daerah Balapan. Daerah golongan menengah dijumpai tersebar di seluruh kota. Sedangkan daerah perumahan golongan rendah dan kepadatan tinggi dijumpai di daerah Semanggi, Joyosuran, Danukusuman, Pucangsawit, Nusukan dan Mojosongo. Perumahan dengan intensitas tinggi terdapat di sepanjang Bengawan Solo.

Pada saat ini daerah perumahan berkembang ke arah Utara, yaitu ke Kelurahan Sumber Banyuanyar, Jajar dan Karangasem untuk jenis perumahan tipe sedang dan besar, sedangkan perumahan dengan tipe kecil berkembang dan dikembangkan di daerah Mojosongo dan Kadipiro seperti terlihat pada Gambar 4.1.



ARAH PERKEMBANGAN  
PERMUKIMAN BESAR  
DAN SEDANG

ARAH PERKEMBANGAN  
PERMUKIMAN SEDANG  
DAN KECIL

	TESIS	PETA	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN MILYAR DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI MULOJOHGD</p>	<p>PETA ARAH PERKEMBANGAN PERMUKIMAN DI SURAKARTA</p>	<p>  </p>	<p>4.1.</p> <p>SKALA</p> 	 <p>SUMBER : BAPPEDA KOTA SURAKARTA 2003</p>

Sama dengan kota-kota lain di Indonesia perkembangan perumahan di Surakarta ditandai pula dengan masih terdapatnya lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di 5 kecamatan. Dari hasil studi yang pernah dilakukan di Surakarta terdapat 9 lokasi kampung dengan kondisi lingkungan buruk dan populasi yang padat (*slum area*). Masyarakat di daerah tersebut pada umumnya termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan hidup dalam kondisi miskin serta kekurangan sarana prasarana lingkungan yang memadai. Penilaian terhadap lokasi permukiman didasarkan pada seperangkat kriteria seperti kualitas bangunan, kepadatan penduduk, penghasilan rumah tangga, sarana air bersih, sarana drainase, prasarana jalan, kepemilikan lahan dan aspek kemasyarakatan seperti organisasi masyarakat dan struktur sosial. Berdasarkan pada kriteria tersebut di atas maka ditentukan adanya prioritas lokasi untuk diperbaiki kualitas lingkungannya yaitu Nusukan, Kadipiro, Mojosongo, Semanggi, Gajahan, Joyontakan, Serengan, Danukusuman dan Pajang.

#### **4.1.2. Kebijakan Umum**

##### **4.1.2.1. Program Perbaikan Lingkungan Permukiman di Surakarta.**

Di Surakarta program perbaikan lingkungan permukiman telah dimulai pada tahun 1983/1984 dengan pelaksanaan program perbaikan kampung melalui Urban Development Project V, yang dilaksanakan pada 28 kampung seluas 400 ha, Program ini menggunakan bantuan dana Bank Dunia (IBRD) bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di tahun 1983/1984 sampai dengan tahun 1987/1988. Pada saat itu program perbaikan lingkungan yang dilaksanakan hanya mempertimbangkan mengenai peningkatan infrastruktur fisik saja sebagai upaya untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan di kampung-kampung berkepadatan tinggi dan golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Program perbaikan lingkungan yang ada belum menyentuh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Kemudian program perbaikan lingkungan permukiman kumuh dilanjutkan dengan program KIP tahun 1991 sampai tahun 1993 melalui program KIP tahap III yang meliputi 9 kampung seluas 160 ha. Selanjutnya pada bulan September 1993 Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pekerjaan Umum, Dirjend Cipta Karya Direktorat Bina Program menetapkan program yang dikenal dengan SSUDP (*Semarang Surakarta Urban Development Program*) yang menetapkan Surakarta sebagai bagian dari pembangunan perkotaan terpadu bersama dengan kota Semarang.

Program perbaikan lingkungan kumuh kembali dilaksanakan melalui program perbaikan kampung (KIP). Sebagai program yang merupakan bagian dari SSUDP kota Surakarta. Lokasi program perbaikan kampung SSUDP terletak di daerah yang telah distudi dan berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Cipta Karya. Lokasi yang dimaksud termasuk lokasi yang pernah mendapat program perbaikan kampung sebelumnya dan lokasi kampung yang belum pernah mendapatkan program perbaikan kampung.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo. Pada program peremajaan SSUDP ini tidak saja memperhatikan perbaikan kualitas fisik lingkungan saja, namun mulai memperhatikan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat. Program ini telah mulai menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program perbaikan lingkungan permukiman. Masyarakat mulai dilibatkan dalam setiap tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penggunaan dan pemeliharaan.

Untuk tujuan peningkatan kualitas fisik dan sosial ekonomi tersebut maka pada program perbaikan kampung SSUDP menggunakan strategi berdasarkan tiga unsur penting perbaikan lingkungan yang disebut dengan TRIBINA yaitu bina lingkungan, manusia dan usaha.

#### 4.1.2.2. Kebijakan Pelibatan Peran Serta Masyarakat

Sebenarnya hampir semua program pembangunan yang ada di Kota Surakarta telah mensyaratkan adanya peran serta masyarakat tetapi tidak menjelaskan secara lebih rinci dalam hal apa peran serta masyarakat dibutuhkan. Pada umumnya program pembangunan khususnya pembangunan fisik seperti proyek pembangunan prasarana jalan, peran serta masyarakat masih diartikan sebagai penerimaan masyarakat terhadap proyek tersebut yang pada tahap perencanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah atau Konsultan dan pada tahap pelaksanaannya dilakukan oleh Kontraktor Pembangun.

Pada beberapa program pembangunan yang berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi lingkungan permukiman seperti program KIP, masyarakat telah diajak terlibat dalam beberapa bagian tahapan kegiatan terutama dalam persiapan pelaksanaan. Di samping itu terdapat kebijakan pembangunan yang hanya menyediakan material bangunan berupa semen atau aspal sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat sendiri melalui Kelurahan yang ada. Bantuan material diberikan tiap tahun berdasarkan proposal permintaan warga melalui Kelurahan yang mencantumkan berapa dana yang telah disiapkan oleh masyarakat sebagai wujud keswadayaan. Dengan terbatasnya bantuan maka pendistribusiannya untuk masing-masing Kelurahan jumlahnya terbatas dan diberikan hanya pada kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan prioritas saja.

Seiring dengan semakin terbatasnya pendanaan oleh Pemerintah Kota Surakarta maka pada saat ini keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat dibutuhkan. Masyarakat telah diminta membuat usulan program dimulai dari tingkat Kelurahan atau disebut Musyawarah Kelurahan, dilanjutkan di tingkat Kecamatan yang disebut Musyawarah Kecamatan dan terakhir Musyawarah Pembangunan Kota. Dengan kebijakan ini diharapkan tercipta kebersamaan dalam pembangunan kota yang tidak hanya menjadi tanggungjawab dan

beban Pemerintah kota tetapi juga masyarakat luas di Kota Surakarta. Selain itu diharapkan bahwa program pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang ada.

Pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut, usulan pembangunan yang diberikan masyarakat sebelum direalisasikan diolah dan dibatasi prioritasnya di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

## **4.2. Gambaran Umum Kelurahan Mojosongo**

### **4.2.1. Kondisi Fisik Wilayah**

Kelurahan Mojosongo secara administrasi termasuk dalam wilayah kecamatan Jebres Kota Surakarta, memiliki luas wilayah 532,9 ha dan merupakan kelurahan dengan wilayah terluas di Surakarta terdiri dari 31 RW dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
- Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jebres
- Barat berbatasan dengan Kelurahan Kadipiro

Topografi wilayah kelurahan Mojosongo adalah agak bergelombang dengan kemiringan 15%. Berada di bagian Utara Kali Anyar dengan ketinggian rata-rata 135 m dpl dan terbagi dalam 31 RW serta 149 RT. Kondisi topografi ini ditambah tanah yang kurang stabil di beberapa tempat merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan pembangunan prasarana.

Penggunaan tanah di kelurahan Mojosongo sebagian besar digunakan untuk permukiman, sedangkan lahan di sepanjang jalan-jalan utama berfungsi untuk lahan campuran perumahan dan perdagangan. Permukiman yang ada memiliki kualitas bangunan yang bervariasi dari bangunan permanen, semi permanen dan temporer. Namun secara umum

bangunan semi permanen lebih mendominasi, terutama di bagian Selatan yang berdekatan dengan pusat kota dan berada di bantaran sungai Kali Anyar.

Status lahan di kelurahan Mojosoongo selain status hak milik dan hak guna bangunan banyak terdapat tanah-tanah negara yang mempunyai akses yang baik ke pusat-pusat perekonomian, namun dengan kondisi lahan yang kurang memenuhi syarat seperti kelerengan yang terlalu tajam, di bantaran sungai dan sebagainya.

#### **4.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi**

Jumlah penduduk kelurahan Mojosoongo pada saat ini adalah 40.203 jiwa yang terdiri dari 10.743 KK dengan kepadatan penduduk 7.544/km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk kelurahan Mojosoongo adalah 1,66% lebih tinggi di bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk kota Surakarta yang sebesar 0,77%. Migrasi penduduk yang pindah selama tahun 2000 sebanyak 355 dan jumlah penduduk yang datang sebanyak 1.061 dan merupakan tertinggi di Surakarta. Tingginya jumlah kedatangan penduduk untuk tinggal menggambarkan tingginya daya tarik Kelurahan Mojosoongo yang didukung dengan lahan relatif luas, banyaknya perumahan yang dibangun pada kawasan tersebut dan lokasinya yang sangat mudah dijangkau dari pusat kota.

Mata pencaharian penduduk kelurahan Mojosoongo sebagian besar adalah buruh industri, buruh bangunan, angkutan dan lain-lain yang terkonsentrasi pada wilayah bagian Selatan sampai dengan Bantaran Kali Anyar. Selain itu terdapat pula penduduk yang bermatapencaharian sebagai pegawai swasta maupun pegawai negeri yang tersebar di seluruh kawasan tetapi terbanyak di kawasan Perumnas Mojosoongo.

#### 4.2.3. Potensi dan Masalah

Kelurahan Mojosongo merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki akses langsung menuju pusat Kota Surakarta dari arah Utara. Keterbatasan lahan yang ada di Kota Surakarta di satu sisi dan masih tersedianya lahan yang relatif luas di Mojosongo di sisi lain merupakan awal dari perkembangan Kelurahan Mojosongo. Secara keseluruhan perkembangan di wilayah Mojosongo akan mempengaruhi wajah Kota Surakarta.

Dengan dibangunnya jalur ring road Utara membuat kawasan Mojosongo menjadi semakin penting. Akses jalur antar kota dari Surakarta ke kota lain telah melewati kawasan ini bahkan pada dua jalur yaitu pada bagian Utara dan Selatan. Akses yang tinggi tersebut telah mendorong tumbuhnya industri sedang maupun kecil yang tersebar merata di sekitar Jalan Brigjen Katamsa dan Jalan Pemuda.

Dewasa ini Mojosongo telah ditetapkan pula menjadi kawasan pendukung/ buffer zone Kota Surakarta yang merupakan kawasan penyeimbang aktifitas kawasan lainnya. Penurunan kualitas lingkungan pada kawasan ini akan berpengaruh pada kondisi Kota pada umumnya.

Permasalahan yang ada di Mojosongo adalah tingginya migrasi kedatangan penduduk. Jumlah penduduk yang datang di Mojosongo ini merupakan tertinggi di Kota Surakarta. Penduduk yang datang ini berasal dari berbagai macam golongan tetapi sebagian besar merupakan golongan menengah ke bawah yang tinggal pada kampung-kampung yang ada khususnya di Kelurahan bagian Selatan dan sebagian lagi merupakan golongan menengah ke atas yang tinggal pada kawasan-kawasan perumahan. Jumlah ini masih merupakan angka yang tercatat di Kantor Kelurahan dan belum termasuk pada pendatang yang tinggal di permukiman-permukiman kumuh yang mulai berkembang kembali khususnya di Bantaran Kali Anyar.

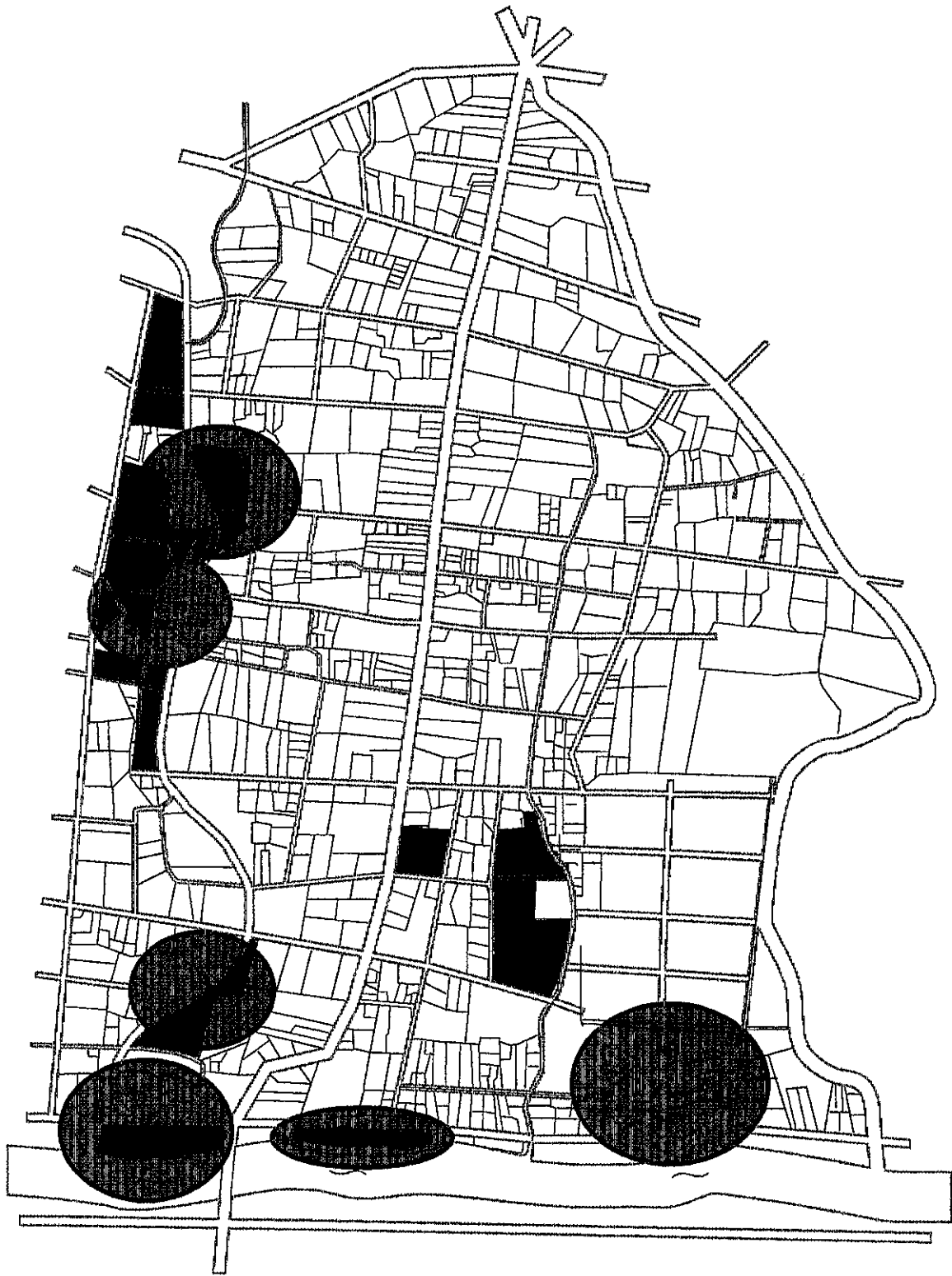
Permasalahan menonjol lain yang timbul di Mojosongo adalah permasalahan penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Tumbuhnya permukiman-permukiman baru ternyata belum dapat diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan ini selain disebabkan karena terbatasnya kemampuan Pemerintah juga disebabkan karena kondisi topografi wilayah yang berkontur, wilayah yang luas dan memiliki ketinggian lebih tinggi di bandingkan wilayah lain. Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana baru di satu sisi memang sangat dibutuhkan tetapi di sisi lain telah berdampak pada berkurangnya perhatian terhadap pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang telah dibangun.


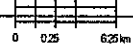

Mengenai sumberdaya manusia juga menjadi permasalahan utama di Mojosongo karena secara umum kondisi masyarakatnya merupakan yang termiskin diantara Kelurahan lain di Surakarta. Kebanyakan masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki pendidikan serta penghasilan yang rendah merupakan kendala pembangunan khususnya pada pengembangan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

### **4.3. Gambaran Umum Kawasan Peremajaan di Mojosongo**

#### **4.3.1. Kondisi Wilayah Sebelum Peremajaan**

Mojosongo adalah sebuah Kelurahan yang terletak di bagian Timur Laut Kota Surakarta. Luas wilayah administratif Kelurahan termasuk terbesar di Surakarta sekitar 532 hektar. Letak strategis dengan aksesibilitas yang cukup tinggi meningkatkan nilai kawasan ini dan pada gilirannya semakin menarik bagi penduduk untuk tinggal. Tetapi sebagian besar pendatang tersebut berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang mulai terpinggirkan dari pusat kota atau pendatang dari luar kota yang mencari keberuntungan di kota. Kondisi inilah yang mendorong terbentuknya permukiman kumuh seperti Gambar 4.2.



	TESIS	JUDUL GAMBAR	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI MOJOSONGO</p>	<p>PETA KONDISI PEMUKIMAN MOJOSONGO SEBELUM PEREMAJAAN</p>	<p>■ Pemukiman padat ● Daerah kumuh</p>	<p>4.2</p> <p>SKALA</p> 	<p>U</p>  <p>SUMBER : WASTUWIDYAWAN 1996</p>


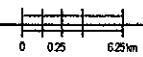

Mengenai karakteristik masyarakat, pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor informal terdiri dari buruh, tukang becak, perajin sangkar burung, pembuat tahu tempe, bekerja pada peternakan babi dan lain-lain. Kondisi sosial ekonomi termasuk dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dimana sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang terbatas dan pendidikan yang rendah.

Kondisi sosial kemasyarakatan yang ada tidak jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonominya. Perilaku warga terhadap lingkungannya hampir sama dengan perilaku masyarakat pada permukiman kumuh lain. Tidak adanya tempat sampah yang memadai mendorong warga membuang sampah di saluran air. Tidak adanya fasilitas MCK yang layak di lingkungan mereka apalagi di dalam rumah juga mendorong mereka untuk membuang hajat di saluran ataupun pekarangan.

Terbatasnya kemampuan para pendatang tersebut membuat mereka nekat untuk menempati tempat tinggal sementara sebelum mereka memperoleh tempat tinggal tetap, yaitu di tanah-tanah kosong bantaran sungai Kali Anyar. Para pendatang tersebut membangun gubug-gubug dari bahan-bahan yang tidak tahan lama dan dari bahan bangunan bekas meskipun adapula yang membangun secara permanen dari tembok batubata.

Kondisi lingkungan permukiman di sekitar bantaran tersebut juga tidak jauh berbeda. Walaupun lahan yang ada relatif lebih luas tetapi perkembangan selanjutnya permukiman tersebut menjadi permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi yang buruk. Banyak bangunan semi permanen dan non permanen yang sebagian besar berlokasi di RW I, RW II, RW III, RT 02 RW IV serta RW VI sementara bangunan permanen terkonsentrasi di sepanjang jalan Brigjen Katamsa dan jalan-jalan kampung yang mempunyai dimensi agak besar, seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.



	TESIS	PETA	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DI MOJOSOONG</p>	<p>PETA RUMAH NON PERMANEN SEBELUM PEREMAJAAN</p>	<p>■ BANGUNAN NON PERMANEN</p>	<p>4.3.</p> <hr/> <p>SKALA</p> 	 <p>SUMBER : WASTUWIDYAWAN 1996</p>

### 4.3.2. Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosoongo

#### 4.3.2.1. Pendekatan Awal Pelaksanaan Peremajaan

Pemahaman masyarakat umum terhadap proyek-proyek pembangunan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Masyarakat masih menganggap bahwa program pembangunan merupakan paket Pemerintah yang harus mereka terima. Secara umum warga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Rendahnya program pembangunan swadaya merupakan salah satu contoh rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagai konsekuensinya banyak proyek pembangunan yang tidak terawat setelah selesai dikerjakan. Pemerintah masih harus mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan proyek yang selesai dikerjakan.

Salah satu penyebab utama suatu paket pembangunan tidak terawat pasca proyek diduga karena warga masyarakat tidak atau kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat kurang mempunyai rasa memiliki. Semestinya, proyek pembangunan ditetapkan sebagai stimulan untuk mendorong munculnya partisipasi warga masyarakat. Hanya dengan cara demikian akan diperoleh jaminan perawatan dari warga sekitar terhadap proyek yang bersangkutan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka perumusan *Action Plan* dan *Final Engineering Design* untuk pelaksanaan peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo diikuti dengan upaya penyiapan warga agar mereka mampu mengambil manfaat secara maksimal atas pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Pelaksanaan peremajaan secara fisik dan upaya peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dilakukan secara simultan. Oleh karena itu upaya pelaksanaan fisik akan diikuti dengan pengembangan kelembagaan masyarakat yang ada. Pengembangan kelembagaan yang dimaksudkan disini adalah upaya mengorganisasikan kegiatan ekonomi dan fisik warga

masyarakat ke dalam suatu wadah yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam hal ini upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dilaksanakan dengan hati-hati supaya tidak dicurigai datang dari atas. Jadi pendekatan dibuat sedemikian rupa sehingga awal pembangunan seolah-olah datang dari permintaan warga kepada Pemerintah.

Setelah dianggap layak untuk dilakukan peremajaan karena memenuhi syarat sebagai lingkungan permukiman yang tidak harmonis diputuskan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Pada awalnya yaitu tahap sosialisasi, reaksi dari sebagian warga adalah kecurigaan dan ketakutan terhadap pendekatan yang dilakukan oleh fasilitator. Ketakutan tersebut diikuti dengan keengganan warga untuk didekati. Dari beberapa tokoh yang dapat menerima sosialisasi yang dilakukan fasilitator, masyarakat pada akhirnya mau menerima keberadaan fasilitator melalui proses rembug warga yang cukup lama yaitu sekitar 1 tahun. Selanjutnya pendekatan oleh tim pendamping baik dari Pemerintah Kota maupun Konsultan dilakukan dengan cara mereka turut tinggal dan menetap bersama dengan warga. Untuk memahami kondisi dan situasi serta menyerap keinginan-keinginan warga, sehingga kemudian warga merasa dipedulikan, dipahami aspirasinya, dan akhirnya dekat dengan mereka.

Kegiatan selanjutnya setelah masyarakat mau menerima para fasilitator adalah kegiatan untuk memperoleh data sekunder melalui aparat Kelurahan dan Kecamatan. Juga sebagai jalan untuk memperoleh data primer dari warga sasaran. Bersama dengan konsultan pendamping, para tokoh warga mengajak seluruh masyarakat untuk mengadakan rembug desa yang dimulai dengan rembug warga.

#### 4.3.2.2. Proses Rembug Warga

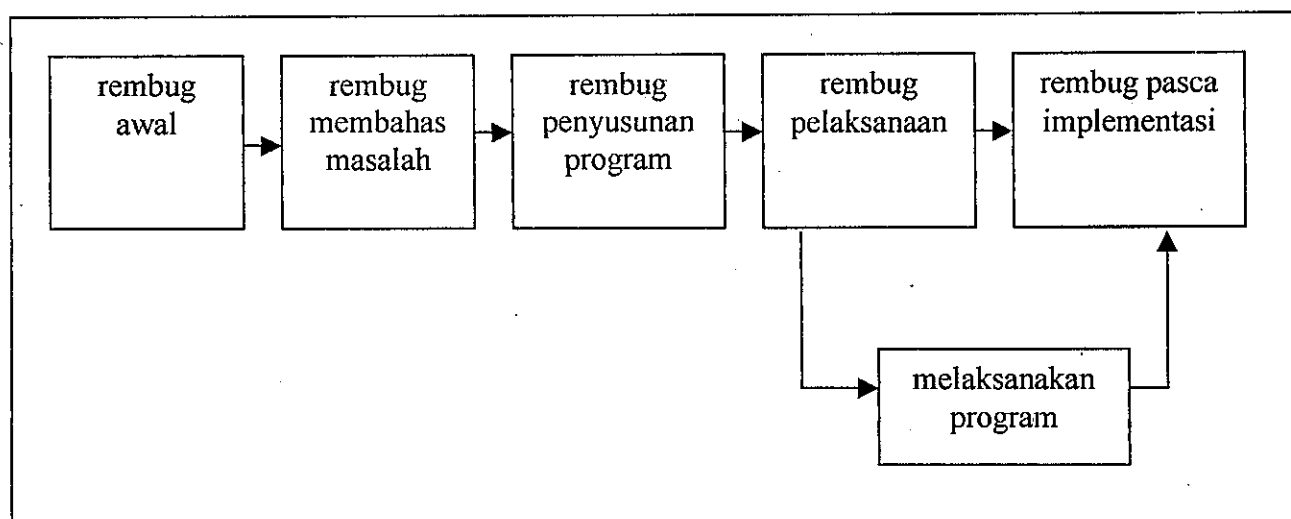
Proses rembug warga dimulai dari rembug awal. Rembug awal merupakan rembug tingkat RT yang acaranya adalah memperkenalkan program kepada masyarakat, yaitu tentang latar belakang, proses umum, prinsip-prinsipnya dan teknis pelaksanaannya secara garis besar. Rembug awal dilaksanakan setelah ada pertemuan tingkat Kelurahan dan Tingkat RW.

Setelah rembug awal dilakukan rembug aspirasi yang pada intinya meliputi kegiatan identifikasi masalah, potensi, ide dan kebutuhan masyarakat serta pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.

Kelompok Swadaya Masyarakat ini dikembangkan dalam upaya mendorong warga masyarakat agar secara sadar mau mengorganisasikan semua aktifitas mereka sehingga hasil yang mereka hasilkan benar-benar merupakan produk sebuah kegiatan yang terencana secara sistematis. Ada dua jenis KSM yang dikembangkan yaitu KSM bisnis dan KSM pembangunan. KSM bisnis merupakan pengembangan dari semua kegiatan sosial ekonomi yang ada di kawasan, sedangkan KSM pembangunan merupakan pengembangan Panitia Pembangunan Lokal yang menjadi sebuah lembaga yang mampu mewadahi dan mengorganisir kegiatan pembangunan selanjutnya terutama pasca proyek. KSM pembangunan ini ada di masing-masing RW.

Dengan selesainya tahap identifikasi dan kebutuhan masyarakat maka dilakukan rembug penyusunan proposal yang merupakan rembug tentang usaha dan cara mewujudkan potensi dan ide, memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah dilakukan rembug penyusunan proposal diadakan rembug implementasi yang merupakan rembug dalam tahap realisasi pembangunan dan realisasi kerjasama dengan pelaku-pelaku pembangunan lainnya. Dalam pelaksanaan ini kelompok yang ada di kawasan tertentu menyusun dan mengatur pengadaan material, pengaturan tenaga atau gotong-royong.

Sedangkan yang memerlukan bantuan pihak lain akan disusun bersama pihak yang terkait tersebut. Pada akhirnya diadakan rebug pasca implementasi yang merupakan rebug setelah pembangunan atau selama kerjasama dengan pihak-pihak lain berlangsung. Mengembangkan tindak lanjut yang menyangkut penatan fisik dan tindak lanjut organisasi yang bertanggungjawab.



GAMBAR 4.4.  
 DIAGRAM PROSES UMUM REMBUG WARGA  
 Sumber : Wastuwidyawan, 1996

#### 4.3.2.3. Pelaksanaan Konstruksi

Secara umum maka untuk kegiatan proyek peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo terdiri dari beberapa tahapan dimana masing-masing tahapan terdapat prioritas pelaku yang terdiri dari Tim Pendamping, Tim UNS, Panitia Pembangunan yang dibentuk dari warga dan warga masyarakat sendiri. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel IV.1.

TABEL IV.1  
TAHAPAN KEGIATAN PEREMAJAAN LINGKUNGAN DI MOJOSONGO

Tahap	Kegiatan dan Penjelasan	Pelaku
I	Pembuatan peta eksisting kondisi rumah saat ini.	Tim UNS, Panitia Pembangunan
II	Pembuatan peta penataan dengan konsep utama pemberian jalan di tepi kali Kedung Jumbleng dan Kali Anyar, rumah menghadap ke kali dan penyediaan lahan untuk saran umum.	Tim UNS
III	Panitia mendiskusikan konsep Peta Penataan untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan perubahan.	Tim UNS, Panitia Pembangunan
IV	Perbaikan konsep Peta Penataan	Tim UNS
V	Musyawarah warga tentang Konsep Peta Penataan untuk memberikan masukan-masukan	Tim Pendamping, Panitia Pembangunan, warga
VI	Perbaikan Peta Penataan berdasarkan masukan/aspirasi warga sehingga terwujudlah Peta Penataan Final	Tim UNS
VII	Pertemuan warga untuk memberikan persetujuan Peta Penataan Final dengan memberikan tanda tangan warga serta persetujuan pematokan lahan.	Tim Pendamping, Panitia Pembangunan, warga
VIII	Pematokan lahan	Panitia Pembangunan, warga, Tim Pendamping
IX	Penyusunan permohonan sertifikasi tanah	Panitian Pembangunan
X	Penyampaian permohonan sertifikasi tanah	Panitia Pembangunan

Sumber : Wastuwidyawan, 1996

Peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo ini dapat pula dikelompokkan ke dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana secara umum, kegiatan *redevelopment* dan kegiatan *resettlement*. Untuk pembangunan prasarana secara umum dilakukan tanpa merubah karakteristik kawasan yang sudah ada. Kegiatan ini dilaksanakan di hampir seluruh kawasan peremajaan yang meliputi perbaikan dan pembuatan saluran drainase, jalan lingkungan, penerangan, pembuatan fasilitas sosial dan pembuatan tempat sampah.

### 1. Pelaksanaan *Redevelopment*

Kegiatan *redevelopment* dilakukan di Bantaran Barat Kali Anyar yang dikembangkan dengan memakai prinsip *community based urban redevelopment*. Dari hasil rembug warga telah ditampung beberapa masalah yang menjadi dasar perencanaan partisipatif kegiatan *redevelopment* RW I adalah :

Dasar Perencanaan Non Fisik :

- Keinginan untuk mensertifikatkan tanah yang mereka tempati sekarang ini.

- Keinginan untuk mempunyai lingkungan permukiman yang tertata, bersih dan aman.
- Permukiman yang dapat mendukung kegiatan ekonomi warga.
- Telah terbentuknya KSM yang nantinya akan berfungsi sebagai panitia pembangunan lokal yang mewakili masyarakat dalam menyelesaikan masalah sertifikasi dan pengadaan pembangunan rumah.
- Keinginan untuk mensukseskan program Pemerintah yaitu antara lain : Program P2BPK, Solo Berseri, Prokasih dll.

#### Dasar Perencanaan Fisik :

- Adanya ijin dari Pemda Surakarta kepada warga untuk memakai lahan bantaran sungai sebelah Barat Jembatan Mojosoongo untuk keperluan permukiman dan perekonomian warga. Dengan persyaratan warga harus mematu 5 sanggup (Surat Edaran Pemda Kodya Dati II Surakarta No. 050/262 —VII/1997).
- Dukungan dari Proyek Bengawan Solo tentang persyaratan penggunaan lahan tersebut untuk permukiman pada lokasi tersebut yaitu menaikkan level muka tanah setinggi 1 meter, mengikuti garis sempadan sungai selebar 10 meter dan permukiman tidak mengganggu konstruksi jembatan.
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.
- Adanya kegiatan pendukung pengadaan sarana dan prasarana umum yang memadai melalui Proyek Fisik.

Dengan kedua dasar perencanaan partisipatif tersebut maka kekhawatiran utama dari warga yaitu pengambilalihan lokasi rumahnya oleh Pemerintah untuk kegiatan keamanan sungai sudah teratasi.

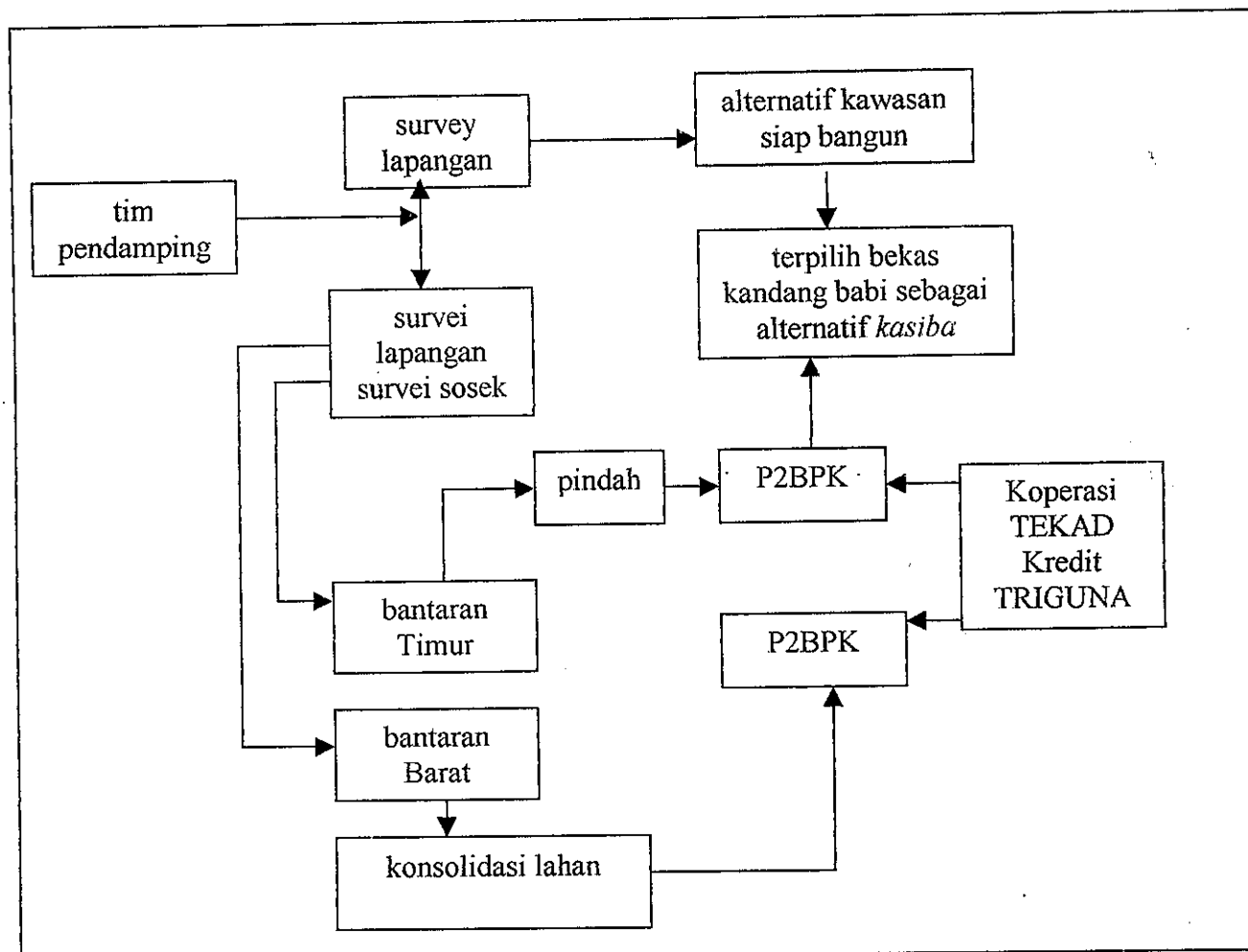
Pelaksanaan pembangunan perumahan di lokasi tersebut dilaksanakan serempak dan menggunakan pola P2BPK yang pendanaannya melalui kredit TRIGUNA dari bank BTN.

Rumah yang dibangun sebanyak 61 unit tipe 35/35 dan ruko 10 unit ukuran 15 m<sup>2</sup> serta dibangun fasilitas sosial dan ekonomi sebagai penunjang kegiatan warga. Besarnya beban pembangunan rumah baru yang harus ditanggung warga sebesar Rp 4.900.000,- melalui kredit dari bank yang dicicil Rp 69.000,- sebulan selama 15 tahun.

Pelaksanaan pembangunan rumah dan konstruksi berat lainnya dilakukan oleh kontraktor sedangkan warga terlibat dalam pembuatan jalan lingkungan, pemasangan lampu taman dan kegiatan lain yang sifatnya tidak membutuhkan biaya besar dan mudah dikerjakan. Selama pelaksanaan ini maka rumah warga yang ada dibongkar dan untuk sementara warga tinggal dalam bedeng-bedeng yang telah disediakan.

## **2. Pelaksanaan *Resettlement***

Urban *resettlement* juga merupakan bagian dari peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo. Konsep yang ingin dikembangkan adalah pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat atau yang memberikan peluang adanya partisipasi masyarakat. *Resettlement* di kawasan peremajaan merupakan internal *resettlement* artinya pemindahan masih dilakukan dalam kawasan itu sendiri. Dari hasil rembuk warga telah ditampung beberapa masalah yang menjadi dasar perencanaan partisipatif kegiatan *resettlement* RW VII yang intinya hampir sama dengan kegiatan *redevelopment*. Mengenai tahapan proses kegiatan *redevelopment* dan *resettlement* dapat dilihat di Gambar 4.5.



GAMBAR 4.5.

## DIAGRAM PROSES PENATAAN TANAH BANTARAN BARAT DAN TIMUR KALI ANYAR

Sumber : Wastuwidyawan, 1995

Melalui beberapa dialog dalam proses identifikasi masalah dan penerapan pendekatan "*Ajrih dan Asih*" disadari oleh warga yang masih termasuk RT 01 dan 02 RW II bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah ilegal untuk menjadi daerah hunian. Dikarenakan tidak ada alternatif lain maka mereka nekat tinggal di lokasi tersebut.

Alternatif lokasi *resettlement* adalah tanah negara yang disewa bekas peternakan babi. Tim Pendamping secara resmi mengajukan permohonan untuk menggunakan lokasi tersebut sebagai alternatif relokasi warga bantaran Timur. Rumah yang dibangun sebanyak 45 unit seluas 21m<sup>2</sup> dengan luas tanah 54 m<sup>2</sup>. Harga rumah yang dibangun Rp 4.900.000,- dimana warga membayar dengan cara cicilan per bulan selama 15 tahun. Selain itu dibangun jalan lingkungan selebar 3-4 meter dari paving block dan drainase dari buis dia 30-50 cm.



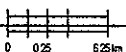
Keterlibatan warga dalam pelaksanaan pembangunan rumah hampir sama dengan warga di bantaran Barat yang terkena program *redevelopment*. Pelaksanaan pembangunan rumah dan konstruksi berat lainnya dilakukan oleh kontraktor sedangkan warga terlibat dalam pembuatan jalan lingkungan, pemasangan lampu taman dan kegiatan lain yang sifatnya tidak membutuhkan biaya besar dan mudah dikerjakan. Dalam hal ini warga pindah ke lokasi baru setelah konstruksi selesai dan telah membongkar rumahnya sendiri.

### **3. Pelaksanaan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan**

Sama seperti pelaksanaan *redevelopment* dan *resettlement*, setelah rebug warga maka diperoleh usulan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan yang harus dibenahi. Dalam kegiatan rebug warga ini keterlibatan warga diwakili oleh Panitia Pembangunan Lokal yang ada di tiap-tiap RW.

Setelah segala persiapan dan perencanaan selesai maka pelaksanaan pembangunan dilakukan secara serempak dan gotong-royong. Untuk rumah warga yang berada di tepi Kali Kedung Jumbleng diwajibkan untuk menghadapkan rumahnya ke kali. Pembuatan tanggul Kali Anyar, normalisasi Kedung Jumbleng dan pekerjaan lain yang rata-rata membutuhkan biaya besar dan teknik yang memadai dilaksanakan oleh kontraktor. Sedangkan pada pengerjaan jalan lingkungan, maupun saluran pelaksanaannya didominasi oleh kerja gotongroyong warga. Khusus mengenai pekerjaan pavingisasi jalan lingkungan dilakukan dengan menggunakan bahan hasil pembuatan paving dan lock brick yang ada dalam kawasan peremajaan. Selama proses pelaksanaan tersebut maka Panitia Pembangunan Lokal yang terbentuk selain bertugas mengkoordinasikan pekerjaan juga diwajibkan melakukan pengawasan dan kontrol untuk meminimalkan adanya penyimpangan. Mengenai lokasi yang diperbaiki dan dibangun dalam peremajaan dapat dilihat di Gambar 4.6.



	TESIS	PETA	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI MOJOSONGO</p>	<p>PETA PELAKSANAAN PEREMAJAAN</p>	<p>— Pembangunan saluran Pembangunan jalan ■ Pembuatan TPS ○ Daerah yang di redevelopment ▨ Daerah yang di resettlement</p>	<p>4.6.</p>	
				<p>SKALA</p> 	<p>SUMBER : WASTUMDYAWAN 1996</p>

### 4.3.3. Kondisi Wilayah Setelah Peremajaan

#### 4.3.3.1. Kondisi Fisik Wilayah

Peruntukan bangunan di kawasan yang telah diremajakan terdiri dari hunian, sosial, perekonomian dan campuran. Sebagian besar bangunan diperuntukkan sebagai hunian dan yang lain sdifungsikan untuk fasilitas sosial dan perekonomian. Secara lebih rinci guna lahan untuk permukiman dan pekarangan  $\pm 35\%$ , perdagangan  $\pm 5\%$ , kuburan  $\pm 15\%$ , tegalan  $\pm 15\%$ , tanah kosong  $\pm 5\%$  dan lainnya (jalan, saluran dan lainnya) sebesar  $\pm 25\%$ .

Mengenai kondisi prasarana jalan pada umumnya dalam kondisi yang baik hanya dibeberapa tempat mengalami kerusakan. Fungsi jalan adalah sebagai prasarana penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain baik di dalam maupun di luar kawasan. Jalan yang ada di kawasan pada umumnya berkonstruksi aspal, beton, paving dan sebagian jalan tanah. Jalan aspal yang sangat vital adalah jalan Brigjen Katamsa yang membujur Utara ke Selatan dengan ROW 15 m. Keberadaan jalan ini sangat penting karena menghubungkan wilayah Mojosongo bagian Utara dan yang lainnya dengan pusat kota Surakarta. Jalan aspal yang lain seperti jalan Mr. Sartono, jalan Tentara G. Pelajar dan jalan Gunung Agung memiliki lebar 5-6 m dengan kondisi yang cukup baik. Tetapi untuk jalan aspal lain yang berada pada tengah kawasan kondisinya mulai banyak yang retak dan berlubang-lubang.

Jalan paving dan jalan beton hampir terdapat di sebagian besar kawasan yang telah diremajakan. Secara umum jalan-jalan ini memiliki lebar 1,5-3m dan masih dalam kondisi yang cukup baik, tetapi pada lokasi tertentu terdapat pula jalan paving dan beton dengan kondisi yang sudah rusak. Sebagian besar jalan-jalan tersebut merupakan hasil dari kegiatan peremajaan dan program Pemerintah lainnya tetapi sebagian lagi merupakan hasil swadaya masyarakat. Untuk jalan tanah di kawasan peremajaan hanya sebagian kecil saja. Jalan ini

menghubungkan wilayah permukiman dengan kebun/ladang atau ke wilayah lain yang lokasinya jauh dari permukiman.

Dalam hal prasarana saluran drainase maka fungsi utamanya dalam kawasan adalah untuk mengalirkan bair, baik air buangan rumah tangga maupun air hujan. Mengingat fungsinya, maka kondisi saluran akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.








Saluran utama di kawasan Mojosongo adalah Kali Anyar yang bermuara di Bengawan Solo. Kali Anyar merupakan muara dari saluran-saluran drainase sekunder yang mengalir di dalam kawasan dan saluran-saluran lain di luar kawasan. Salah satu saluran sekunder di kawasan adalah Kedung Jumbleng dan Kali "Tusirah". Saluran ini mengalir dari Utara ke Selatan.

Kondisi kali Kedung Jumbleng pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada saat peremajaan lingkungan telah dibangun *retaining wall*, pada saat ini bangunan penahan tersebut banyak yang retak dan bahkan ada sebagian yang rubuh sehingga membahayakan rumah maupun jalan di samping kiri kanannya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, warga diwakili pengurus RW setempat telah mengajukan usulan perbaikan dan pada lokasi tertentu membuat dinding penahan darurat dari karung pasir dan bambu.

Untuk Kali "Tusirah" kondisinya fisiknya lebih baik dari Kali Kedung Jumbleng tetapi pada saat ini kondisi saluran banyak ditumbuhi tanaman dan terlihat ada pendangkalan yang cukup berat. Keadaan ini diperparah dengan adanya sampah yang dibuang ke saluran terutama di waktu kemarau.

Mengenai kondisi saluran yang lain pada umumnya dalam kondisi baik tetapi di beberapa tempat terlihat adanya saluran yang telah retak-retak dan beberapa lokasi lagi terutama di RW II telah menimbulkan genangan karena tidak berfungsi dengan baik, seperti yang terlihat pada Gambar 4.7.


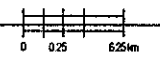



 <b>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b> WILAYAH DAERAH KOTA <b>PROGRAM PASCA SARJANA</b> UNIVERSITAS DIPONEGORO	<b>TESIS</b>	<b>PETA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NO. GAMBAR</b>	<b>UTARA</b>
	PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DI MOJOKERTO	PETA KONDISI DRAINASE SETELAH PEREMAJAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li> DAERAH YG MUDAH TERGENANG</li> <li> DAERAH YG TERANCAM LONGSOR</li> <li> SALURAN DGN DINDING PENAHAN RUSAK</li> <li> SALURAN YG KURANG TERAWAT</li> </ul>	<b>4.7.</b>  SKALA 	  SUMBER : DATA PRIMER DIOLAH 2003

Dalam hal persampahan, setelah peremajaan selesai maka masyarakat sudah mulai timbul kesadaran membuang sampah. Mereka membuang sampah di bak-bak sampah dan kemudian diteruskan ke TPS untuk diangkut ke TPA. Tetapi kondisi ini ternyata tidak bertahan lama, pada saat ini kebiasaan warga untuk membuang sampah di saluran atau pekarangan di beberapa lokasi sudah mulai tumbuh kembali.

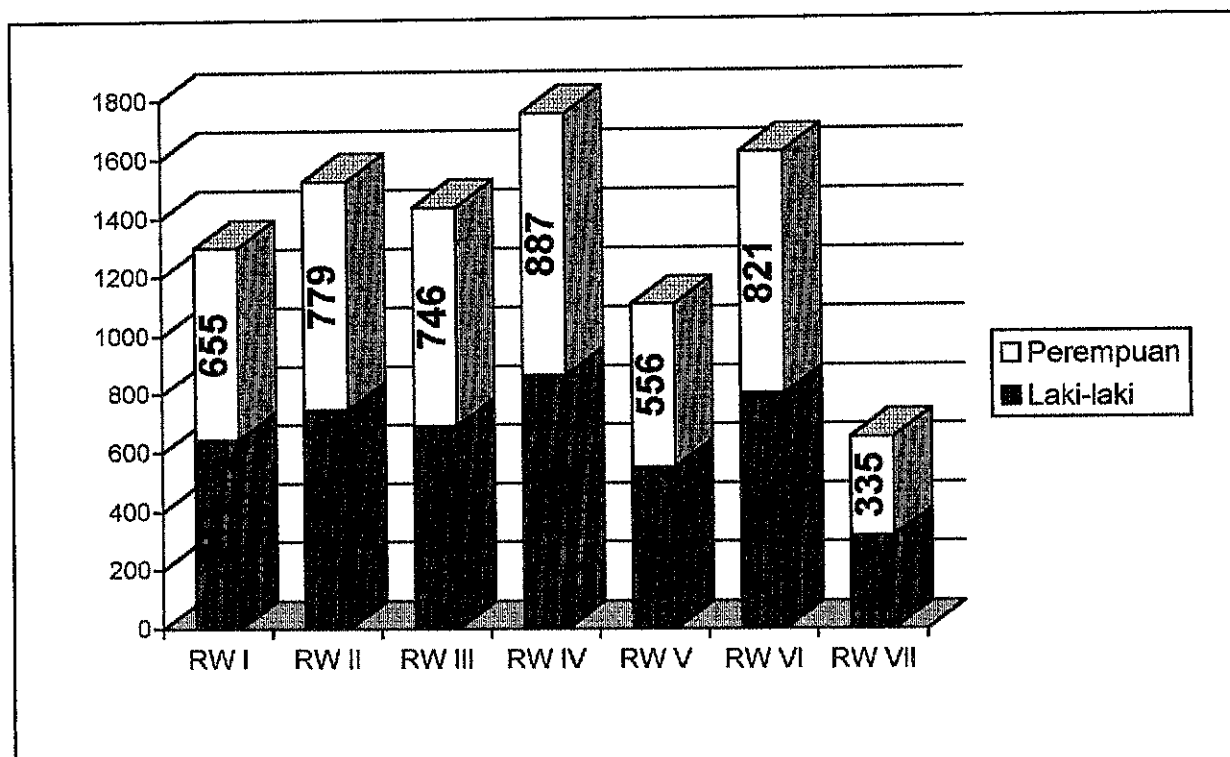
Mengenai kondisi permukiman, setelah adanya peremajaan maka permukiman kumuh yang sebelumnya ada telah berubah menjadi permukiman yang tertata. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu di beberapa tempat khususnya di RW I, II dan RW VI telah mulai tumbuh permukiman kumuh baru dengan rumah-rumah yang sangat padat dan terdiri dari bangunan semi permanen maupun non permanen seperti yang terlihat pada Gambar 4.8. Walaupun permukiman kumuh yang ada skalanya masih kecil dibandingkan luas kawasan secara keseluruhan tetapi karena pada kawasan tersebut baru saja selesai diremajakan, tentunya keberadaan permukiman kumuh baru tersebut perlu mendapat perhatian khusus.



	TESIS	PETA	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERAN BERTAKWA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI MOJOSONGO</p>	<p>PETA DAERAH KUMUH SETELAH PEREMAJAAN</p>	<p>■ DAERAH YG MULAI KUMUH KEMBALI</p>	<p>4.8.</p> <p>SKALA</p> 	 <p>Sumber : Profil Kota Surakarta 2001</p>

#### 4.3.3.2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

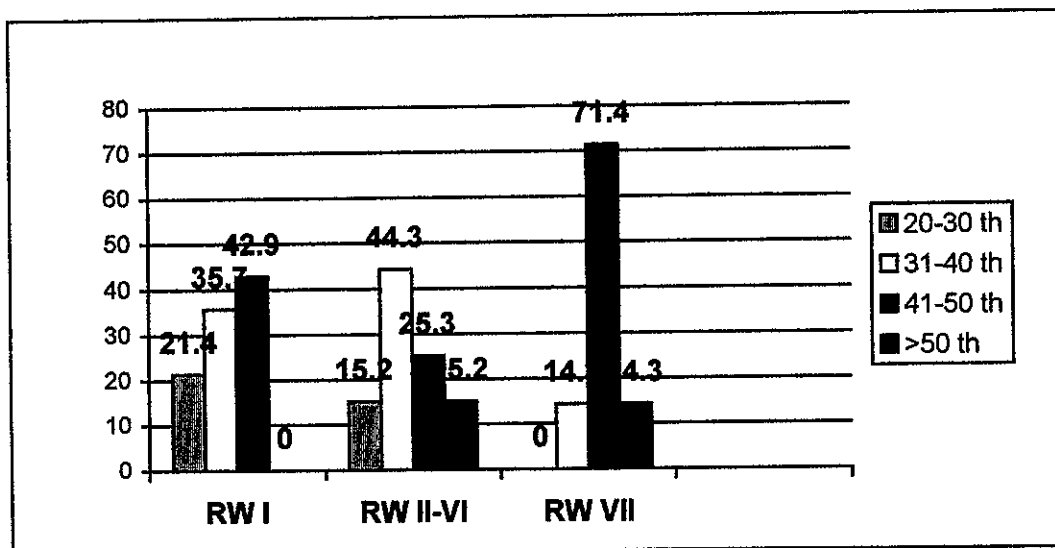
Jumlah penduduk pada kawasan yang telah diremajakan yaitu mulai dari RW I sampai RW VII sebanyak 9.378 jiwa, komposisi penduduk menurut jenis kelamin secara lebih terinci dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.



GAMBAR 4.9.  
DIAGRAM KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK TIAP RW  
*sumber : Lembaran lepas Data Penduduk Kal. Mojosoongo tahun 2002.*

Mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk, berdasarkan hasil survei terhadap responden maka dapat diketahui bahwa di RW I penduduk yang berumur 41-50 tahun sejumlah 42,9%, berumur 31-40 tahun sebanyak 35,7%, berumur 20-30 tahun sebanyak 21,4 % dan tidak ada responden yang berumur lebih dari 50 tahun. Untuk RW II-VI, responden sebagian besar berumur 31-40 tahun (60,8%) dan responden yang berumur 20-30 tahun jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak 2 responden (2,5%). Jumlah responden di RW VII

sebagian besar berumur 41-50 tahun (71,4%) dan tidak ada responden yang berumur 20-30 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.

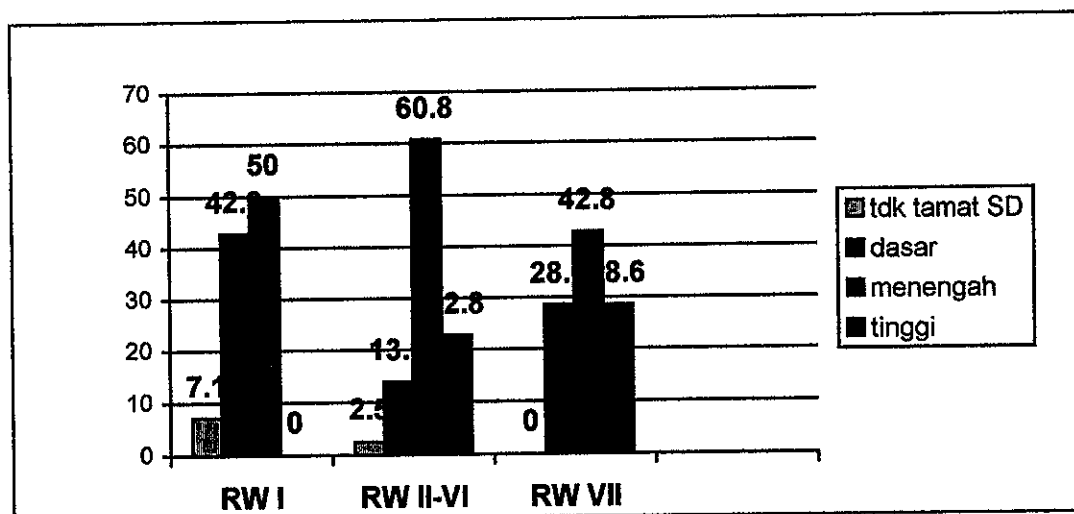


GAMBAR 4.10.  
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT UMUR  
*Sumber : Data primer diolah, 2003*

Mengenai tingkat pendidikan maka berdasarkan jumlah hasil survei responden, warga di RW I memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, 50% warga memiliki pendidikan menengah, 42,9% warga memiliki pendidikan dasar dan 7,1% memiliki pendidikan tidak tamat SD. Dalam hal ini tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Warga di RW VII memiliki tingkat pendidikan yang agak lebih baik dibandingkan di RW I yaitu 28,6% warga memiliki pendidikan tinggi, 42,8% memiliki pendidikan menengah dan 28,6% memiliki pendidikan dasar serta tidak ada responden yang tidak tamat SD.

Kondisi di RW II-VI memiliki tingkat pendidikan yang lebih bervariasi tetapi para responden sebagian besar memiliki pendidikan menengah yaitu ada 60,8%, selanjutnya tingkat pendidikan tinggi sebanyak 22,8% dan tingkat pendidikan dasar sebanyak 13,9%. Untuk responden yang tidak tamat pendidikan dasar sebanyak 2,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut.

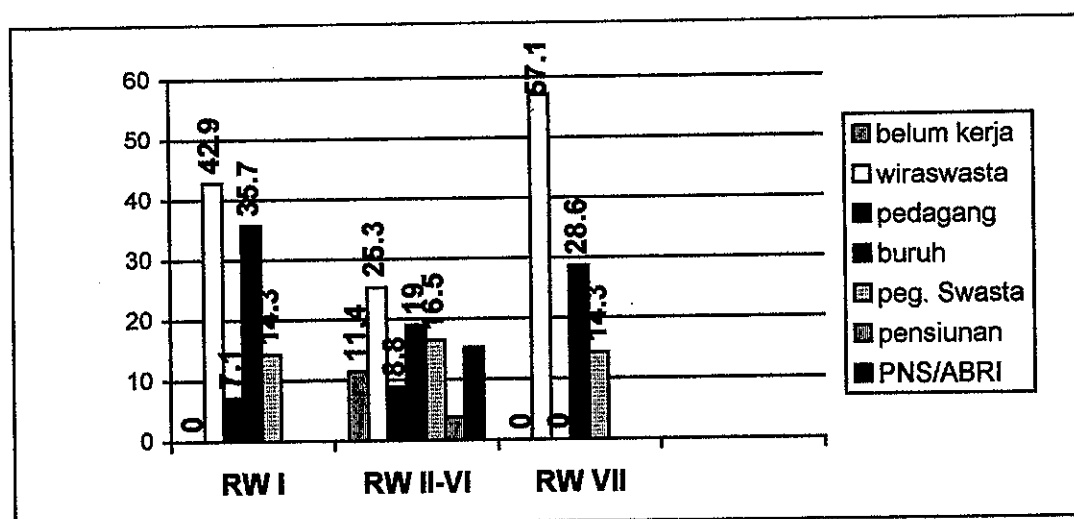


GAMBAR 4.11.

## PROSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Kehidupan sosial ekonomi seseorang sangat erat kaitannya dengan jenis pekerjaan yang ditekuninya. Berdasarkan survei responden maka di RW I sebagian besar warga bekerja sebagai wiraswasta (42,9%) dan yang bekerja sebagai pedagang jumlahnya paling sedikit(7,1%), dalam hal ini warga yang bekerja sebagai PNS/ABRI dan pensiunan tidak ada. Kondisi yang sama ditemui untuk responden RW II-VI sebagian besar warga bekerja sebagai wiraswasta (25,3%) dan sebagian kecil sebagai pensiunan (3,8%). Demikian pula di RW VII sebagian besar responden bekerja sebagai buruh sebanyak 4 responden (57,1%) dan hanya sebagian kecil yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta yaitu sebanyak 1 responden (14,3%) sedangkan responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI dan pensiunan tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4.12 berikut.

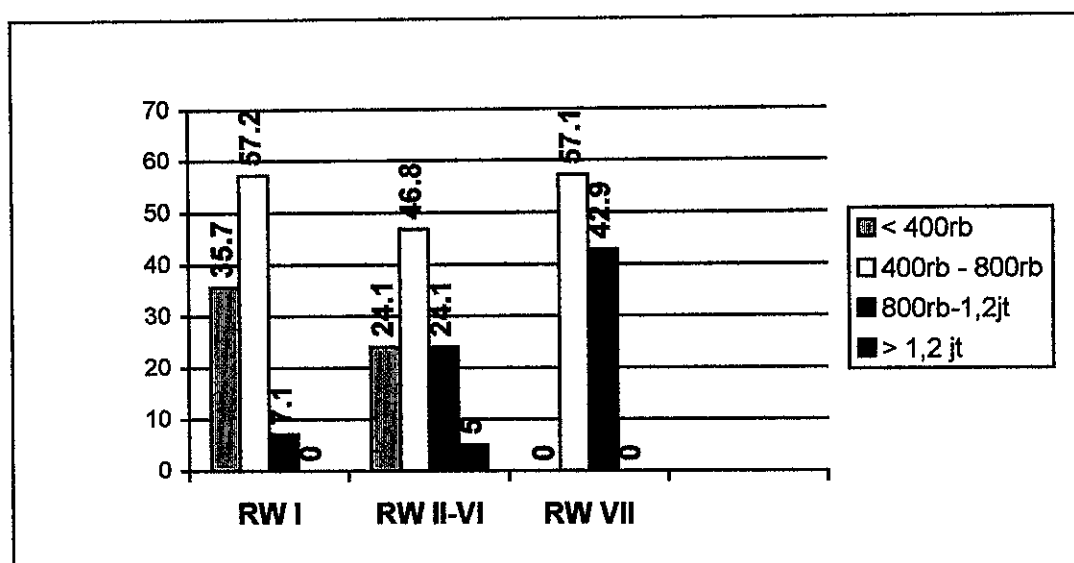


GAMBAR 4.12.  
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Mengenai mata pencahariannya tersebut, warga yang bekerja menjual makanan kecil (HIK) memiliki jam kerja khusus. Rata-rata mereka bekerja mulai jam 5 sore hingga pulang rumah pagi hari, setelah pulang kebanyakan belanja bahan-bahan makanan kemudian istirahat hingga sore baru mulai bekerja. kembali. Dalam hal ini mereka mendapat pemasukan dari jumlah dagangan yang laku. Untuk warga yang menjadi pengrajin biasanya memiliki waktu kerja yang tidak teratur tetapi mereka bekerja hingga larut malam terutama bila sedang banyak mendapat pesanan. Mereka mendapat penghasilan berdasarkan jumlah pesanan yang diperoleh dari para pedagang yang ada di pasar Depok (pasar burung) atau dikirim ke luar kota. Bagi warga yang menjadi pembuat tahu-tempe atau berjualan ke pasar, rata-rata memiliki waktu kerja yang relatif teratur tetapi kadang-kadang tidak mengenal hari libur. Mereka biasanya memperoleh penghasilan harian. Sedangkan khusus bagi warga yang bekerja sebagai buruh atau pegawai rata-rata memiliki waktu kerja yang teratur dan memperoleh penghasilan per bulan tetapi untuk buruh terkadang pada hari libur ada pekerjaan tambahan/lemburan dimana mereka harus tetap masuk.

Dalam hal tingkat pendapatan menurut hasil survei responden, warga di RW I sebagian besar berpenghasilan Rp 400.000,- sampai Rp 800.000,- (57,2%) dan tidak ada warga yang berpenghasilan lebih dari Rp 1,2 juta. Warga di RW II-VI sebagian besar berpenghasilan Rp 400 sampai 800 ribu (46,8%) dan 5 % warga memiliki penghasilan lebih dari Rp 1,2 juta. Untuk responden yang berada di RW VII sebagian besar berpenghasilan Rp 400.000,- sampai Rp 800.000,- (57,1%) dan tidak ada responden yang memiliki penghasilan diatas Rp 1,2 juta atau dibawah Rp 400.000,-. Secara lebih detail komposisi penduduk menurut tingkat pendapatan dapat dilihat pada Gambar 4.13.



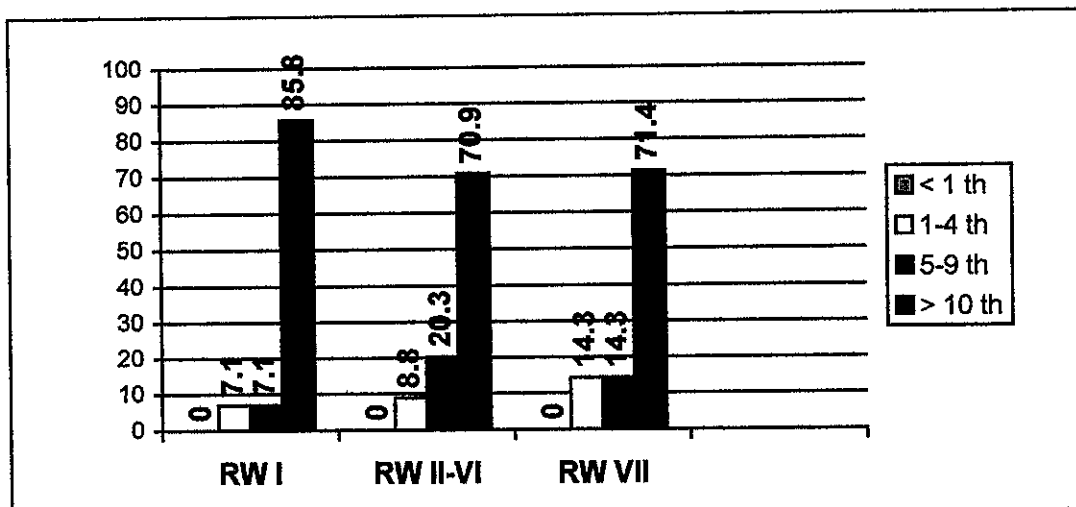
GAMBAR 4.13.  
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDAPATAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan data tingkat pendapatan tersebut maka sebagian besar warga memiliki penghasilan rendah. Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan warga dalam pendanaan khususnya dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana yang ada.

Di kawasan yang telah diremajakan, di RW I sebagian besar warga tinggal lebih dari 10 tahun (85,8%) dan tidak ada yang tinggal kurang dari 1 tahun. Kondisi tersebut juga

berlaku untuk warga yang berada di RW II –VI dimana sebagian besar warga memiliki lama tinggal lebih dari 10 tahun (70,9%) dan tidak ada yang tinggal kurang dari 1 tahun. Sedangkan warga yang berada di RW VII sebagian besar tinggal lebih dari 10 tahun (71,4%) dan tidak ada yang tinggal kurang dari 1 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.14.

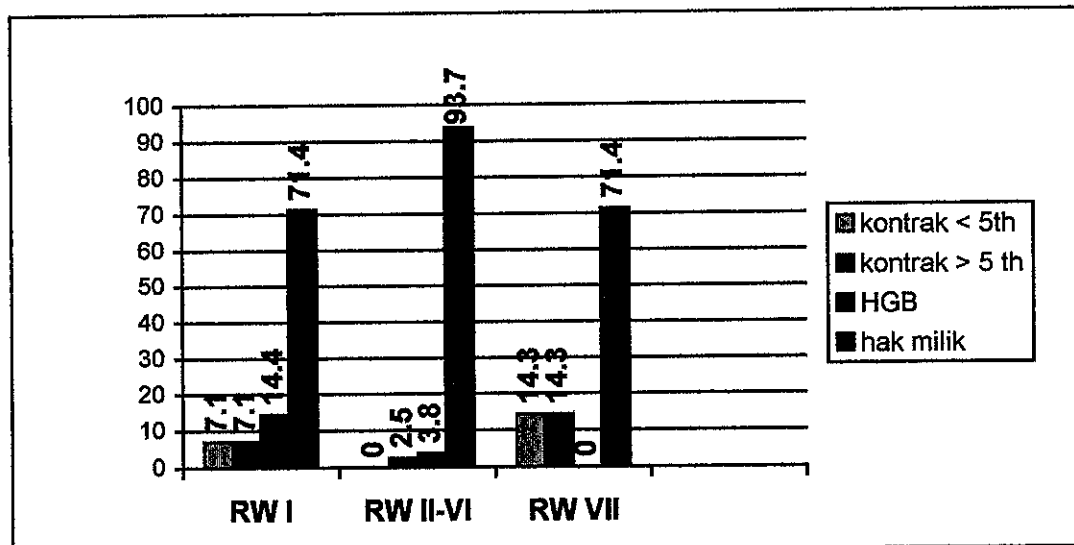


GAMBAR 4.14.  
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT LAMA TINGGAL

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa hampir semua warga yang tinggal di RW I sampai RW VII diasumsikan memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan lingkungan yang ada karena telah lama tinggal di dalamnya.

Selama tinggal dalam lingkungan tersebut maka sebagian besar warga di RW I hampir semuanya mengakui status huniannya merupakan hak milik (71,4%). Warga di RW II-VI kondisinya hampir sama yaitu sebanyak 93,7% berstatus hak milik dan tidak ada yang menyewa. Untuk responden di RW VII sebagian besar mengaku berstatus hak milik (71,4%) dan tidak ada yang mengaku berstatus hak guna bangunan. Secara lebih detail dapat dilihat pada Gambar 4.15.



GAMBAR 4.15.  
PROSENTASE PENDUDUK MENURUT STATUS HUNIAN

Sumber : Data primer diolah, 2003

Selain kajian diatas, salah satu aspek penting dalam kajian sosial adalah pola kepemimpinan dalam masyarakat. Selain pemimpin formal yang telah disahkan oleh Pemerintah, terdapat pula beberapa tokoh informal yang secara informal dihormati dan disegani anggota masyarakat. Di kawasan yang telah diremajakan, ketua RW/RT atau tokoh-tokoh formal biasanya dipilih dari warga yang telah mapan kedudukan sosialnya (guru, pegawai negeri/swasta), warga yang mapan dalam kehidupan ekonomi ataupun warga yang paling lama mendiami lingkungan.

Kondisi politik kawasan dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia pada umumnya tidak jauh berbeda dengan kawasan lain. Satu hal yang berhasil diamati adalah bahwa masyarakat belum menghiruakan urusan politik selama tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan utama mereka. Urusan politis akan ditanggapi serius bila benar-benar secara nyata mempengaruhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mungkin dapat merupakan salah satu ciri masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah yang banyak ditemukan di kawasan-kawasan permukiman kumuh lainnya.

Mengenai kebiasaan dan perilaku, di kawasan yang telah diremajakan pada umumnya warga masih memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Salah satu kebiasaan yang dilaksanakan dalam kehidupan bertetangga adalah melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan kampung. Kegiatan bersama seperti ini dapat menjadi modal utama dalam peningkatan peran serta penduduk untuk mengelola prasarana yang ada di lingkungannya. Memang kawasan ini tidak terlepas dari kehidupan kota yang cenderung individualis. Sifat individualis warga yang timbul pada kawasan ini pada umumnya lebih disebabkan karena tuntutan ekonomi untuk bekerja. Rata-rata para warga berpenghasilan rendah dimana sehari mereka tidak bekerja maka berkurang pula penghasilan yang dia terima.

Selain kerja bakti kegiatan bersama yang dilakukan warga adalah berkumpul dalam pertemuan resmi warga ataupun tidak resmi. Pertemuan resmi ada yang dilaksanakan rutin tiap bulan ataupun berdasarkan waktu Jawa misalnya Rebo Legi atau Selasa Kliwon. Sedangkan pertemuan informal dilakukan tergantung pada waktu luang masing-masing yang biasanya bertempat di pos ronda atau serambi rumah seorang warga. Biasanya mereka berkumpul untuk sekedar bersilaturahmi dengan tetangga atau hanya mengobrol.

## **BAB V**

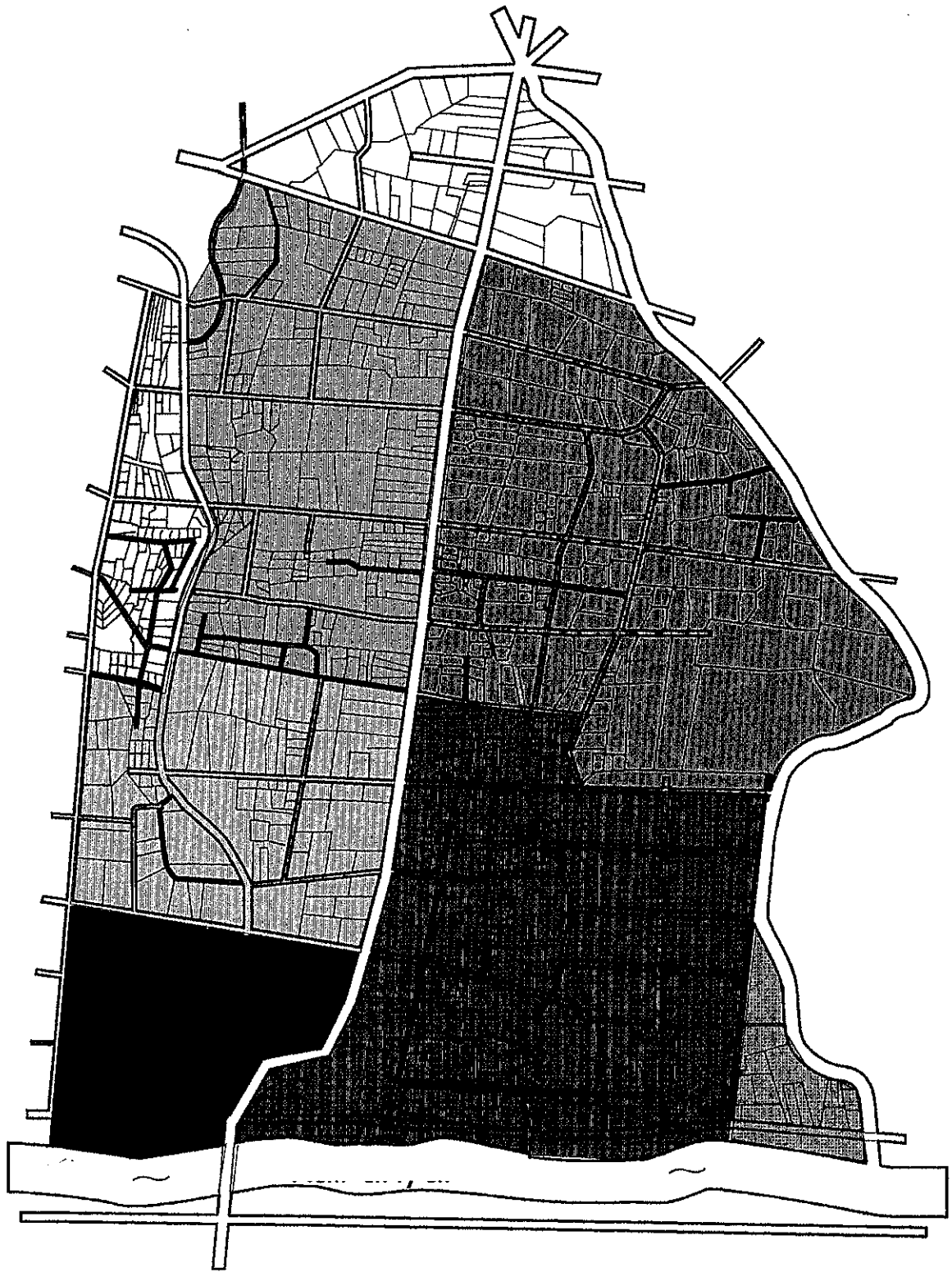
### **ANALISIS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**


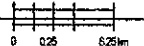

Dalam bab metodologi penelitian, telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan deskripsi kualitatif. Setelah dilakukan survey primer pada kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo Surakarta maka didapatkan jawaban dari masing-masing responden. Dari data-data tersebut dilakukan pembobotan dan penilaian. Kemudian dari hasil penilaian dilakukan analisis hubungan antara antara dua variabel dengan tabulasi dalam hal ini menggunakan bantuan SPSS (*Statistic Program for Social Science*) dan ditindaklanjuti penjelasan deskripsi kualitatif.

Berkaitan dengan program peremajaan lingkungan, dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap 100 responden maka responden tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

- a. Responden yang terkena program *redevelopment* yang berada di RW I terutama di Bantaran Barat Kali Anyar. Dalam hal ini peremajaan dilakukan dengan mengubah struktur lingkungan yang telah ada tanpa memindahkan warga.
- b. Responden yang terkena program peremajaan tanpa mengubah struktur kawasan dan berada di RW II sampai RW VI. Dalam hal ini peremajaan dilakukan terutama untuk memperbaiki prasarana permukiman.
- c. Responden yang terkena program *resettlement* yang berada di RW VII (Kedung Tungkul). Dalam hal ini peremajaan dilakukan dengan mengubah struktur kawasan yang ada dengan melakukan pemindahan warga di bantaran Timur Kali Anyar yang masih termasuk daerah RW II ke daerah yang telah dipersiapkan yaitu di RW VII.

Mengenai lokasi responden tersebut dapat dilihat di Gambar 5.1 berikut ini.



	TEKST	PETA	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
 <p>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>PERAN SERTA WASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI MOJOSONGO</p>	<p>PETA LOKASI PEREMAJAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RW I</li> <li>▨ RW II</li> <li>▩ RW III</li> <li>□ RW IV</li> <li>▤ RW V</li> <li>▥ RW VI</li> <li>▦ RW VII</li> </ul>	<p>5.1</p> <p>No.</p> <hr/> <p>SKALA</p> 	 <p>SUMBER : WASTUMDYAWAN 1996</p>

Sehingga dari hal tersebut diatas, analisis peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman ini dilakukan berdasarkan kategori RW yang terkena *redevelopment*, peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan, RW yang terkena *resettlement* dan pada akhirnya dilakukan analisis peran serta masyarakat secara menyeluruh pada lingkungan tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan agar dapat dikenali karakteristik peran serta masyarakat pada lingkungan yang telah diremajakan dengan berbagai program tersebut dan dengan program peremajaan lingkungan pada umumnya.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan maka pada masing-masing kategori tersebut perlu dikaji mengenai bentuk peran serta yang ada, tingkat peran serta dan hubungan antara antara faktor-faktor yang berpengaruh dengan bentuk dan tingkat peran serta yang ada.

Bentuk-bentuk peran serta dapat berupa bentuk sumbangan, bentuk kegiatan, intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dianalisis berdasarkan pada tingkat kehadiran dalam pertemuan, tingkat keaktifan berdiskusi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama. Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh yang dimaksudkan disini sesuai dengan tinjauan teori yaitu faktor internal yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana. Ciri-ciri individu terdiri dari umur, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal dan status hunian. Ikatan psikologis terdiri dari jumlah tetangga yang dikenal dan keikutsertaan dalam kegiatan peremajaan yang telah dilaksanakan. Persepsi terdiri dari persepsi manfaat peran serta dan tanggung jawab pengelolaan prasarana. Untuk kepemimpinan terdiri dari tingkat kehadiran, peran pemimpin dalam memberikan pengarahan dan dukungan warga pada pemimpin.

## **5.1. Analisis Peran Serta Masyarakat di RW I (*Redevelopment*)**

### **5.1.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat RW I (*Redevelopment*)**

Peran serta masyarakat khususnya dalam pengelolaan prasarana pada dasarnya dapat dikenali dari bentuk peran serta yang terjadi. Menurut Duselldorp (dalam Slamet 1994:10) bahwa satu kegiatan peran serta dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk peran serta yang ada dapat berupa bentuk sumbangan dalam peran serta yaitu pikiran, uang, material dan tenaga, serta bentuk kegiatan dalam peran serta yaitu peran serta dilakukan bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan pihak lain. Selain itu bentuk peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

Bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan jalan dan saluran sebagian besar berupa tenaga yaitu (78,6%) kemudian dengan memberikan usulan (14,3%) serta uang (7,1%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material. Mengenai bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyumbang tenaga (71,4%) serta usulan (28,6%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material ataupun uang. Dalam hal ini sumbangan uang yang dimaksud dalam pengelolaan sampah adalah sumbangan di luar RKK sedangkan mengenai RKK tersebut warga tetap memberikan melalui iuran RT ke pengurus RW untuk diteruskan ke Kelurahan.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan jalan dan saluran adalah dalam bentuk kerja bakti massal (64,3%) yang dilakukan secara bersama-sama dalam lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam rapat warga. Dalam hal ini mulai timbul keinginan warga untuk melaksanakan di lingkungan tempat tinggal masing-masing dalam waktu bersamaan (28,6%) dan tidak ada keinginan warga untuk melakukannya dengan mengupah seseorang.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan sampah sama dengan pada jalan dan saluran yaitu dalam bentuk kerja bakti massal (50%) tetapi dalam hal ini telah ada keinginan warga untuk mulai melaksanakannya kapan saja di lingkungan tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri (28,6%) dan yang memilih dalam waktu bersamaan hanya (14,3%). Dalam hal ini hanya sebagian kecil warga yang berkeinginan mengupah seseorang untuk membersihkan sampah (7,1%).

Mengenai bentuk peran serta berdasarkan frekuensi kegiatan bersama yang telah dilakukan maka sebagian besar warga rata-rata melakukannya sebulan sekali (50%) dan tidak ada yang melakukannya kurang dari sebulan sekali. Kegiatan bersama tersebut dilaksanakan rutin dengan waktu dan tempat yang tidak sama dimana pelaksanaannya untuk tingkat RW sebagian besar diwakili ketua RT (42,8%), sedangkan sisanya diwakili sebagian warga (28,6%) serta warga datang sendiri (28,6%) sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan peran serta yang ada dilaksanakan dalam bentuk intensif yaitu dilakukan rutin tiap bulan walaupun tanggal dan tempat tidak selalu sama. Untuk tingkat RT berdasarkan hasil wawancara dihadiri langsung oleh seluruh warga. Dalam hal ini bentuk peran serta warga berdasarkan cara keterlibatan untuk tingkat RW cenderung dalam bentuk peran serta tak langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung. Dan pada akhirnya berdasarkan derajat kesukarelaan maka bentuk peran serta yang terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam partisipasi bebas karena sebagian besar warga merasa keterlibatan mereka dilaksanakan tanpa paksaan sama sekali (92,9%) dan tidak ada yang merasa terpaksa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.1.

TABEL V.1.  
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW I (REDEVELOPMENT)

No	Bentuk Peran Serta	Skala Penilaian	RW I (redevelopment)	
			Frekuensi	%
1	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan jalan & saluran	Tenaga	11	78,6
		Material	-	-
		Uang	1	7,1
		Usulan/pikiran	2	14,3
2	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan sampah	Tenaga	10	71,4
		Material	-	-
		Uang	-	-
		Usulan/pikiran	4	28,6
3	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan jalan & saluran	Kerja bakti massal	9	64,3
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	4	28,6
		Di lingk. masing2 kapan saja	1	7,1
		Mengupah seseorang	-	-
4	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan sampah	Kerja bakti massal	7	50
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	2	14,3
		Di lingk. masing2 kapan saja	4	28,6
		Mengupah seseorang	1	7,1
5	Jumlah kegiatan dlm satu bulan	≥ 3 x sebulan	3	21,4
		2 x sebulan	4	28,6
		1 x sebulan	7	50
		<1 x sebulan	-	-
6	Rutinitas kegiatan	Rutin, waktu & tempat sama	-	-
		Rutin, waktu atau tempat tdk sama	3	21,4
		Rutin, waktu dan tempat tdk sama	7	50
		Tidak rutin, sesuai kebutuhan	4	28,6
7	Sifat kehadiran	Datang sendiri	4	28,6
		Diwakili sebagian warga	4	28,6
		Diwakili pengurus RT	-	-
		Diwakili ketua RT	6	42,8
8	Derajat kesukarelaan	Tidak terpaksa sama sekali	13	92,9
		Sedikit terpaksa	1	7,1
		Terpaksa	-	-
		Sangat terpaksa	-	-

Sumber : Data primer diolah, 2003

### 5.1.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat RW I (*Redevelopment*)

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan derajat keterlibatan masyarakat atau warga masyarakat dalam setiap kegiatan bersama yang dilaksanakan untuk mengelola prasarana yang telah ada pasca peremajaan lingkungan permukiman. Derajat keterlibatan warga masyarakat tersebut diukur dengan pemikiran semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan sumbangan dana atau iuran. Mengenai tingkat peran serta responden di RW I dapat dilihat pada Tabel V.2 berikut ini.

TABEL.V.2.  
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW I (*REDEVELOPMENT*)

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	Nx Bobot	Jumlah dm. Tiap Variabel
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Sangat Tinggi	-	4	-	42
		Tinggi	6	3	18	
		Rendah	7	2	14	
		Sangat Rendah	1	1	1	
2	Tingkat keaktifan berdiskusi	Sangat Tinggi	-	4	-	40
		Tinggi	4	3	12	
		Rendah	9	2	18	
		Sangat Rendah	1	1	1	
3	Tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik	Sangat Tinggi	-	4	-	44
		Tinggi	8	3	24	
		Rendah	5	2	10	
		Sangat Rendah	1	1	1	
4	Tingkat keaktifan membayar iuran / sumbangan yg telah disepakati bersama	Sangat Tinggi	-	4	-	32
		Tinggi	4	3	12	
		Rendah	10	2	20	
		Sangat Rendah	-	1	-	
	Jumlah				131	131

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan tabel tersebut maka dari 14 responden, 7 responden (50%) mengaku tingkat kehadirannya rendah dalam pertemuan, 6 responden (42,9%) tingkat kehadirannya tinggi, 1 responden (7,1%) tingkat kehadirannya sangat rendah dan tidak ada yang tingkat kehadirannya sangat tinggi.

Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang rendah (64,3%) dan tidak ada yang tingkat keaktifan berdiskusinya sangat tinggi sedangkan sisanya memiliki tingkat berdiskusi yang tinggi (28,6%) dan sangat rendah (7,1%).

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden memiliki tingkat kehadiran yang tinggi (57,2%) dan tidak ada responden yang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang rendah (35,7%) dan sangat rendah (7,1%).

Mengenai tingkat keaktifan dalam membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama maka dari 14 responden 4 responden memiliki tingkat keaktifan tinggi, 10 responden memiliki tingkat keaktifan membayar yang rendah (71,4%) dan tidak ada yang memiliki tingkat keaktifan membayar yang sangat tinggi atau sangat rendah.

Mengenai penentuan kategori tingkat peran serta dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai terendah adalah  $4 \times 14 = 56$  dan nilai tertinggi adalah  $16 \times 14 = 224$ . Bila ada 4 interval maka jarak intervalnya adalah  $(224 - 56) / 4 = 42$ . Maka,

- Sangat tinggi bila memiliki skor            182 - 224
- Tinggi bila memiliki skor                    140 - 182
- Rendah bila memiliki skor                    98 - 140
- Sangat rendah bila memiliki skor            56 - 98

Sehingga bila total skor adalah 131 maka secara keseluruhan tingkat peran serta masyarakat yang telah di-*redevelopment* termasuk kategori tingkat peran serta rendah.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan variabelnya, dari data-data tersebut diatas maka peran serta masyarakat yang paling tinggi adalah dalam kegiatan fisik yang mencapai jumlah Nx bobot tertinggi (44) dan yang paling rendah adalah tingkat keaktifan dalam membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama dengan jumlah Nx bobot terkecil (32).

### **5.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat**

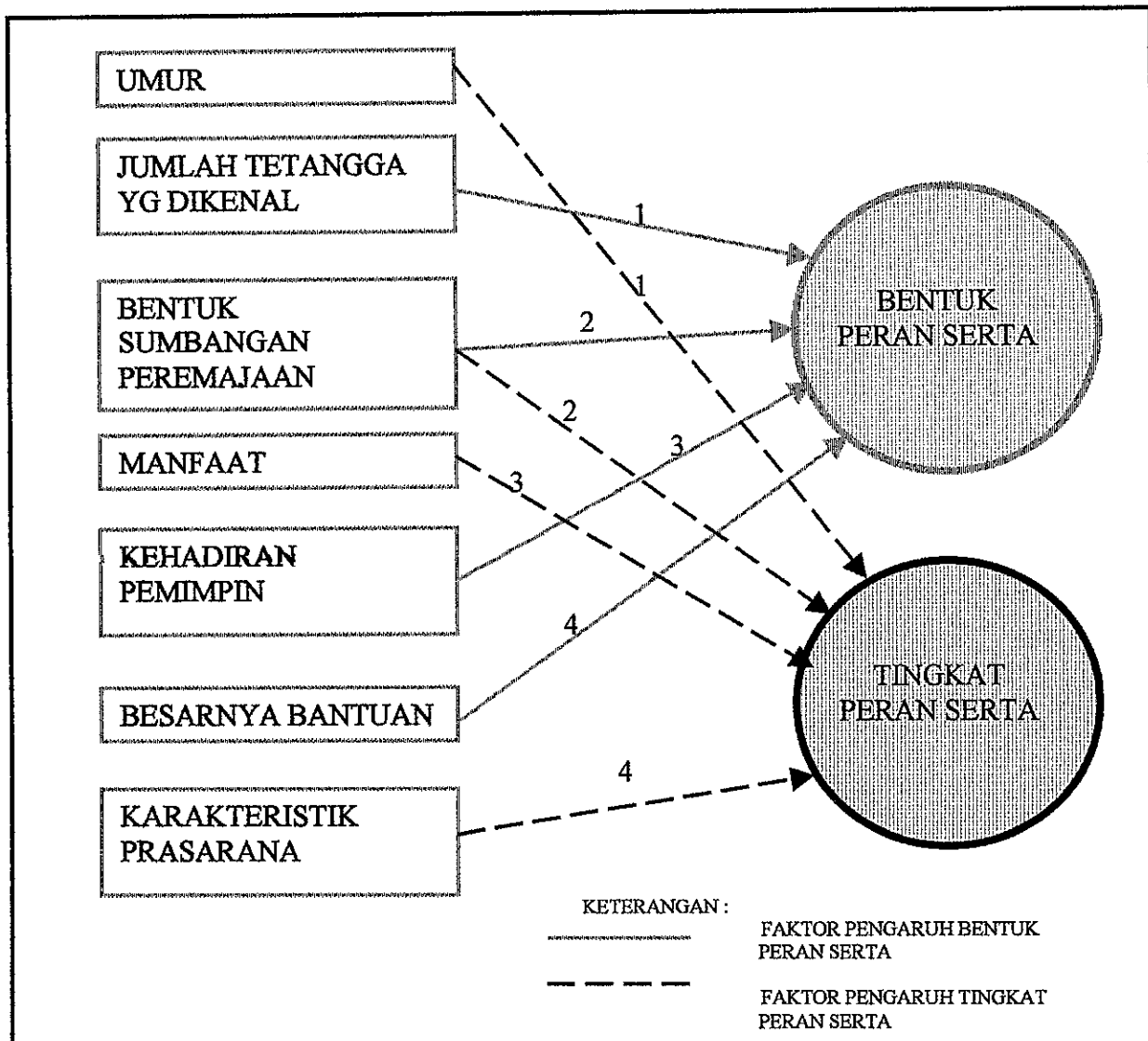
Untuk mengetahui hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan uji statistik dengan menggunakan tabulasi silang atau *crosstab* dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan nilai *chi square*. Setelah dilakukan uji *chi square* maka langkah selanjutnya adalah melihat taraf signifikansi (C). Nilai taraf signifikansi yang dihasilkan menunjukkan bahwa ada atau tidak hubungan antara dua variabel yang diuji. Batas taraf signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,05 artinya jika taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima, sebaliknya jika nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Koefisien kontingensi menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel yang diuji, nilai koefisien kontingensi ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00 dimana hasil koefisien kontingensi mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat dan sebaliknya jika nilai kontingensi tersebut semakin mendekati 0 maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin lemah. Mengenai hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada Tabel V.3.

TABEL.V.3.  
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE  
RW I (REDEVELOPMENT)

Kode	Soal	Variabel	Bentuk Peran Serta	Tingkat Peran Serta
F1	A1	Umur	8,433	8,000
F2	A2	Pendidikan	3,365	4,952
F3	A3	Pekerjaan	2,856	3,467
F4	A4	Pendapatan	4,408	1,700
F5	A5	Lama Tinggal	2,361	2,333
F6	A6	Status hunian	4,800	4,000
F7	D1	Jumlah tetangga yg dikenal	11,133	4,800
F8	D2	Bentuk Sumbangan dlm peremajaan	11,143	14,000
F9	D7	Tingkat peran serta dlm peremajaan	3,111	4,800
F10	D10	Kesesuaian rencana peremajaan	4,043	0,343
F11	D11	Kesesuaian hasil pelaksanaan peremajaan	4,171	2,343
F12	D12	Manfaat peran serta	7,333	7,333
F13	D13	Tanggung jawab pengelolaan prasarana	2,433	2,619
F14	D14	Kehadiran pemimpin	5,056	1,167
F15	D15	Kemampuan pemimpin memberi arahan	7,778	2,111
F16	D16	Dukungan warga pada pemimpin	3,455	3,818
F17	D17	Pemberian penyuluhan & pembinaan dari pem	10,204	4,000
F18	D18	Bantuan dana dari Pemerintah	6,370	1,111
F19	D19	Bantuan material dari Pemerintah	5,708	0,000
F20	D20	Besarnya bantuan bila diberikan	10,222	0,000
F21	D21	Bantuan pihak ketiga	7,083	1,500
F22	D22	Karakteristik prasarana	1,917	6,000

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat di RW I yang terkena program *redevelopment* dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan bila diberikan oleh Pemerintah. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh umur, persepsi manfaat peran serta bentuk sumbangan dalam peremajaan dan kondisi prasarana. Sehingga hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan bentuk dan tingkat peran serta dapat digambarkan seperti Gambar 5.2.



GAMBAR 5.2.  
FAKTOR YG BERPENGARUH PADA BENTUK &  
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW I (REDEVELOPMENT)  
*Sumber : Data primer diolah, 2003*

### 5.1.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat

#### 1. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi tertentu merupakan sebuah komunitas. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal oleh seseorang maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada bentuk peran sertanya dalam pengelolaan prasarana. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V.4.

TABEL V.4.  
 HUBUNGAN ANTARA JUMLAH TETANGGA YG DIKENAL  
 DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW I (REDEVELOPMENT)

no	Jumlah tetangga yg dikenal	Jumlah respon	bentuk sumbng pd jin & sal (%)	bentuk sumbng pd smpah (%)	bentuk kegiatan pd jin & sal (%)	bentuk kegiatan pd smpah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kebadiran (%)	Tingkat keterpaksasaan (%)
1	25%-50%	3	usulan uang material tenaga	0 0 0 100	0 mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 0 0 100	0 33.3 66.7 0	0 Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 Diwakili RT 0 Diwakili sebg wrg 66.7 Wrg hadir langsung 33.3	0 Sangat Terpaks 0 Terpaks 0 Hampir tdk 0 Tidak terpaks 100
2	50%-75%	6	usulan uang material tenaga	20 0 0 80	0 mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 0 20 80	0 80 0 20	0 Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	40 Diwakili RT 20 Diwakili pengrs RT 0 Diwakili sebg wrg 40 Wrg hadir langsung 0	0 Sangat Terpaks 0 Terpaks 0 Hampir tdk 0 Tidak terpaks 100
3	>75%	5	usulan uang material tenaga	33.3 0 0 66.7	0 mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 16.7 50 33.3	0 33.3 33.3 33.3	0 Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 Diwakili RT 50 Diwakili pengrs RT 0 Diwakili sebg wrg 0 Wrg hadir langsung 50	0 Sangat Terpaks 0 Terpaks 0 Hampir tdk 0 Tidak terpaks 83.3

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah  
 Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.4. tersebut dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 3 responden yang kenal 25%-50% tetangga sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda atau sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 6 responden yang kenal 50%-75% tetangga sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- c. Dari 5 responden yang kenal >75% tetangga menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran dilakukan di lingkungan tempat tinggal sendiri-sendiri pada waktu bersamaan serta dilakukan kapan saja untuk pengelolaan sampah. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda serta dihadiri oleh seluruh warga atau ketua RT untuk tingkat RW.

Berdasarkan kajian diatas dalam perawatan dan pemeliharaan jalan atau saluran, semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal semakin besar bentuk sumbangan tenaga yang diberikan warga. Tetapi dalam pengelolaan sampah semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal semakin berkurang peluang pemberian bentuk sumbangan tenaga oleh warga walaupun secara umum sumbangan tenaga masih dominan.

Selain itu semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka peluang terjadinya kerja bakti untuk memelihara dan merawat jalan, saluran atau mengelola sampah semakin berkurang. Sedangkan untuk frekuensi pertemuan, intensitas pertemuan dan sifat kehadiran

tidak ada pola tertentu yang dapat diurutkan serta masing-masing kelompok warga memiliki pengaruh yang berbeda-beda.

Dari kenyataan tersebut, asumsi bahwa semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal akan semakin mendorong terwujudnya kualitas bentuk peran serta yang ideal ternyata tidak selamanya benar. Ada kemungkinan bahwa kegiatan bersama yang dilakukan diinterpretasikan warga sebagai wujud kewajiban bersosialisasi mengingat semakin banyak tetangga yang dikenal maka tingkat keterpaksaan untuk turut dalam kegiatan bersama mulai tumbuh. Sehingga bila seorang warga sudah kenal dengan tetangga disekitarnya maka ia tidak perlu melakukan sosialisasi lagi dan cukup melakukan di kegiatan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

## **2. Hubungan antara bentuk sumbangan dalam peremajaan dengan bentuk peran serta**

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan peremajaan yang telah dilakukan akan ikut mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana yang dibangun. Keterlibatan berupa pemberian sumbangan dalam peremajaan tentunya mempengaruhi bentuk peran serta selama pengelolaan. Semakin banyak seseorang terlibat maka semakin tinggi kualitas bentuk peran sertanya. Pada kenyataannya keterlibatan warga di RW I dapat dilihat pada Tabel V.5.

TABEL V.5.  
 HUB. BENTUK SUMBANGAN DLM PEREMAJAAN  
 DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW I (REDEVELOPMENT)

no	Bentuk sumbangan dlm peremajaan	Jumlah respon	bentuk sumbgn pd jin & sal (%)	bentuk kegiatan pd jin & sal (%)	bentuk kegiatan pd bentuk kegiatan pd sam pah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksan (%)
1	1 bentuk sumbangan	7	usulan uang material tenaga	0 mengupah lingk kpn saja 14.3 lingk bersm 28.6 kerja bakti	0 mengupah lingk kpn saja 28.6 lingk bersm 71.4 kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	0 Tidak rutin 42.9 Rutin, wkt & tempat beda 42.9 Rutin, wkt sama tmpt beda 14.3 Rutin, wkt & tempat sama 0	0 Diwakili RT 42.9 Diwakili pengrs RT 0 Diwakili sebg wrg 14.3 Wrg hadir langsung 42.9 Wrg hadir langsung	0 Sangat Terpaks 0 Terpaksa 14.3 Hampir tdk 85.7 Tidak terpaksa
2	3 bentuk sumbangan	4	usulan uang material tenaga	0 mengupah lingk kpn saja 14.3 lingk bersm 50 kerja bakti	0 mengupah lingk kpn saja 50 lingk bersm 50 kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	0 Tidak rutin 75 Rutin, wkt & tempat beda 25 Rutin, wkt sama tmpt beda 25 Rutin, wkt & tempat sama 0	0 Diwakili RT 50 Diwakili pengrs RT 0 Diwakili sebg wrg 25 Wrg hadir langsung 25 Wrg hadir langsung	0 Sangat Terpaks 0 Terpaksa 0 Hampir tdk 100 Tidak terpaksa
3	4 bentuk sumbangan	3	usulan uang material tenaga	0 mengupah lingk kpn saja 33.3 lingk bersm 100 kerja bakti	0 mengupah lingk kpn saja 33.3 lingk bersm 66.7 kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	0 Tidak rutin 66.7 Rutin, wkt & tempat beda 0 Rutin, wkt sama tmpt beda 33.3 Rutin, wkt & tempat sama 0	0 Diwakili RT 33.3 Diwakili pengrs RT 0 Diwakili sebg wrg 66.7 Wrg hadir langsung 0	0 Sangat Terpaks 0 Terpaksa 0 Hampir tdk 100 Tidak terpaksa

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah  
 Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.5. tersebut maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 7 responden yang telah memberikan satu bentuk sumbangan dalam peremajaan yang telah dilakukan sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh warga atau ketua RT untuk tingkat RW.
- b. Dari 4 responden yang telah memberikan 3 bentuk sumbangan dalam peremajaan yang telah dilakukan sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa tenaga serta padapersampahan berupa tenaga atau usulan. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti atau melaksanakan di lingkungan tempat tinggal masing-masing secara bersamaan . Bentuk kegiatan pengelolaan pada sampah berupa kerja bakti atau melaksanakan sendiri-sendiri di tempat tinggal masing-masing kapan saja sesuai kebutuhan. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- c. Dari 3 responden yang telah memberikan 4 bentuk sumbangan yaitu uang, material, tenaga dan usulan dalam peremajaan yang telah dilakukan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran bukan lagi hanya tenaga tetapi juga usulan dan uang . Untuk bentuk sumbangan pada persampahan sebagian besar berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan tidak rutin sesuai kebutuhan. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Berdasarkan dari kajian diatas, dalam perawatan dan pemeliharaan prasarana maka semakin besar bentuk sumbangan yang telah diberikan dalam peremajaan semakin kecil peluang terjadinya bentuk sumbangan tenaga dalam pengelolaan prasarana.

Selain itu semakin besar bentuk sumbangan yang diberikan maka peluang dilakukannya kerja bakti pada jalan dan saluran semakin besar pula. Sedangkan pada sampah, kenyataan yang terjadi berbanding terbalik dengan asumsi karena peluang terjadinya kerja bakti semakin kecil.

Mengenai jumlah pertemuan, semakin banyak bentuk sumbangan yang telah diberikan dalam peremajaan maka peluang diadakannya pertemuan sekali sebulan semakin besar dan dalam pertemuan tersebut semakin besar keinginan untuk dihadiri sebagian warga dengan tingkat keterpaksaan semakin kecil.

### **3. Hubungan antara kehadiran pemimpin dengan bentuk peran serta**

Dalam setiap organisasi kemasyarakatan dikenal adanya pemimpin. Di kawasan Mojosoongo yang diremajakan ini para pemimpin formal yaitu Ketua RT atau RW merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat baik dari status sosial, status ekonomi ataupun orang yang paling lama tinggal dalam kawasan tersebut. Dalam Thoha (2002,226-240) disebutkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Besarnya pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan warga untuk terlibat dalam kegiatan peran serta dipengaruhi pula oleh intensitas hubungan antaranya dengan warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas hubungan antara ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pemimpin dalam kegiatan-kegiatan khususnya yang diselenggarakan oleh warga masyarakat. Berdasarkan kenyataan ini maka kehadiran pemimpin akan mempengaruhi bentuk keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V.6.

TABEL V.6.  
 HUB. KEHADIRAN PEMIMPIN DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT  
 DI RW I (REDEVELOPMENT)

no	Kehadiran pemimpin	Jumlah responden	bentuk sumbngn pd jln & sal (%)	bentuk sumbngn pd jln & sal (%)	bentuk sumbngn pd sampah (%)	bentuk kegiatan pd jln & sal (%)	bentuk kegiatan pd sampah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat ketertaksanaan (%)
1	Tinggi	8	usulan uang material tenaga	12.5 0 0 75	usulan uang material tenaga	12.5 0 0 75	0 12.5 12.5 75	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	0 0 0 100
2	Sangat tinggi	6	usulan uang material tenaga	16.7 0 0 83.3	usulan uang material tenaga	0 0 0 50	16.7 50 16.7 50	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	0 0 0 16.7 83.3

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah

Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.6. tersebut maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 8 responden yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran pemimpin tinggi dalam kegiatan bersama yang diadakan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan tidak rutin sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 6 responden yang menyatakan bahwa tingkat kehadiran pemimpin sangat tinggi dalam kegiatan bersama yang diadakan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa tenaga serta pada persampahan berupa tenaga atau usulan. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti atau melakukan di lingkungan tempat tinggal sendiri-sendiri secara bersamaan serta dilakukan kapan saja untuk pengelolaan pada sampah. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda dan dihadiri oleh seluruh warga untuk tingkat RW dan RT.

Berdasarkan dari kajian diatas maka semakin besar kehadiran dari pemimpin menunjukkan semakin besar pula keinginan untuk menyumbangkan tenaga pada jalan dan saluran tetapi pada sampah keinginan tersebut semakin berkurang. selain itu keinginan untuk bekerja bakti juga semakin kecil dan melakukannya di lingkungan masing-masing semakin besar. Walaupun rutinitas pertemuan semakin besar tetapi jumlah pertemuan semakin kecil dan kehadiran warga semakin banyak diwakilkan. Hal ini menunjukkan semakin sering seorang pimpinan hadir maka semakin berkurang tanggung jawab warga terhadap kondisi lingkungannya karena menganggap sudah ada yang menangani atau ada faktor-faktor lain dari pimpinan yang tidak disukai warga.

#### 4. Hubungan antara besarnya bantuan dari Pemerintah dengan bentuk peran serta

Warga masyarakat akan semakin terlibat dalam pengelolaan prasarana lingkungan apabila ada suasana yang mendukung. Dukungan yang diharapkan oleh masyarakat adalah perhatian dari Pemerintah berupa pemberian bantuan material atau dana. Sehingga besarnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil survey responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 4 responden yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dari Pemerintah bila diberikan besarnya <25% total kebutuhan, sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh sebagian warga atau ketua RT untuk tingkat RW.
- b. Dari 6 responden menyatakan bahwa bantuan yang diterima dari Pemerintah bila diberikan besarnya 25%-50% total kebutuhan, menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda atau sesuai kebutuhan. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh warga RT untuk tingkat RW dan RT.
- c. Dari 4 responden yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dari Pemerintah bila diberikan besarnya 50%-75% total kebutuhan, sebagian besar menginginkan bentuk sumbangan pada jalan saluran berupa tenaga dan pada persampahan berupa tenaga atau usulan . Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran dilakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing secara bersamaan serta pada pengelolaan sampah dilakukan bersamaan dan kapan saja. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Secara lebih lengkap hasil survei tersebut dapat dilihat pada Tabel V.7.

TABEL V.7.  
 HUB. BESARNYA BANTUAN PEMERINTAH  
 DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW I (REDEVELOPMENT)

no	Bearnya bantuan pemerintah	jumlah respon	bentuk sumbng pd jln & sal (%)	bentuk sumbng pd sampat (%)	bentuk kegiatan pd jln & sal (%)	bentuk kegiatan pd sampat (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksaaan (%)				
1	<25%	4	usulan uang material tenaga	25 usulan uang material tenaga	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	25 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	<1x 1x 2x >3x	0 75 0 25	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	25 25 50 0	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	50 0 50 0	Sangat Terpaks Terpaksa Hampir tdk Tidak terpaksa	0 0 0 100
2	25%-50%	6	usulan uang material tenaga	0 usulan uang material tenaga	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	<1x 1x 2x >3x	0 50 33.3 16.7	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	50 50 0 0	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	16.7 0 16.7 66.7	Sangat Terpaks Terpaksa Hampir tdk Tidak terpaksa	0 0 16.7 83.3
3	50%-75%	4	usulan uang material tenaga	25 usulan uang material tenaga	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	<1x 1x 2x >3x	0 25 50 25	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 75 25 0	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	75 0 25 0	Sangat Terpaks Terpaksa Hampir tdk Tidak terpaksa	0 0 0 100

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah

Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan kajian diatas maka semakin besar bantuan yang diberikan oleh Pemerintah semakin kecil peluang disumbangkannya bentuk tenaga pada pengelolaan sampah ataupun keinginan untuk menyumbangkan uang pada pengelolaan jalan dan saluran. Selain itu keinginan untuk melaksanakan kerja bakti juga semakin kecil, walaupun keinginan terhadap frekuensi pertemuan dengan rutin pada waktu dan tempat yang berbeda semakin besar.

Dari hal tersebut maka semakin besar bantuan yang diberikan oleh Pemerintah belum tentu memberikan dampak bentuk peran serta warga seperti yang diharapkan. Dalam hal ini sumbangan tenaga dan peluang warga untuk hadir langsung dalam pertemuan ada pada bantuan yang besarnya 50%-75% kebutuhan dana. Mengenai bentuk kegiatan maka peluang terjadinya kerja bakti dan meningkatnya jumlah pertemuan ada pada bantuan yang besarnya kurang dari 25%. Sedangkan bantuan yang besarnya 50%-75% mempengaruhi warga melakukan pertemuan secara tidak rutin.

### **5.1.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat**

#### **1. Hubungan antara umur dengan tingkat peran serta**

Keaktifan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan bersama di lingkungannya tentunya dipengaruhi pula oleh faktor usia. Dalam hal ini usia bukan hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik seseorang tetapi berpengaruh pula terhadap kematangan seseorang dalam menghadapi permasalahan yang timbul di lingkungannya. Penduduk dari golongan usia muda memiliki kecenderungan bentuk dan tingkat peran serta yang berbeda dibandingkan penduduk dari golongan usia tua. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dapat di lihat di Tabel V.8.

TABEL V.8.  
HUB. UMUR DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW I (REDEVELOPMENT)

No	Umur	Jml Respd	Perhitungan Skor													
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar				
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb		
1	21-30 tahun	3	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-
			2	2	4	1	2	2	-	2	-	2	-	2	2	4
			1	3	3	1	3	3	3	3	9	1	3	3		
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-		
	Jumlah tiap variabel		7			6			9			7				
	Jumlah tiap kelompok umur											29				
2	31-40 tahun	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
			1	2	2	4	2	8	-	2	-	2	2	4		
			4	3	12	1	3	3	5	3	15	3	3	9		
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-		
	Jumlah tiap variabel		14			11			15			13				
	Jumlah tiap kelompok umur											53				
3	41-50 tahun	6	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-		
			4	2	8	4	2	8	5	2	10	6	2	12		
			1	3	3	2	3	6	-	3	-	-	3	-		
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-		
	Jumlah tiap variabel		12			14			11			12				
	Jumlah tiap kelompok umur											49				

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.8. tersebut dan Tabel III.2 pada bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 3 responden yang berumur 21-30 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- Dari 5 responden yang berumur 31- 40 tahun memiliki tingkat peran serta tinggi dalam pengelolaan prasarana . Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

- c. Dari 6 responden yang berumur 41- 50 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa anggapan semakin tinggi umur seseorang maka semakin tinggi tingkat peran sertanya dalam pertemuan dan pada kegiatan fisik semakin berkurang tidak selamanya benar. Tingkat keaktifan berdiskusi rata-rata rendah dan tingkat peran serta masyarakat tertinggi ada pada kelompok umur 31-40 tahun terutama pada tingkat peran serta masyarakat untuk hadir dalam pertemuan dan kegiatan fisik serta membayar iuran bersama.

## **2. Hubungan antara bentuk sumbangan dalam peremajaan dengan tingkat peran serta**

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana yang telah dibangunnya. Keterlibatan ini dapat berupa bentuk sumbangan, seberapa besar jumlah bentuk sumbangan yang telah diberikan akan menentukan seberapa besar rasa kepemilikan mereka terhadap hasil dari proses tersebut. Rasa kepemilikan ini akan mempengaruhi kepedulian terhadap kondisi dari hasil kegiatan. Hubungan antara bentuk sumbangan dalam peremajaan dengan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana dapat dilihat pada Tabel V.9.

TABEL V.9.  
HUB. BENTUK SUMBANGAN DLM PEREMAJAAN  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW I (REDEVELOPMENT)

No	Bentuk sumbangan dalam peremajaan	Jml Respd	Perhitungan Skor												
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar			
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	
1	1 bentuk sumbangan	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-
			5	2	10	5	2	10	4	2	8	7	2	14	
			1	3	3	1	3	3	2	3	6	-	3	-	
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
			Jumlah tiap variabel			14			14			15			14
Jumlah tiap kelompok			57												
2	3 bentuk sumbangan	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
			1	2	2	3	2	6	-	2	-	1	2	2	
			3	3	9	1	3	3	4	3	12	3	3	9	
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
			Jumlah tiap variabel			11			9			12			11
Jumlah tiap kelompok			43												
3	4 bentuk sumbangan	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
			1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4	
			2	3	6	2	3	6	2	3	6	1	3	3	
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
			Jumlah tiap variabel			8			8			8			7
Jumlah tiap kelompok			31												

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan dari Tabel V.9 dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 7 responden yang menyumbangkan satu bentuk sumbangan dalam peremajaan memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- Dari 4 responden yang memberikan tiga bentuk sumbangan memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

- c. Dari 3 responden yang memberikan empat bentuk sumbangan dalam peremajaan yang telah dilakukan memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian di atas, semakin banyak bentuk sumbangan yang diberikan dalam peremajaan maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana. Kondisi ini didukung dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat untuk hadir dalam pertemuan dan kegiatan fisik yang diadakan serta keaktifan berdiskusi. Mengenai keaktifan membayar iuran tidak ada pola tertentu dan tertinggi pada kelompok yang telah memberikan tiga bentuk sumbangan atau ada faktor lain yang lebih dominan.

### **3. Hubungan antara persepsi manfaat kegiatan dengan tingkat peran serta**

Salah satu keengganan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan peran serta penduduk dalam pengelolaan prasarana adalah hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tidak akan berperan serta jika merasa hasil keterlibatannya tidak berpengaruh pada hasil akhir. Masyarakat akan cenderung lebih berperan serta apabila ada manfaat yang dapat mereka petik. Berdasarkan hasil survei responden maka dapat diperoleh Tabel V.10 yang menggambarkan keterkaitan antara antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana dengan tingkat peran serta yang terjadi.

TABEL V.10.  
HUB. PERSEPSI MANFAAT KEGIATAN DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW I (REDEVELOPMENT)

No	Manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	Tidak Ada	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			2	2	4	1	2	2	2	2	4	2	2	4
			1	3	3	2	3	6	1	3	3	1	3	3
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			7			8			7		
Jumlah tiap kelompok			29											
2	Sedikit Manfaat	2	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
			1	2	2	1	2	2	-	2	-	2	2	4
			1	3	3	-	3	-	2	3	6	-	3	-
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			5			3			6		
Jumlah tiap kelompok			18											
3	Banyak Manfaat	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			1	2	2	2	2	4	-	2	-	1	2	2
			2	3	6	1	3	3	3	3	9	2	3	6
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			8			7			9		
Jumlah tiap kelompok			32											
4	Banyak sekali Manfaatnya	6	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-
			1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			4	3	12	5	3	15	4	3	12	5	3	15
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			15			17			15		
Jumlah tiap kelompok			64											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.10 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 3 responden yang beranggapan keterlibatan masyarakat tidak ada manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- Dari 2 responden yang beranggapan keterlibatan masyarakat sedikit manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci

- tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi sangat rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- c. Dari 3 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat banyak manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- d. Dari 6 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat banyak sekali manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi terhadap persepsi manfaat keterlibatan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana yang ada. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya tingkat peran serta masyarakat untuk hadir dalam pertemuan dan kegiatan fisik yang ada serta keaktifan untuk membayar iuran yang telah disepakati. Mengenai keaktifan berdiskusi tidak ada pola tertentu dan ada kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih dominan.

#### **4. Hubungan antara karakteristik prasarana dengan tingkat peran serta**

Kondisi prasarana akan mampu mempengaruhi kinerjanya untuk dapat mendukung aktifitas masyarakat. Kebutuhan akan prasarana bagi aktifitas masyarakat ini akan mempengaruhi sikap masyarakat tersebut terhadap kondisi prasarana yang ada. Walaupun telah dibangun prasarana yang bagus, apabila masyarakat kurang membutuhkan maka tidak

akan ada usaha dari masyarakat untuk mengelolanya. Tetapi walaupun kondisi prasarananya buruk, apabila masyarakat sangat membutuhkan maka prasarana tersebut akan tetap dipakai dan masyarakat akan berusaha untuk merawat dan memperbaikinya.

TABEL V.11.  
HUB. KONDISI PRASARANA DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW I (REDEVELOPMENT)

No	Karakteristik Prasarana	Jml Respond	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	Tidak berfungsi karena banyak rusak	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			1	2	2	2	2	4	1	2	2	1	2	2
			1	3	3	-	3	-	1	3	3	1	3	3
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			5			4			5		
Jumlah tiap kelompok			19											
2	Berfungsi tetapi banyak rusak	4	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-
			3	2	6	3	2	6	3	2	6	4	2	8
			-	3	-	1	3	3	-	3	-	-	3	-
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			7			9			7		
Jumlah tiap kelompok			31											
3	Berfungsi dgn baik dan hanya sebagian kecil yg rusak	8	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-
			3	2	6	4	2	8	1	2	2	5	2	10
			5	3	15	3	3	9	7	3	21	3	3	9
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap variabel			21			18			23		
Jumlah tiap kelompok			81											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.11 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 2 responden yang menyatakan bahwa prasarana yang telah dibangun tidak berfungsi karena banyak yang rusak memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

- b. Dari 4 responden yang menyatakan bahwa prasarana yang telah dibangun berfungsi walaupun banyak yang rusak memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- c. Dari 8 responden yang menyatakan bahwa prasarana yang telah dibangun berfungsi dan hanya sedikit yang rusak memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian diatas maka secara keseluruhan semakin baik kondisi suatu prasarana maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat yang terjadi. Tetapi kalau diperhatikan lebih jauh maka tingkat peran serta masyarakat yang memiliki bobot terendah ada pada kelompok yang menyatakan bahwa prasarana berfungsi tetapi banyak rusak. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan prasarana sepanjang masih bisa digunakan belum mampu meningkatkan kepedulian penduduk tetapi bila kerusakan tersebut membuat prasarana menjadi tidak berfungsi maka timbul kepedulian penduduk untuk menanganinya.

#### **5.1.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW I (*Redevelopment*)**

Berdasarkan pertanyaan terbuka yang diajukan pada warga maka secara umum hambatan yang berasal dari masyarakat untuk berperan serta adalah kemampuan ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, kurang rasa memiliki, prasarana yang ada telah rusak, takut dimintai pajak, masalah kerukunan dan masalah pekerjaan.

Kesadaran warga untuk memelihara prasarana di lingkungannya masih sangat kurang terbukti peralatan seperti tiang lampu yang disiapkan untuk pemeliharaan terkadang

dicuri dan dari informasi yang diperoleh bahwa yang mencuri masih warga sekitar. Menurut Ketua RW kondisi tersebut dipicu karena mereka menganggap proyek peremajaan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan harapan mereka.

Untuk hambatan yang berasal dari pemerintah, menurut warga karena pembangunan yang dilaksanakan kurang tepat sasaran, pejabat (Pak Lurah) yang sudah dekat dengan warga ditugaskan di tempat lain dan kurangnya perhatian setelah pembangunan dan ada beberapa warga yang menganggap bahwa masyarakat telah membayar pajak/retribusi yang ada sehingga pemerintah selayaknya lebih aktif dalam membantu masyarakat untuk mengelola prasarana.

Menurut pengakuan beberapa pengurus lingkungan, perhatian pemerintah ini perlu untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran warga serta pemerintah lebih terbuka terhadap masalah yang dihadapi warga. Selama ini menurut mereka pemerintah hanya menekan pengurus di lingkungan tanpa kontribusi nyata memecahkan masalah yang ada. Seperti kasus di pondok boro dimana setelah proyek selesai tidak ada serah terima ke pengurus RW, melihat bangunan yang sudah mangkrak maka pengurus berusaha untuk merawat dan memperbaiki kondisi bangunan yang ada sampai mampu mendatangkan beberapa penyewa. Usaha ini ternyata kurang mendapat tanggapan positif dari pemerintah tetapi malahan meminta retribusi yang diperoleh pengurus dari penyewa.

## **5.2 Analisis Peran Serta Masyarakat di RW II-VI**

### **5.2.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW II-VI**

Walaupun secara umum bentuk peran serta masyarakat sama, dari hasil survey yang telah dilakukan maka bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana di RW II-VI pada beberapa kategori berbeda dengan bentuk peran serta masyarakat di RW I. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat dan perlakuan khususnya dalam peremajaan berbeda.

Secara lebih rinci bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan jalan dan saluran sebagian besar berupa tenaga yaitu (62%) kemudian dengan memberikan uang (16,5%) serta material (11,4%) dan dalam bentuk usulan (10,1%). Mengenai bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyumbang tenaga (58,2%) dan sebagian kecil menyumbang material (3,85%). Yang dimaksud sumbangan dalam pengelolaan sampah ini adalah sumbangan dalam kegiatan kebersihan lingkungan di luar RKK yang berupa retribusi uang karena dari pengamatan di lapangan maka sampah yang ada di lingkungan hunian sebagian besar tidak terjangkau oleh pelayanan petugas kebersihan kota. Sehingga RKK bagi warga tidak lebih dianggap sebagai pajak yang harus disumbangkan karena tidak berpengaruh pada pelayanan pembuangan sampah.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan jalan dan saluran adalah dalam bentuk kerja bakti massal (82,3%) yang dilakukan secara bersama-sama dalam lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam rapat warga. Dalam hal ini tidak ada keinginan warga untuk melakukannya dengan mengupah seseorang.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan sampah sama dengan pada jalan dan saluran yaitu dalam bentuk kerja bakti massal (63,3%) tetapi dalam hal ini telah ada keinginan warga untuk mulai melaksanakannya di lingkungan tempat tinggal masing-masing dalam waktu bersamaan (16,5%) dan yang memilih waktu kapan saja sesuai kebutuhan hanya (10,1%) serta dengan mengupah seseorang (10,1%).

Mengenai bentuk peran serta berdasarkan frekuensi kegiatan bersama yang telah dilakukan maka sebagian besar warga rata-rata melakukannya sebulan sekali (50%) dan hanya sebagian kecil yang melakukannya kurang dari sebulan sekali (5%). Kegiatan bersama tersebut dilaksanakan rutin dengan waktu sama dan tempat yang tidak sama atau sebaliknya dimana pelaksanaannya untuk tingkat RW sebagian besar diwakili sebagian warga (44,3%). Untuk tingkat RT berdasarkan hasil wawancara dihadiri langsung oleh seluruh warga. Dalam hal ini bentuk peran serta warga berdasarkan cara keterlibatan untuk

tingkat RW cenderung dalam bentuk peran serta tak langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung. Dan pada akhirnya berdasarkan derajat kesukarelaan maka bentuk peran serta yang terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam partisipasi bebas karena sebagian besar warga merasa keterlibatan mereka dilaksanakan tanpa paksaan sama sekali (89,9%) dan yang merasa terpaksa hanya sebagian kecil saja (2,5%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.12.

TABEL V.12.  
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Bentuk Peran Serta	Skala Penilaian	RW II-VI	
			Frekuensi	%
1	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan jalan & saluran	Tenaga	49	62
		Material	9	11,4
		Uang	13	16,5
		Usulan/pikiran	8	10,1
2	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan sampah	Tenaga	46	58,2
		Material	3	3,8
		Uang	23	19,1
		Usulan/pikiran	7	8,9
3	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan jalan & saluran	Kerja bakti massal	65	82,3
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	8	10,1
		Di lingk. masing2 kapan saja	6	7,6
		Mengupah seseorang	-	-
4	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan sampah	Kerja bakti massal	50	63,3
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	13	16,5
		Di lingk. masing2 kapan saja	8	10,1
		Mengupah seseorang	8	10,1
5	Jumlah kegiatan dlm satu bulan	≥ 3 x sebulan	16	20,3
		2 x sebulan	24	30,4
		1 x sebulan	35	44,3
		<1 x sebulan	4	5
6	Rutinitas kegiatan	Rutin, waktu & tempat sama	3	3,7
		Rutin, waktu atau tempat tdk sama	45	57
		Rutin, waktu dan tempat tdk sama	18	22,8
		Tidak rutin, sesuai kebutuhan	13	16,5
7	Sifat kehadiran	Datang sendiri	14	17,7
		Diwakili sebagian warga	35	44,3
		Diwakili pengurus RT	7	8,9
		Diwakili ketua RT	23	29,1
8	Derajat kesukarelaan	Tidak terpaksa sama sekali	71	89,9
		Sedikit terpaksa	2	2,5
		Terpaksa	4	5,1
		Sangat terpaksa	2	2,5

Sumber : Data primer diolah, 2003

### 5.2.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat RW II-VI

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan derajat keterlibatan masyarakat atau warga masyarakat dalam setiap kegiatan bersama yang dilaksanakan untuk mengelola prasarana yang telah ada pasca peremajaan lingkungan permukiman. Derajat keterlibatan warga masyarakat tersebut diukur dengan pemikiran semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan sumbangan dana atau iuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL V.13.  
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	NxBobot	Jumlah dlm Tiap Variabel
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Sangat Tinggi	10	4	40	214
		Tinggi	40	3	120	
		Rendah	25	2	50	
		Sangat Rendah	4	1	4	
2	Tingkat keaktifan berdiskusi	Sangat Tinggi	6	4	24	206
		Tinggi	45	3	135	
		Rendah	19	2	38	
		Sangat Rendah	9	1	9	
3	Tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik	Sangat Tinggi	12	4	48	231
		Tinggi	52	3	156	
		Rendah	12	2	24	
		Sangat Rendah	3	1	3	
4	Tingkat keaktifan membayar iuran / sumbangan yg telah disepakati bersama	Sangat Tinggi	5	4	20	210
		Tinggi	50	3	150	
		Rendah	16	2	32	
		Sangat Rendah	8	1	8	
Jumlah					861	861

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari Tabel V.13 tersebut berdasarkan tingkat kehadiran dalam pertemuan maka dari 79 responden 40 responden (50,6%) mengaku tingkat kehadirannya tinggi dalam pertemuan, 25 responden (31,6%) tingkat kehadirannya rendah, 10 responden (12,7%) tingkat kehadirannya sangat tinggi dan 4 responden tingkat kehadirannya sangat rendah.

Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi (57%) dan hanya sebagian kecil responden (7,5%) yang memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang sangat tinggi sedangkan sisanya memiliki tingkat berdiskusi yang rendah (24,1%) dan sangat rendah (11,4%).

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden memiliki tingkat kehadiran yang tinggi (65,8%) dan sebagian kecil responden yang memiliki tingkat kehadiran yang sangat rendah (3,8%) sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi (15,2%) dan rendah (15,2%).

Mengenai tingkat keaktifan dalam membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama maka dari 79 responden 50 responden (63,3%) memiliki tingkat keaktifan tinggi, 16 responden (20,3%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang rendah, 8 responden (10,1%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang sangat rendah dan 5 responden (6,3%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang sangat tinggi.

Mengenai penentuan kategori tingkat peran serta diperhitungkan seperti berikut, nilai terendah adalah  $4 \times 79 = 316$  dan nilai tertinggi adalah  $16 \times 79 = 1264$ . Bila ada 4 interval maka jarak intervalnya adalah  $(1264 - 316) / 4 = 237$ . Maka,

- Sangat tinggi bila memiliki skor            1027 - 1264
- Tinggi bila memiliki skor                    790 - 1027
- Rendah bila memiliki skor                   553 - 790
- Sangat rendah bila memiliki skor           316 - 553

Sehingga bila total skor RW II-VI adalah 861 maka secara keseluruhan tingkat peran serta masyarakat dalam kawasan yang telah diremajakan secara umum termasuk kategori tingkat peran serta tinggi.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan variabelnya, dari data-data tersebut diatas maka peran serta masyarakat yang paling tinggi adalah dalam kegiatan fisik yang mencapai jumlah Nx bobot tertinggi (231) dan yang paling rendah adalah dalam tingkat keaktifan berdiskusi yang memiliki jumlah Nx bobot terkecil (206).

### **5.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat**

Sebagaimana diuraikan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh yang dimaksudkan disini sesuai dengan tinjauan teori yaitu faktor internal yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana.

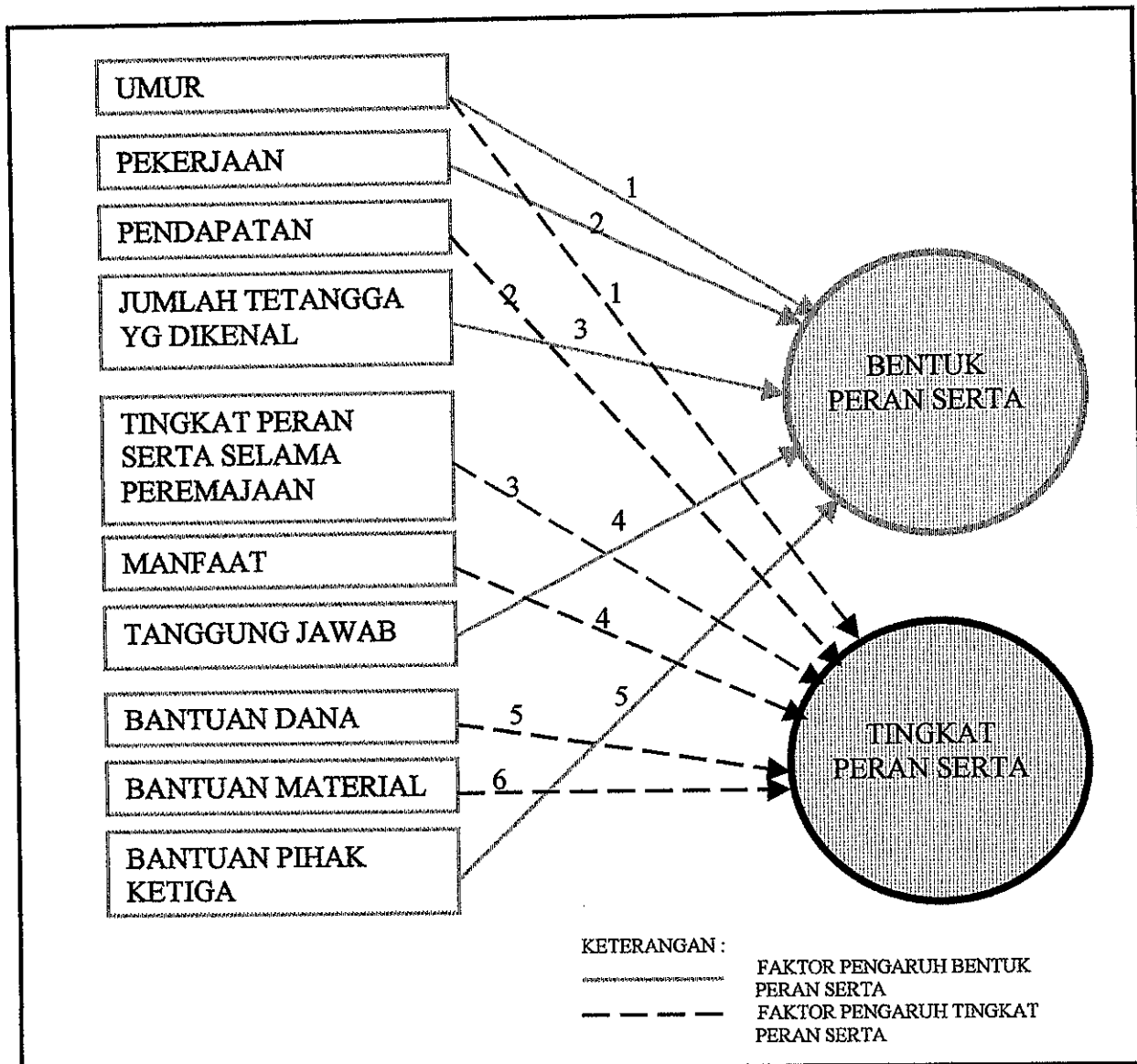
Untuk mengetahui hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan uji statistik dengan menggunakan tabulasi silang atau *crosstab* dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan nilai *chi square*. Dengan taraf signifikansi 0,05 maka dapat diperoleh Tabel V.14.

TABEL V.14.  
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE RW II-VI

Kode	Soal	Variabel	Bentuk Peran Serta	Tingkat Peran Serta
F1	A1	Umur	13,808	17,024
F2	A2	Pendidikan	6,027	10,028
F3	A3	Pekerjaan	26,786	26,036
F4	A4	Pendapatan	9,022	26,731
F5	A5	Lama Tinggal	4,045	6,441
F6	A6	Status hunian	0,847	8,311
F7	D1	Jumlah tetangga yg dikenal	16,863	12,641
F8	D2	Bentuk Sumbangan dlm peremajaan	12,165	11,882
F9	D7	Tingkat peran serta dlm peremajaan	14,714	24,951
F10	D10	Kesesuaian rencana peremajaan	16,983	11,652
F11	D11	Kesesuaian hasil pelaksanaan peremajaan	11,881	9,682
F12	D12	Manfaat peran serta	28,219	17,932
F13	D13	Tanggung jawab pengelolaan prasarana	16,848	16,922
F14	D14	Kehadiran pemimpin	4,023	7,384
F15	D15	Kemampuan pemimpin memberi arahan	12,099	6,760
F16	D16	Dukungan warga pada pemimpin	3,962	5,328
F17	D17	Pemberian penyuluhan & pembinaan dari Pemrinth	22,151	15,545
F18	D18	Bantuan dana dari Pemerintah	8,550	20,081
F19	D19	Bantuan material dari Pemerintah	9,843	21,836
F20	D20	Besarnya bantuan bila diberikan	9,746	13,526
F21	D21	Bantuan pihak ketiga	15,000	3,409
F22	D22	Karakteristik prasarana	5,867	3,354

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan uji koefisien kontingensi seperti pada lampiran maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa bentuk peran serta masyarakat di RW II-VI dipengaruhi oleh umur, pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal, kesesuaian rencana peremajaan, tanggung jawab pengelolaan prasarana dan bantuan pihak ketiga. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, pendapatan, tingkat peran serta dalam peremajaan, manfaat peran serta, bantuan dana dan bantuan dari Pemerintah. Untuk memperjelas hubungan tersebut dapat dilihat Gambar 5.3.



GAMBAR 5.3.  
FAKTOR YG BERPENGARUH PADA BENTUK &  
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI  
*Sumber : Data primer diolah, 2003*

### 5.2.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat

#### 1. Hubungan antara umur dengan bentuk peran serta

Seperti juga di RW I maka faktor usia juga mempengaruhi bentuk peran serta di RW II-VI. Dalam hal ini ada kemungkinan beberapa perbedaan bentuk peran serta karena komposisi kelompok usia yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.15.

TABEL V.15.  
HUB. UMUR DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Umur	Jumlah respdn	bentuk sumbng pd jin & sal (%)	bentuk sumbng pd sampah (%)	bentuk kegiatan pd jin & sal (%)	bentuk kegiatan pd sampah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpalsaan (%)
1	20-30 tahun	12	usulan uang material tenaga	0 25 8.33 66.7	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 8.33 8.33 8.33	0 15.7 41.7 8.33 50	0 Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	0 0 8.33 91.7
2	31-40 tahun	35	usulan uang material tenaga	17.1 8.57 28.6 5.71	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 8.57 14.3 77.1	16 12 28 44	11.4 37.1 37.1 14.3	17.1 Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	5.71 8.57 0 85.7
3	41-50 tahun	20	usulan uang material tenaga	0 30 0 70	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 0 10 90	0 45 45 10	0 Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	0 5 0 95
4	>50 tahun	12	usulan uang material tenaga	8.33 58.3 0 33.3	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	0 8.33 0 91.7	16.7 66.7 16.7 16.7	0 Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	0 0 8.33 8.33

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah

Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.15. diatas maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 12 responden yang berumur 20-30 tahun menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga sisanya berupa uang. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan tiga kali sebulan (50%) dan sekali sebulan (41,7%) serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 35 responden yang berumur 31-40 tahun menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan atau dua kali sebulanserta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- c. Dari 20 responden yang berumur 41-50 tahun menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali atau dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- d. Dari 12 responden yang berumur 50 tahun keatas menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Berdasarkan kajian diatas, semakin tinggi umur warga semakin besar peluang diberikannya bentuk sumbangan berupa tenaga pada jalan dan saluran, sedangkan pada

sampah semakin besar peluang disumbanginya bentuk sumbangan berupa uang. Dalam hal ini peluang terbesar sumbangan tenaga pada sampah ada pada kelompok umur 20-30 tahun.

Mengenai bentuk kegiatan, semakin tinggi umur warga maka peluang terjadinya kerja bakti pada jalan dan saluran semakin besar. Sedangkan pada sampah, peluang terjadinya kerja bakti ada pada kelompok umur 20-30 tahun.

Untuk jumlah pertemuan, peluang dilakukannya pertemuan sekali sebulan ada pada kelompok umur >50 tahun, dilakukannya pertemuan 1 kali atau 2 kali sebulan ada pada kelompok umur 41-50 tahun dan pertemuan dilakukan 3 kali sebulan ada pada kelompok umur 20-30 tahun.

Sedangkan dalam hal rutinitas kegiatan, peluang dilakukannya kegiatan secara rutin dengan waktu sama dan tempat berbeda atau waktu berbeda dan tempat sama berada pada kelompok umur 20-30 tahun. Dalam hal ini semakin tinggi umur semakin kecil keinginan warga untuk hadir secara langsung dalam pertemuan yang diadakan.

Dari hal tersebut asumsi yang selama ini berkembang yaitu semakin tinggi umur maka keinginannya untuk menyumbangkan tenaga semakin berkurang dan cenderung pada sumbangan pemikiran dengan hadir dalam pertemuan yang diadakan tidak semuanya benar. Ketidaksesuaian asumsi ini juga didukung dengan kenyataan bahwa keinginan terbesar untuk mengadakan pertemuan ada kelompok umur 21-30 tahun bukan pada umur 50 tahun ke atas. Dalam hal ini masing-masing kelompok umur memiliki pengaruh dominan pada bentuk peran serta yang berbeda-beda.

## **2. Hubungan antara jenis pekerjaan dengan bentuk peran serta**

Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan antara dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang.

Pada umumnya kegiatan bersama berupa pertemuan atau kerja bakti dilakukan oleh masyarakat pada waktu-waktu luang misalnya untuk kegiatan pertemuan dilakukan di malam hari atau untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dilakukan di hari-hari libur kerja. Tetapi bagi warga yang harus bekerja hingga larut malam atau memiliki jam kerja yang tidak tetap akan mempengaruhi kesempatannya untuk berperan aktif dalam kegiatan bersama tersebut. Selain itu untuk pekerjaan yang menuntut intensitas seseorang untuk terus bekerja tiap-tiap hari tanpa ada hari libur tertentu akan berpengaruh pula pada derajat keaktifan seseorang dalam kegiatan bersama.

Jenis pekerjaan sedikit banyak berpengaruh pula pada pola pikir dan tingkah laku seseorang. Orang yang bekerja sebagai penarik becak tentunya akan memiliki pola pikir dan tingkah laku yang berbeda dibandingkan dengan orang yang bekerja di kantor atau pekerjaan lainnya. Selain itu orang yang biasa bekerja bersama-sama dengan orang lain tentunya akan berbeda pola pikir dan tingkah lakunya dengan orang yang biasa bekerja sendiri. Dari hal-hal tersebut maka pada akhirnya jenis pekerjaan seseorang juga mempengaruhi keinginan bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V.16.

TABEL V.16.  
HUB. JENIS PEKERJAAN DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Jenis pekerjaan	Jumlah responden	bentuk sumbng pd jln & sal (%)	bentuk sumbng pd sampat (%)	bentuk kegiatan pd jln & sal (%)	bentuk kegiatan pd sampat (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksaaan (%)
1	PNS/ABK I	12	usulan uang material tenaga	25 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 0 0 100	<1x 1x 2x >3x	0 8.33 16.7 16.7	0 0 0 0	0 0 8.33 91.7
2	Pensiunan	3	usulan uang material tenaga	0 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 0 0 0	<1x 1x 2x >3x	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3	Pegawai swasta	13	usulan uang material tenaga	15.4 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 7.69 0 66.7	<1x 1x 2x >3x	7.69 53.8 23.1 15.4	0 0 0 0	0 7.69 0 92.3
4	Buruh	15	usulan uang material tenaga	0 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 6.67 0 73.3	<1x 1x 2x >3x	0 33.3 26.7 60	0 0 0 0	0 66.7 56.7 13.3
5	Pedagang	7	usulan uang material tenaga	0 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 0 0 85.7	<1x 1x 2x >3x	0 0 0 0	0 0 0 0	0 14.3 0 85.7
6	Wiraswasta	20	usulan uang material tenaga	0 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 15 15 70	<1x 1x 2x >3x	0 5 35 20 40	0 0 0 0	0 10 5 45 85
7	Belum bekerja	9	usulan uang material tenaga	22.2 uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 0 0 0	<1x 1x 2x >3x	0 22.2 33.3 44.4	0 0 0 0	0 0 33.3 22.2

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing terdiri terpisah

Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.16. maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 12 responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

Dari 3 responden yang berstatus sebagai pensiunan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa material serta pada persampahan berupa uang bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh pengurus RT untuk tingkat RW.

- b. Dari 13 responden yang bekerja sebagai pegawai kantor swasta menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa uang atau usulan serta pada persampahan berupa uang dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda serta dihadiri langsung oleh warga untuk tingkat RW.
- c. Dari 15 responden yang bekerja sebagai buruh menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW .
- d. Dari 7 responden yang bekerja sebagai pedagang menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa tenaga serta pada persampahan berupa uang dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan dengan tidak rutin sesuai kebutuhan serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW.
- e. Dari 20 responden yang bekerja sebagai wiraswasta menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan

dilakukan tiga kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

- f. Dari 9 responden yang belum mendapatkan kerja tetap menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan tiga kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW.

Berdasarkan kajian di atas maka rata-rata bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan prasarana berbentuk tenaga dengan bentuk kegiatan kerja bakti serta melakukan pertemuan secara rutin. Tetapi khusus untuk warga yang bekerja sebagai pegawai swasta memiliki keinginan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa usulan atau uang. Sedangkan dalam pengelolaan sampah warga yang berprofesi sebagai pegawai swasta, pensiunan dan pedagang menginginkan bentuk sumbangan juga berupa uang.

Selain itu khusus untuk pedagang maka bentuk kegiatan dalam pengelolaan sampah berupa kerja bakti atau melaksanakan sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing kapan saja atau dalam waktu yang bersamaan. Para pedagang ini sebagian besar juga memilih bentuk pertemuan yang tidak rutin sesuai kebutuhan, yang berbeda dengan kelompok mata pencaharian lain yang cenderung memilih pertemuan dilakukan rutin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa warga yang bekerja dengan jadwal kerja padat seperti pegawai kantor swasta memiliki kecenderungan besar untuk berperan serta dalam pengelolaan prasarana dengan menyumbangkan uang. Dalam hal ini tidak seperti yang biasa terjadi, warga yang berprofesi sebagai PNS/ABRI atau pensiunan berdasarkan prosentase responden tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menentukan bentuk peran serta seperti yang diharapkan, misalnya dari jumlah pertemuan yang dilakukan maka keinginan bertemu dengan warga lain dalam pertemuan jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan warga dengan profesi lainnya.

### 3. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok kepentingan yang akan dilayani oleh adanya peran serta tersebut. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal oleh seseorang maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada bentuk peran serta.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 6 responden yang kenal < 25% tetangga menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa tenaga atau uang serta persampahan berupa uang dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti serta pada sampah mengerjakan sendiri di lingkungan tempat tinggal sendiri-sendiri atau dengan mengupah seseorang. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 24 responden yang kenal 25%-50% tetangga menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta sampah berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- c. Dari 24 responden yang kenal 50%-75% tetangga menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan tiga kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

- d. Dari 25 responden yang mengenal >75% tetangga menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat sama atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka peluang terjadinya kerja bakti dan adanya bentuk sumbangan berupa tenaga dalam pengelolaan prasarana semakin besar,

Mengenai jumlah pertemuan, peluang dilakukannya pertemuan 2 kali sebulan ada pada warga yang kenal <25% atau kenal >75% jumlah tetangga dan peluang dilakukannya pertemuan 1 kali sebulan ada pada warga yang kenal 25%-50% tetangga. Dalam hal ini peluang dilakukannya pertemuan 3 kali sebulan ada pada warga yang kenal 50%-75% tetangga.

Warga yang kenal >75% tetangga memiliki keinginan besar untuk melakukan kegiatan secara rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau tempat sama waktu berbeda. Dan warga yang kenal <25% dalam pertemuan RW paling banyak mengharapkan diwakili oleh ketua RT dimana berdasarkan hasil wawancara untuk tingkat RT biasanya dihadiri warga secara langsung. Dalam hal ini pada tingkat RW cenderung berbentuk peran serta tak langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan antara jenis pekerjaan dengan bentuk peran serta maka dapat dilihat pada Tabel V.17.

TABEL V.17.  
 HUB. JUMLAH TETANGGA YG DIKENAL  
 DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

no	Jumlah tetangga yg dikenal	Jumlah respon	bentuk sumbng pd jln & sal (%)	bentuk sumbng pd smpah (%)	bentuk kegiatan pd jln & sal (%)	bentuk kegiatan pd sampah (%)	Bentuk kegiatan pd sampah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksaan (%)
1	<25%	6	usulan uang material tenaga	0 66.7 0	0 33.3 0	0 33.3 0	0 33.3 0	<1x 1x 2x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda	0 0 0	Sangat Terpaksa Terpaksa Hampir tdk
2	25%-50%	24	usulan uang material tenaga	25 8.33 12.5 37.5	0 29.2 8.33 75	0 12.5 12.5 75	0 20.8 20.8 54.2	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 50 29.2 20.8	Sangat Terpaksa Terpaksa Hampir tdk Tidak terpaksa
3	50%-75%	24	usulan uang material tenaga	0 16.7 4.17 79.2	0 8.33 8.33 4	0 8.33 8.33 79.2	0 12.5 16.7 70.8	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	8.33 33.3 16.7 41.7	Sangat Terpaksa Terpaksa Hampir tdk Tidak terpaksa
4	>75%	25	usulan uang material tenaga	4 24 0 72	0 20 80	0 0 20 80	4 8 16 72	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	8 40 48 4	Sangat Terpaksa Terpaksa Hampir tdk Tidak terpaksa

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah

Sumber : Data Primer diolah, 2003

#### 4. Hubungan antara persepsi tanggung jawab pengelolaan prasarana dengan bentuk peran serta

Seperti halnya persepsi terhadap manfaat dilaksanakannya kegiatan peran serta maka kesamaan pandangan tanggung jawab terhadap kondisi prasarana lingkungan juga berpengaruh terhadap keikutsertaan seseorang dalam pengelolaannya. Seseorang yang memiliki persepsi bahwa tanggung jawab kondisi prasarana lingkungannya merupakan tanggung jawab masyarakat bersama-sama, tentunya akan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam mengelola prasarana tersebut dibandingkan dengan seseorang yang memiliki persepsi bahwa kondisi prasarana yang ada di lingkungannya merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 10 responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab pengelolaan prasarana ada pada Pemerintah dibantu masyarakat menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa usulan dan uang serta persampahan berupa usulan. Mengenai bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh seluruh warga untuk tingkat RW dan RT.
- b. Dari 53 responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab pengelolaan prasarana ada pada masyarakat dibantu Pemerintah menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW.
- c. Dari 16 responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab pengelolaan prasarana ada pada masyarakat menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta

dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW.

Berdasarkan dari kajian diatas maka dapat disimpulkan semakin tinggi tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan prasarana maka semakin tinggi pula bentuk sumbangan dalam berperan serta berupa tenaga dan semakin besar keinginan bekerja bakti dalam pengelolaan jalan dan saluran. Sedangkan bentuk kegiatan kerja bakti pada sampah semakin berkurang. Selain itu keinginan untuk mengadakan pertemuan tiga kali sebulan semakin tinggi tetapi dengan rutinitas semakin berkurang.

Sementara itu khusus untuk kegiatan pengelolaan sampah kenyataan yang ada berbanding terbalik dengan asumsi. Keinginan bentuk kegiatan kerja bakti prosentase paling banyak dipilih warga yang beranggapan pengelolaan prasarana berada ditangan Pemerintah dibantu masyarakat dan prosentase yang terkecil pada warga yang beranggapan tanggung jawab ada pada masyarakat.

Dari kenyataan tersebut, mengenai bentuk kegiatan dalam pengelolaan sampah maka keinginan warga yang beranggapan bahwa tanggung jawab ada ditangan masyarakat relatif kecil prosentasenya menunjukkan adanya permasalahan berkaitan dengan pengelolaan sampah selama ini. Dari hasil wawancara maka diperoleh informasi bahwa walaupun warga telah membayar RKK tetapi sampah yang ada di sebagian besar daerah tidak diambil oleh petugas Pemerintah yang membuat sebagian warga kecewa. Di sisi lain keaktifan petugas untuk mengambil sampah di TPS mampu mendorong warga untuk mengelola sampah dan dikumpulkan ke TPS tersebut. Secara lebih detail mengenai hasil survei responden tersebut dapat dilihat pada Tabel V.18 berikut ini.

TABEL V.18.  
 HUB. PERSEPSI TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PRASARANA  
 DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Persepsi tanggung jawab	Jumlah respon	bentuk sumbng pd jln & sal (%)	bentuk sumbng pd sampah (%)	bentuk kegiatan pd jln & sal (%)	bentuk kegiatan pd sampah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksaan (%)
1	Pemerintah membantu masyarakat	10	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	<1x 1x 2x >3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama trnpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaks Terpaks Hampir tdk Tidak terpaksa
2	Masyarakat membantu Pemerintah	53	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	<1x 1x 2x >3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama trnpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaks Terpaks Hampir tdk Tidak terpaksa
3	Masyarakat	16	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	<1x 1x 2x >3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama trnpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaks Terpaks Hampir tdk Tidak terpaksa

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdirinya

Sumber : Data Primer diolah, 2003

## 5. Hubungan antara bantuan pihak ketiga dengan bentuk peran serta

Kondisi masyarakat dengan segala kesederhanaan dan keterbatasannya (wawasan, teknologi, dan ekonomi), masih memerlukan upaya-upaya pengarahan, pendampingan dan pembinaan. Sehingga selain peran Pemerintah maka peran serta masyarakat dipengaruhi pula oleh adanya peran pihak ketiga. Pengertian pihak ketiga sebagai pendamping disini adalah kelompok yang selama ini sejak lama terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik dilakukan oleh LSM, Yayasan Sosial, LPM-Universitas/Perguruan Tinggi, Koperasi dan bahkan perseroan (PT/CV). Secara lebih spesifik peran penting lembaga-lembaga ini dalam pengelolaan prasarana adalah sebagai mediator, konsultan dan terkadang sebagai manajer proyek sehingga mampu mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 43 responden yang mengaku tidak ada bantuan pihak ketiga selama pengelolaan prasarana menginginkan bentuk sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 9 responden yang mendapatkan bantuan pihak ketiga dengan meminta tetapi jaran diberikan menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- c. Dari 22 responden yang mendapatkan bantuan pihak ketiga dengan meminta terlebih dahulu menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja

bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali atau dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya serta dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

d. Dari 5 responden yang mendapatkan bantuan pihak ketiga tanpa ada permintaan terlebih dahulu menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran berupa tenaga serta pada persampahan berupa uang dan bentuk kegiatan pengelolaan jalan dan saluran berupa kerja bakti serta pada sampah dengan mengupah seseorang. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali atau dua kali sebulan serta dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Berdasarkan kajian diatas maka masing-masing bantuan dari pihak ketiga memberikan dampak yang berbeda-beda pada bentuk peran serta walaupun secara umum dapat dikatakan bentuk peran serta yang terjadi tidak banyak mengalami perubahan. Secara lebih mendalam maka pada bentuk sumbangan pengelolaan sampah, bila bantuan diberikan tanpa diminta oleh masyarakat terlebih dahulu maka sumbangan warga akan berupa uang bukan berupa tenaga seperti yang diharapkan. Tetapi pada jalan dan saluran bentuk sumbangan yang diberikan berupa tenaga sedangkan pada sampah sumbangan tenaga diberikan warga bila bantuan diperoleh dengan permintaan masyarakat terlebih dahulu.

Untuk kegiatan pengelolaan maka peluang terjadinya bentuk kerja bakti terjadi bila bantuan tersebut diminta tetapi jarang diberikan, dalam hal ini dapat berupa stimulan saja. Serta peluang terjadinya frekuensi pertemuan dua kali sebulan, dapat dilakukan rutin serta dihadiri oleh sebagian warga dapat terjadi bila bantuan pihak ketiga diberikan tanpa adanya permintaan dari masyarakat terlebih dahulu.

Mengenai hasil survei responden yang menunjukkan hubungan antara pemberian bantuan pihak ketiga dengan bentuk peran serta maka secara lebih detail dapat dilihat pada

TABEL V.19.  
HUB. PERAN PIHAK KETIGA DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DIRW II-VI

no	Peran pihak ketiga	Jumlah respon	bentuk sumbgn pd jin & sal (%)	bentuk sumbgn pd samпах (%)	bentuk kegiatan pd jin & sal (%)	bentuk kegiatan pd samпах (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksaaan (%)
1	Tidak ada	43	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaksaa Terpaksaa Hampir tdk Tidak terpaksaa
2	Meminta jarang diberi	9	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaksaa Terpaksaa Hampir tdk Tidak terpaksaa
3	Diberikan dgn meminta	22	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaksaa Terpaksaa Hampir tdk Tidak terpaksaa
4	Diberikan tanpa meminta	5	usulan uang material tenaga	usulan uang material tenaga	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	mengupah lingk kpn saja lingk bsrsm kerja bakti	<1x 1x 2x ≥3x	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	Sangat Terpaksaa Terpaksaa Hampir tdk Tidak terpaksaa

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdiri terpisah

Sumber : Data Primer diolah, 2003

### 5.2.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat

#### 1. Hubungan antara umur dengan tingkat peran serta

Seperti diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa faktor usia merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan derajat keterlibatan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan prasarana. Demikian pula dengan warga di RW II-VI berdasarkan hasil analisis tabulasi silang, faktor usia berpengaruh pada peran serta masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.20.

TABEL V.20.  
HUB. UMUR DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Umur	Jml Respond	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertentuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	20 – 30 tahun	12	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			5	2	10	4	2	8	1	2	2	2	2	4
			6	3	18	7	3	21	9	3	27	10	3	30
			1	4	4	1	4	4	2	4	8	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			32			33			37		
Jumlah tiap kelompok			136											
2	31 – 40 tahun	35	-	1	-	3	1	3	-	1	-	5	1	5
			9	2	18	7	2	14	4	2	8	6	2	12
			21	3	63	21	3	63	23	3	69	20	3	60
			5	4	20	4	4	16	8	4	32	4	4	16
			Jumlah tiap aspek			101			96			109		
Jumlah tiap kelompok			399											
3	41 – 50 tahun	20	2	1	2	4	1	4	3	1	3	2	1	2
			8	2	16	5	2	10	4	2	8	5	2	10
			9	3	27	11	3	33	13	3	39	13	3	39
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			49			47			50		
Jumlah tiap kelompok			197											
4	lebih dari 50 tahun	12	2	1	2	2	1	2	-	1	-	1	1	1
			3	2	6	3	2	6	3	2	6	3	2	6
			5	3	15	7	3	21	7	3	21	8	3	24
			2	4	8	-	4	-	2	4	8	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			31			29			35		
Jumlah tiap kelompok			126											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.20 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 12 responden yang berumur 20-30 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- b. Dari 35 responden yang berumur 31- 40 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- c. Dari 20 responden yang berumur 41-50 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- d. Dari 12 responden yang berumur lebih dari 50 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan bahwa anggapan semakin tinggi umur seseorang maka semakin tinggi tingkat peran sertanya dalam pertemuan dan pada kegiatan fisik semakin berkurang tidak selamanya benar. Yang terjadi adalah semakin menurunnya

tingkat keaktifan berdiskusi warga. Sementara itu tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik dan membayar iuran semuanya masuk kategori tingkat peran serta tinggi.

Dalam hal ini semua kelompok umur menunjukkan tingkat peran serta yang tinggi kecuali untuk kelompok umur 41-50 tahun memiliki tingkat peran serta rendah. Kondisi pada kelompok umur 41-50 tahun ini didukung dengan rendahnya tingkat kehadiran dalam pertemuan dan keaktifan berdiskusi.

## **2. Hubungan antara pendapatan dengan tingkat peran serta**

Tingkat pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan. Tingginya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Secara logis dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai penghasilan yang lebih tentunya akan dengan senang hati memberikan sedikit dari hasil jerih payahnya untuk sekedar bergotong-royong untuk pembiayaan pembangunan. Akan tetapi lain halnya apabila ternyata penghasilan mereka terbatas atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menjadi beban yang sangat berat bagi mereka untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk pembangunan. Hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat peran serta di RW II-VI berdasarkan hasil survei primer secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel V.21.

TABEL V.21.  
HUB. TINGKAT PENDAPATAN  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Pendapatan rata-rata tiap bulan	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	< Rp. 400.000,-	19	-	1	-	1	1	1	-	1	-	3	1	3
			6	2	12	6	2	12	-	2	-	2	2	4
			8	3	24	10	3	30	13	3	39	12	3	36
			5	4	20	12	4	8	6	4	24	2	4	8
	Jumlah tiap aspek		56			51			63			51		
	Jumlah tiap kelompok		221											
2	Rp. 400.000,- - Rp 800.000,-	37	3	1	3	2	1	2	1	1	1	-	1	-
			4	2	8	6	2	12	6	2	17	6	2	12
			27	3	81	27	3	81	24	3	72	28	3	84
			3	4	12	2	4	8	6	4	24	3	4	12
	Jumlah tiap aspek		104			103			109			108		
	Jumlah tiap kelompok		424											
3	Rp. 800.000,- - Rp 1.200.000,-	19	1	1	1	6	1	6	2	1	2	5	1	5
			11	2	22	4	2	8	3	2	6	5	2	10
			5	3	15	7	3	21	14	3	42	9	3	27
			2	4	8	2	4	8	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		46			43			50			42		
	Jumlah tiap kelompok		181											
4	> Rp. 1.200.000,-	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			4	2	8	4	2	8	4	2	8	3	2	6
			-	3	-	-	3	-	-	3	-	1	3	3
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		8			8			8			9		
	Jumlah tiap kelompok		33											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.21 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 19 responden yang berpendapatan kurang dari Rp 400.000,- memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

- b. Dari 37 responden yang berpendapatan antara Rp 400.000,- sampai Rp 800.000,- memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- c. Dari 19 responden yang berpendapatan antara Rp. 800.000,- sampai Rp. 1.200.000,- memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah . Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- d. Dari 4 responden yang berpendapatan lebih dari Rp. 1.200.000,- memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan kajian tersebut, asumsi bahwa semakin besar pendapatan maka kesempatan untuk berperan serta semakin tinggi yang pada akhirnya memperbesar peluang terjadinya peran serta ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Secara umum semakin tinggi pendapatan menunjukkan tingkat peran serta yang semakin menurun. Hal ini didukung oleh penurunan tingkat kehadiran dalam pertemuan, keaktifan berdiskusi, kehadiran dalam kegiatan fisik dan keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah ditetapkan bersama.



Berdasarkan Tabel V.22 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 8 responden yang memiliki tingkat peran serta rendah dalam peremajaan maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- b. Dari 46 responden yang memiliki tingkat peran serta tinggi dalam peremajaan maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- c. Dari 25 responden yang memiliki tingkat peran serta sangat tinggi dalam peremajaan maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama juga tinggi.

Berdasarkan dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok responden memiliki tingkat peran serta yang tinggi dalam pengelolaan prasarana. Tetapi kalau dilihat berdasarkan tingkat kehadiran maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat dalam peremajaan yang telah dilakukan maka semakin tinggi pula tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan. Hal ini dapat mengindikasikan semakin tinggi tingkat peran serta seseorang selama peremajaan maka semakin tinggi pula tingkat peran sertanya dalam pengelolaan prasarana yang diselenggarakan bersama.

#### 4. Hubungan antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dengan tingkat peran serta

Persepsi manfaat kegiatan mengandung penguat yang mendorong suatu tindakan dilakukan kembali atau tidak dilakukan lagi. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa persepsi seseorang terhadap manfaat akan mempengaruhi keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Mengenai hubungan tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel V.23.

TABEL V.23.  
HUB. PERSEPSI MANFAAT KEGIATAN PERAN SERTA  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	Tidak ada manfaat	2	2	1	2	2	1	2	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
			-	3	-	-	3	-	2	3	6	2	3	6
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		2			2			6			6		
	Jumlah tiap kelompok		18											
2	Sedikit manfaatnya	8	-	1	-	3	1	3	1	1	1	2	1	2
			6	2	12	2	2	4	2	2	4	5	2	10
			1	3	3	3	3	9	5	3	15	1	3	3
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		19			16			20			15		
	Jumlah tiap kelompok		70											
3	Banyak manfaat	44	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1	2
			13	2	26	13	2	26	9	2	18	7	2	14
			26	3	78	27	3	81	27	3	81	33	3	99
			3	4	12	3	4	12	6	4	24	2	4	8
	Jumlah tiap aspek		118			120			125			123		
	Jumlah tiap kelompok		486											
4	Banyak sekali manfaatnya	25	-	1	-	2	1	2	-	1	-	4	1	4
			2	2	4	3	2	6	-	2	-	3	2	6
			17	3	51	17	3	51	21	3	63	15	3	45
			6	4	24	3	4	12	4	4	16	3	4	12
	Jumlah tiap aspek		79			71			79			67		
	Jumlah tiap kelompok		296											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.23 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 2 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana tidak ada manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan

- prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi sangat rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- b. Dari 8 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana sedikit manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama rendah.
- c. Dari 44 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana banyak manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- d. Dari 25 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan prasarana banyak sekali manfaatnya memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap manfaat peran serta dalam pengelolaan maka semakin tinggi pula tingkat peran serta masyarakat. Hal ini didukung dengan semakin tingginya tingkat kehadiran dalam pertemuan, keaktifan berdiskusi dan dalam membayar iuran bersama. Sedangkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik relatif sama tinggi untuk semua kelompok warga.

### 5. Hubungan antara bantuan dana dari Pemerintah dengan tingkat peran serta

Warga masyarakat akan semakin terlibat dalam pengelolaan prasarana lingkungannya apabila ada suasana yang mendukung. Dukungan yang diharapkan oleh masyarakat adalah perhatian dari Pemerintah. Mereka dengan sukarela menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya apabila ada dukungan dan pengakuan dari Pemerintah. Pengakuan dan dukungan ini dapat berupa stimulan atau kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah dalam pengelolaan prasarana dimana wujudnya dapat berupa pemberian bantuan dana pembangunan. Hubungan antara pemberian bantuan dana dengan tingkat peran serta masyarakat dapat dilihat pada Tabel V.24.

TABEL V.24.  
HUB. PEMBERIAN DANA OLEH PEMERINTAH  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Pemberian bantuan oleh Pemerintah	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	Tidak ada	15	2	1	2	3	1	3	1	1	1	-	1	-
			6	2	12	-	2	-	2	2	4	1	2	2
			6	3	18	10	3	30	9	3	27	14	3	42
			1	4	4	2	4	8	3	4	12	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			36			41			44		
Jumlah tiap kelompok			165											
2	Dengan meminta tetapi jarang diberi	26	2	1	2	5	1	5	2	1	2	5	1	5
			13	2	26	10	2	20	7	2	14	7	2	14
			7	3	21	10	3	30	15	3	45	14	3	42
			4	4	16	1	4	4	2	4	8	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			65			59			69		
Jumlah tiap kelompok			254											
3	Diberi dengan meminta	29	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2
			4	2	8	6	2	12	3	2	6	7	2	14
			21	3	63	20	3	60	22	3	66	15	3	45
			4	4	16	3	4	12	4	4	16	5	4	20
			Jumlah tiap aspek			87			84			88		
Jumlah tiap kelompok			340											
4	Diberi tanpa meminta	9	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1
			2	2	4	3	2	6	-	2	-	1	2	2
			6	3	18	5	3	15	6	3	18	7	3	21
			1	4	4	-	4	-	3	4	12	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			26			22			30		
Jumlah tiap kelompok			102											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.24 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 15 responden yang mengakui tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- b. Dari 26 responden yang mengakui telah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah dengan meminta tetapi jarang diberi memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- c. Dari 29 responden yang mengakui mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah dengan meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- d. Dari 9 responden yang mengakui mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah tanpa meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama rendah.

Berdasarkan dari kajian diatas maka peningkatan intensitas pemberian bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah ternyata tidak selamanya meningkatkan tingkat peran serta. Pengaruh yang terjadi adalah semakin bantuan diberikan tanpa meminta maka tingkat peran serta masyarakat dalam mengikuti pertemuan semakin tinggi. Dalam hal ini tingkat peran serta terbesar terjadi bila dana diberikan dengan adanya permintaan terlebih dahulu dari masyarakat dan tingkat peran serta terendah terjadi bila masyarakat harus meminta terlebih dahulu tetapi jarang diberi.

#### **6. Hubungan antara pemberian bantuan material oleh Pemerintah dengan tingkat peran serta**

Bagi warga masyarakat yang kurang mampu maka bantuan dari Pemerintah merupakan salah satu unsur penting bagi kegiatan peran serta khususnya untuk menangani perbaikan prasarana yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan bagi warga masyarakat yang telah mampu untuk menangani perbaikan prasarana yang ada di lingkungannya maka bantuan dari Pemerintah akan menciptakan kegairahan untuk lebih besar lagi menyumbangkan sumber daya yang dimilikinya bagi kepentingan bersama. Sehingga pemberian bantuan material oleh Pemerintah akan memberikan pengaruh bagi peningkatan tingkat peran serta masyarakat yang ada. Pengaruh pemberian bantuan material oleh Pemerintah dengan tingkat peran serta dapat dilihat pada Tabel V.25 berikut ini.

TABEL V.25.  
HUB. PEMBERIAN MATERIAL OLEH PEMERINTAH  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW II-VI

No	Pemberian bantuan material oleh Pemerintah	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nx b	n	b	nx b	n	b	nx b	n	b	nx b
1	Tidak ada	12	2	1	2	3	1	3	1	1	1	-	1	-
			2	2	4	-	2	-	1	2	2	-	2	-
			7	3	21	9	3	27	7	3	21	12	3	36
			1	4	4	-	4	-	3	4	12	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		31			30			36			36		
	Jumlah tiap kelompok		133											
2	Dengan meminta tetapi jarang diberi	27	2	1	2	4	1	4	2	1	2	4	1	4
			16	2	32	11	2	22	10	2	20	8	2	16
			7	3	21	9	3	27	13	3	39	15	3	45
			2	4	8	3	4	12	2	4	8	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		63			65			69			65		
	Jumlah tiap kelompok		262											
3	Diberi dengan meminta	33	-	1	-	2	1	2	-	1	-	4	1	4
			7	2	14	6	2	12	1	2	2	7	2	14
			20	3	60	22	3	66	27	3	81	17	3	51
			6	4	24	3	4	12	5	4	20	5	4	20
	Jumlah tiap aspek		98			92			103			89		
	Jumlah tiap kelompok		382											
4	Diberi tanpa meminta	7	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	2	2	4	-	2	-	1	2	2
			6	3	18	5	3	15	5	3	15	6	3	18
			1	4	4	-	4	-	2	4	8	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		22			19			23			20		
	Jumlah tiap kelompok		84											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.25 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 12 responden yang mengakui tidak mendapatkan bantuan material dari Pemerintah memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- Dari 27 responden yang mengakui telah mendapatkan bantuan material dari Pemerintah dengan meminta tetapi jarang diberi memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan

prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

- c. Dari 33 responden yang mengakui mendapatkan bantuan material dari Pemerintah dengan meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- d. Dari 7 responden yang mengakui mendapatkan bantuan material dari Pemerintah tanpa meminta terlebih dahulu memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik sangat tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan dari kajian diatas dan sama dengan kajian pada pengaruh pemberian dana dari Pemerintah dengan tingkat peran serta masyarakat maka peningkatan intensitas pemberian dana dari Pemerintah ternyata tidak mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat yang terjadi. Masing-masing cara pemberian material memiliki dampak peran serta yang berbeda.

Tingkat peran serta masyarakat yang paling rendah bila masyarakat meminta bantuan material tetapi jarang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini didukung dengan rendahnya tingkat peran serta masyarakat untuk mengikuti pertemuan yang diadakan, keaktifan berdiskusi dan keaktifan membayar iuran.

#### 5.2.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW II-VI

Berdasarkan pertanyaan terbuka yang diajukan kepada warga maka secara umum hambatan yang berasal dari masyarakat untuk berperan serta adalah kemampuan sumber daya manusia terbatas terutama di bidang ekonomi, masalah pekerjaan, rendahnya kesadaran warga, menyalahgunakan fungsi prasarana misalnya membuang sampah di selokan dan beberapa warga mengaku tidak terlibat karena tidak diundang.

Menurut Ketua RW/RT setempat, walaupun sebenarnya keinginan warga untuk berkumpul bersama sangat tinggi tetapi kondisi ekonomi warga memaksa untuk bekerja siang malam. Kebanyakan warga yang tinggal di lingkungan RW II bekerja sebagai wiraswasta. Dalam hal ini wiraswasta yang dimaksud bukan pengusaha besar tetapi menjadi tukang becak, sopir, asongan, penjaja koran, satpam dan usaha lain. Rata-rata jenis pekerjaan tersebut sifatnya memberikan penghasilan secara harian sehingga bila tidak bekerja sehari maka orang tersebut akan kehilangan pendapatan pada hari itu juga.

Untuk hambatan yang berasal dari pemerintah, menurut warga karena pemerintah kurang tanggap pada permasalahan masyarakat sebagai contoh bila ada laporan dari warga hanya dikontrol tetapi kelanjutannya tidak jelas dan tidak adanya kemudahan dari pemerintah khususnya dalam berkomunikasi, menurut hasil wawancara dengan Ketua RW pada saat ini bila ada keluhan dari masyarakat maka pihak Kelurahan tidak berani memutuskan langsung tetapi harus dikonsultasikan dulu dengan Pemerintah Kota dimana tanggapan yang diberikan terkadang tidak sesuai lagi dengan kehendak warga. Selain itu hambatan dari Pemerintah yang dirasakan beberapa pengurus RT/RW berkaitan dengan pembagian wilayah yang terlalu luas.

### **5.3. Analisis Peran Serta Masyarakat di RW VII (*Resettlement*)**

#### **5.3.1. Bentuk Peran Serta Masyarakat di RW VII (*Resettlement*)**

Bentuk-bentuk peran serta yang ada dapat berupa bentuk sumbangan dalam peran serta yaitu pikiran, uang, material dan tenaga, serta bentuk kegiatan dalam peran serta yaitu peran serta dilakukan bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan pihak lain. Selain itu bentuk peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

Bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan jalan dan saluran sebagian besar berupa tenaga yaitu (85,7%) kemudian dengan memberikan usulan (14,3%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material maupun uang. Mengenai bentuk sumbangan warga dalam pengelolaan sampah adalah dengan menyumbang tenaga (85,7%) serta usulan (14,3%) dan tidak ada yang menyumbang dalam bentuk material ataupun uang. Dalam hal ini sumbangan uang yang dimaksud dalam pengelolaan sampah adalah sumbangan di luar RKK sedangkan mengenai RKK tersebut warga tetap memberikan melalui iuran RT ke pengurus RW untuk diteruskan ke Kelurahan setempat dengan jumlah rata-rata,

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan jalan dan saluran adalah dalam bentuk kerja bakti massal (85,7%) yang dilakukan secara bersama-sama dalam lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dalam rapat warga. Dalam hal ini mulai timbul keinginan warga untuk melaksanakan di lingkungan tempat tinggal masing-masing kapan saja sesuai kebutuhan mereka (14,3%) dan tidak ada keinginan warga untuk melakukannya secara bersama-sama di lingkungan tempat tinggal masing-masing atau dengan mengupah seseorang.

Bentuk kegiatan yang dipilih sebagian besar warga dalam kegiatan pengelolaan sampah sama dengan pada jalan dan saluran yaitu dalam bentuk kerja bakti massal (85,7%) tetapi dalam hal ini telah ada keinginan warga untuk mulai melaksanakannya kapan saja di

lingkungan tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri (14,3%) dan tidak ada yang memilih dalam waktu bersamaan ataupun dengan mengupah seseorang.

Mengenai bentuk peran serta berdasarkan frekuensi kegiatan bersama yang telah dilakukan maka sebagian besar warga rata-rata melakukannya sebulan dua kali (57,1%) dan tidak ada yang melakukannya kurang dari sebulan sekali. Kegiatan bersama tersebut dilaksanakan rutin dengan waktu dan tempat yang sama dimana pelaksanaannya untuk tingkat RW sebagian besar diwakili ketua RT (71,4%), sedangkan sisanya diwakili sebagian warga (28,6%) sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan peran serta yang ada dilaksanakan dalam bentuk intensif yaitu dilakukan rutin tiap bulan dengan waktu dan tempat sama. Untuk tingkat RT berdasarkan hasil wawancara dihadiri langsung oleh seluruh warga. Dalam hal ini bentuk peran serta warga berdasarkan cara keterlibatan untuk tingkat RW cenderung dalam bentuk peran serta tak langsung dan pada tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung. Dan pada akhirnya berdasarkan derajat kesukarelaan maka bentuk peran serta yang terjadi selama ini dapat dikategorikan dalam partisipasi bebas karena hampir keseluruhan warga merasa keterlibatan mereka dilaksanakan tanpa paksaan sama sekali dan tidak ada yang merasa terpaksa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.26 berikut ini.

TABEL V.26.  
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VII (RESETTLEMENT)

No	Bentuk Peran Serta	Skala Penilaian	RW VII (Resettlement)	
			Frekuensi	%
1	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan jalan & saluran	Tenaga	6	85,7
		Material	-	-
		Uang	-	-
		Usulan/pikiran	1	14,3
2	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan sampah	Tenaga	6	85,7
		Material	-	-
		Uang	-	-
		Usulan/pikiran	1	14,3
3	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan jalan & saluran	Kerja bakti massal	6	85,7
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	-	-
		Di lingk. masing2 kapan saja	1	14,3
		Mengupah seseorang	-	-
4	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan sampah	Kerja bakti massal	6	85,7
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	-	-
		Di lingk. masing2 kapan saja	1	14,3
		Mengupah seseorang	-	-
5	Jumlah kegiatan dlm satu bulan	≥ 3 x sebulan	2	28,6
		2 x sebulan	4	57,1
		1 x sebulan	1	14,3
		<1 x sebulan	-	-
6	Rutinitas kegiatan	Rutin, waktu & tempat sama	4	57,1
		Rutin, waktu atau tempat tdk sama	-	-
		Rutin, waktu dan tempat tdk sama	3	42,9
		Tidak rutin, sesuai kebutuhan	-	-
7	Sifat kehadiran	Datang sendiri	-	-
		Diwakili sebagian warga	2	28,6
		Diwakili pengurus RT	-	-
		Diwakili ketua RT	5	71,4
8	Derajat kesukarelaan	Tidak terpaksa sama sekali	7	100
		Sedikit terpaksa	-	-
		Terpaksa	-	-
		Sangat terpaksa	-	-

Sumber : Data primer diolah, 2003

### 5.3.2. Tingkat Peran Serta Masyarakat di RW VII (Resettlement)

Tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan derajat keterlibatan masyarakat atau warga masyarakat dalam setiap kegiatan bersama yang dilaksanakan untuk mengelola prasarana yang telah ada pasca peremajaan lingkungan permukiman. Derajat keterlibatan warga masyarakat tersebut diukur dengan pemikiran

semakin banyak anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama ataupun semakin besar kesediaannya menyumbangkan pikiran, tenaga atau bentuk sumbangan lain maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat diketahui dari frekuensi kehadiran warga dalam pertemuan, keaktifan warga dalam berdiskusi, keterlibatan dalam kegiatan fisik dan kesediaan warga dalam memberikan sumbangan dana atau iuran.

TABEL V.27.  
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VII (RESETTLEMENT)

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	Nx Bobot	Jumlah Tiap Variabel
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Sangat Tinggi	1	4	4	20
		Tinggi	5	3	15	
		Rendah	-	2	-	
		Sangat Rendah	1	1	1	
2	Tingkat keaktifan berdiskusi	Sangat Tinggi	-	4	-	20
		Tinggi	6	3	18	
		Rendah	1	2	2	
		Sangat Rendah	-	1	-	
3	Tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik	Sangat Tinggi	-	4	-	19
		Tinggi	5	3	15	
		Rendah	2	2	4	
		Sangat Rendah	-	1	-	
4	Tingkat keaktifan membayar iuran / sumbangan yg telah disepakati bersama	Sangat Tinggi	-	4	-	19
		Tinggi	5	3	15	
		Rendah	2	2	4	
		Sangat Rendah	-	1	-	
	Jumlah				78	78

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari tabel tersebut dapat diketahui berdasarkan tingkat kehadiran dalam pertemuan dapat diketahui dari 7 responden 5 responden (71,4%) mengaku tingkat kehadirannya tinggi dalam pertemuan, 1 responden (14,3%) tingkat kehadirannya sangat tinggi, 1 responden (14,3%) tingkat kehadirannya sangat rendah dan tidak ada yang kehadirannya rendah.

Berdasarkan tingkat keaktifan berdiskusi, sebagian besar responden memiliki tingkat keaktifan berdiskusi yang tinggi (85,7%) dan sisanya memiliki tingkat keaktifan berdiskusinya rendah (14,3%).

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik maka sebagian besar responden memiliki tingkat kehadiran yang tinggi (71,4%) dan tidak ada responden yang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi atau sangat rendah sedangkan sisanya memiliki tingkat kehadiran yang rendah (28,6%).

Mengenai tingkat keaktifan dalam membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama maka dari 7 responden 5 responden (71,4%) memiliki tingkat keaktifan membayar yang tinggi dan 2 responden (28,6) memiliki tingkat keaktifan membayar rendah.

Mengenai penentuan kategori tingkat peran serta dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Nilai terendah adalah  $4 \times 7 = 28$  dan nilai tertinggi adalah  $16 \times 7 = 112$ . Bila ada 4 interval maka jarak intervalnya adalah  $(112 - 28) / 4 = 21$ . Maka,

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| ▪ Sangat tinggi bila memiliki skor | 91 - 112 |
| ▪ Tinggi bila memiliki skor        | 70 - 91  |
| ▪ Rendah bila memiliki skor        | 49 - 70  |
| ▪ Sangat rendah bila memiliki skor | 28 - 49  |

Sehingga bila total skor RW VII adalah 78 maka termasuk kategori tingkat peran serta tinggi.

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan variabelnya, dari data-data tersebut diatas maka peran serta masyarakat yang tinggi pada tingkat kehadiran dalam pertemuan dan dalam berdiskusi yang mencapai jumlah Nx bobot tertinggi (20) dan yang paling rendah adalah dalam kegiatan fisik dan tingkat keaktifan membayar iuran yang telah disepakati bersama yang memiliki jumlah Nx bobot terkecil (19).

### 5.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat

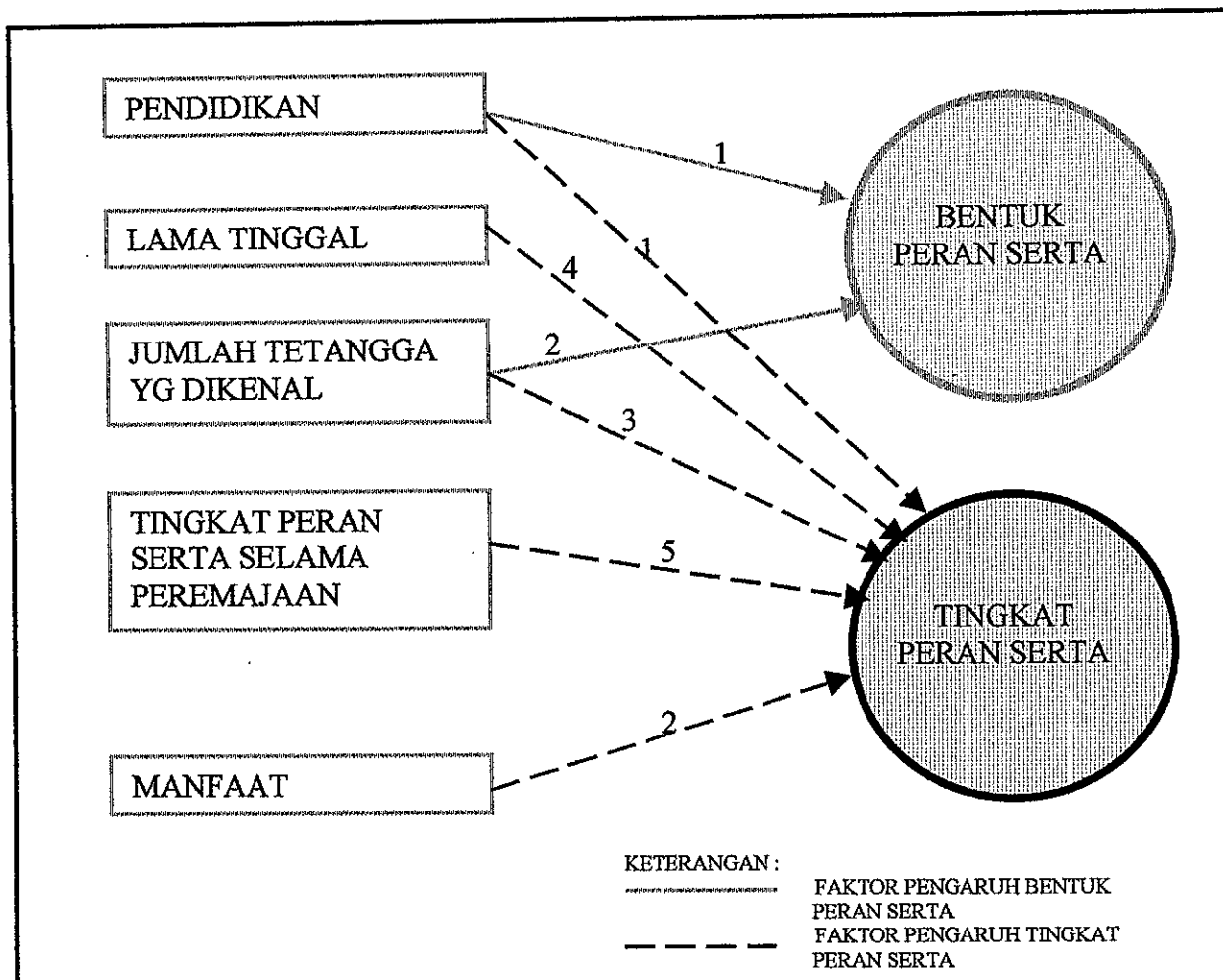
Untuk mengetahui hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan uji statistik dengan menggunakan tabulasi silang atau *crosstab* dari beberapa variabel yang ada serta dengan memperhatikan nilai *chi square*. Dengan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh Tabel V.28 sebagai berikut.

TABEL V.28.  
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DI RW VII (RESETTLEMENT)

Kode	Soal	Variabel	Bentuk Peran Serta	Tingkat Peran Serta
F1	A1	Umur	3,080	7,280
F2	A2	Pendidikan	7,000	5,600
F3	A3	Pekerjaan	0,58	2,100
F4	A4	Pendapatan	3,325	2,100
F5	A5	Lama Tinggal	3,080	14,000
F6	A6	Status hunian	3,080	7,280
F7	D1	Jumlah tetangga yg dikenal	3,917	7,000
F8	D2	Bentuk Sumbangan dlm peremajaan	3,080	7,280
F9	D9	Tingkat peran serta dlm peremajaan	2,917	7,000
F10	D10	Kesesuaian rencana peremajaan	0,058	2,100
F11	D11	Kesesuaian hasil pelaksanaan peremajaan	0,058	2,100
F12	D12	Manfaat peran serta	2,917	7,000
F13	D13	Tanggung jawab pengelolaan prasarana	2,917	0,467
F14	D14	Kehadiran pemimpin	0,467	0,467
F15	D15	Kemampuan pemimpin memberi arahan	0,058	2,100
F16	D16	Dukungan warga pada pemimpin	2,917	0,467
F17	D17	Pemberian penyuluhan & pembinaan dari pemerintah	7,000	5,600
F18	D18	Bantuan dana dari pemerintah	1,120	3,080
F19	D19	Bantuan material dari pemerintah	0,467	0,467
F20	D20	Besarnya bantuan bila diberikan	0,058	2,100
F21	D21	Bantuan pihak ketiga	0,467	3,733
F22	D22	Karakteristik prasarana	0,058	2,100

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari hasil perhitungan tersebut dan dengan uji koefisien kontingensi seperti pada lampiran maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa bentuk peran serta masyarakat di RW VII dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang dikenal. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lama tinggal, jumlah tetangga yang dikenal, tingkat peran serta selama peremajaan dan manfaat peran serta. Hubungan ini secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 5.4. berikut ini.



**GAMBAR 5.4.**  
**FAKTOR YG BERPENGARUH PADA BENTUK &**  
**TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VII (RESETTLEMENT)**  
*Sumber : Data primer diolah, 2003*

### 5.3.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk Peran Serta Masyarakat

#### 1. Hubungan antara pendidikan dengan bentuk peran serta.

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh berpengaruh pada wawasan dan tingkat pengetahuan seseorang. Manfaat dari kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pembangunan dapat diketahui dan dihayati apabila seseorang memiliki pendidikan yang memadai. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara antara tingkat pendidikan dan keinginan bentuk peran serta.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 2 responden yang berpendidikan dasar menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan tiga kali atau dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam hal ini pertemuan dihadiri oleh ketua RT atau sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 3 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan dan dilakukan rutin pada waktu dan tempat sama serta dihadiri oleh ketua RT di tingkat RW.
- c. Dari 2 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga atau usulan. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti atau melakukan sendiri di tempat tinggal masing-masing kapan saja. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan satu kali atau tiga kali sebulan dan dilakukan rutin pada waktu dan tempat sama, serta dihadiri oleh ketua RT atau sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Secara lebih detail hubungan antara tingkat pendidikan dengan bentuk peran serta dapat dilihat pada Tabel V.29 berikut.

TABEL V.29.  
 HUB. TINGKAT PENDIDIKAN DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT  
 DI RW VII (RESETLEMENT)

no	Tingkat pendidikan	Jumlah responden	berikut sumbng pdjin & sal (%)	berikut sumbng pd-sampah (%)	berikut kegiatan pd jin & sal (%)	berikut kegiatan pd sampah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksan (%)
1	Pendidikan dasar	2	usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	100	100	100	0	0	0	0
2	Pendidikan menengah	3	usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	100	100	100	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	100	100	100	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	100	100	100	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	100	100	100	0	0	0	0
3	Pendidikan tinggi	2	usulan uang material tenaga	50	50	50	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	0	0	0	0	0	0	0
			usulan uang material tenaga	50	50	50	0	0	0	0

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdirinya

Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan dari kajian diatas menunjukkan perbandingan terbalik dengan asumsi sementara karena ternyata semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah peluang terjadinya sumbangan berupa tenaga dan bentuk kegiatan berupa kerja bakti.

Mengenai jumlah pertemuan peluang terjadinya pertemuan 2 kali sebulan terdapat pada kelompok pendidika menengah dan peluang terbesar terjadinya pertemuan 3 kali sebulan terdapat pada kelompok warga berpendidikan dasar dan tinggi. Dalam hal ini warga yang berpendidikan tinggi memiliki peluang terbesar untuk melakukan pertemuan secara rutin dengan waktu dan tempat yang sama.

## **2. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta**

Seperti diuraikan pada kajian sebelumnya mengenai adanya pengaruh hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta maka pada umumnya keinginan bentuk peran serta warga di RW VII hampir sama dengan di RW lainnya.

Berdasarkan hasil survei responden maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 1 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah dengan melaksanakan sendiri di tempat tinggal masing-masing kapan saja. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan sekali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat sama. Dalam hal ini pertemuan dihadiri oleh ketua RT atau sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.
- b. Dari 6 responden menginginkan bentuk sumbangan pada jalan dan saluran serta persampahan berupa tenaga. Untuk bentuk kegiatan pengelolaan jalan, saluran serta sampah berupa kerja bakti. Sedangkan jumlah pertemuan dilakukan dua kali sebulan serta dilakukan rutin pada waktu dan tempat berbeda. Dalam hal ini pertemuan dihadiri oleh ketua RT untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT.

Hubungan jumlah tetangga yang dikenal dengan bentuk peran serta secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel V.30.

TABEL V.30.  
 HUB. JUMLAH TETANGGA YG DIKENAL  
 DGN BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT DI RW VII (RESETTLEMENT)

No	Jumlah tetangga yg dikenal	Jumlah respon	bentuk sumber pd jln & wal (%)	bentuk sumber pd sam pah (%)	bentuk kegiatan pd jln & wal (%)	bentuk kegiatan pd sam pah (%)	Jumlah pertemuan (%)	Rutinitas jadwal pertemuan (%)	Sifat kehadiran (%)	Tingkat keterpaksaan (%)				
1	25% 50%	1	usulan uang material tenaga	0 0 0 100	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 100 0 0	<1x 1x 2x ≥3x	0 100 0 0	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 0 0 100	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	0 0 100 0	Sangat Terpaks Terpaksa Hampr tdk Tidak terpaksa	0 0 0 100
2	>75%	6	usulan uang material tenaga	16.7 0 0 83.3	0 mengupah lingk kpn saja lingk bersm kerja bakti	0 0 0 100	<1x 1x 2x ≥3x	0 0 66.7 33.3	Tidak rutin Rutin, wkt & tempat beda Rutin, wkt sama tmpt beda Rutin, wkt & tempat sama	0 66.7 0 33.3	Diwakili RT Diwakili pengrs RT Diwakili sebg wrg Wrg hadir langsung	83.3 0 16.7 0	Sangat Terpaks Terpaksa Hampr tdk Tidak terpaksa	0 0 0 100

Keterangan : Hubungan antara variabel dengan tiap bentuk peran serta masing-masing berdirinya

Sumber : Data Primer diolah, 2003

Berdasarkan kajian diatas, dapat dilihat bahwa secara umum bentuk sumbangan dalam pengelolaan jalan dan saluran berupa tenaga. Tetapi bila dilihat besarnya prosentase dapat diketahui bahwa semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin berkurang keinginan untuk menyumbangkan tenaga.

Mengenai bentuk kegiatan, semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin besar peluang terjadinya kerja bakti dan melakukan pertemuan 2 kali sebulan atau lebih. Namun dalam pertemuan tersebut keinginan untuk diwakili juga semakin besar.

### 5.3.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Peran Serta Masyarakat

#### 1. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat peran serta

Seperti telah dijelaskan pada kajian sebelumnya pengaruh faktor pendidikan maka dapat dipahami adanya hubungan antara faktor pendidikan dengan tingkat peran serta dalam kegiatan bersama yang dilaksanakan dengan asumsi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka memungkinkan terjadinya peluang yang lebih besar untuk berperan serta.

TABEL V.31.  
HUB. TINGKAT PENDIDIKAN DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW VII (RESETTLEMENT)

No	Tingkat pendidikan masyarakat	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			a	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	Pendidikan dasar	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	1	2	2	1	2	2
			1	3	3	2	3	6	1	3	3	1	3	3
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			7			6			5		
Jumlah tiap kelompok			23											
2	Pendidikan menengah	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
			3	3	9	3	3	9	3	3	9	3	3	9
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			9			9			9		
Jumlah tiap kelompok			36											
3	Pendidikan tinggi	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			1	3	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			4			5			5		
Jumlah tiap kelompok			19											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan pada Tabel V.31 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 2 responden yang berpendidikan dasar memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- b. Dari 3 responden yang berpendidikan menengah memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.
- c. Dari 2 responden yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan rendah, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian tersebut asumsi bahwa tingginya tingkat pendidikan akan berpengaruh pada wawasan dan kemampuan melakukan inovasi yang pada akhirnya mempengaruhi tingginya tingkat peran serta ternyata tidak selamanya benar. Dari kenyataan yang ada bahwa tingkat peran serta terendah ada pada kelompok warga yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal ini didukung dengan kenyataan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah tingkat kehadirannya dalam pertemuan.

## 2. Hubungan antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dengan tingkat peran serta

Telah dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa persepsi manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat. Di RW VII, hubungan antara persepsi manfaat kegiatan peran serta dengan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo Surakarta dapat dilihat pada Tabel V.32.

TABEL V.32.  
HUB. PERSEPSI MANFAAT PERAN SERTA  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW VII (RESETTLEMENT)

No.	Manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	Sedikit bermanfaat	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			1			2			2		
Jumlah tiap kelompok			7											
2	Banyak sekali manfaat	6	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	1	2	2	1	2	2
			5	3	15	6	3	18	5	3	15	5	3	15
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
			Jumlah tiap aspek			19			18			17		
Jumlah tiap kelompok			71											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.32 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 1 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat sedikit manfaatnya dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.

- b. Dari 6 responden yang beranggapan bahwa keterlibatan masyarakat banyak sekali manfaatnya dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi warga terhadap manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana maka semakin tinggi pula tingkat peran serta dalam kegiatan bersama. Hal ini didukung dengan semakin tingginya tingkat peran serta masyarakat pada semua aspek.

### 3. Hubungan antara jumlah tetangga yang dikenal dengan tingkat peran serta

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah tetangga yang dikenal akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat. Dalam hal ini diasumsikan semakin banyak seseorang mengenal tetangga di sekitarnya maka semakin tinggi tingkat peran sertanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.33.

TABEL V.33.  
HUB. JUMLAH TETANGGA YG DIKENAL  
DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW VII (RESETTLEMENT)

No	Jumlah tetangga yang dikenal	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb	n	b	nxb
1	25%-50%	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		1			2			2			2		
	Jumlah tiap kelompok		7											
2	>75%	6	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	1	2	2	1	2	2
			5	3	15	6	3	18	5	3	15	5	3	15
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		19			18			17			17		
	Jumlah tiap kelompok		71											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.33 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari 1 responden yang mengaku kenal 25%-50% tetangga memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- b. Dari 6 responden yang mengaku kenal lebih dari 75% jumlah tetangga memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat yang terjadi. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat disetiap aspek peran serta.

### **3. Hubungan antara lama tinggal dengan tingkat peran serta**

Lama tinggal seseorang akan mempengaruhi ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Seperti telah dijelaskan pada kajian sebelumnya mengenai pengaruh lama tinggal maka ikatan psikologis ini akan mempengaruhi kepeduliannya dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Rasa kepedulian ini berpengaruh besar pada tingkat peran serta seseorang dalam pengelolaan prasarana. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi dapat dilihat pada Tabel V.34.

TABEL V.34.  
HUB. LAMA TINGGAL DGN TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI RW VII (REDEVELOPMENT)

No	Lama tinggal	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			n	b	nx b	n	b	nx b	n	b	nx b	n	b	nx b
1	1-4 tahun	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		1			2			2			2		
	Jumlah tiap kelompok		7											
2	5-9 tahun	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
			-	3	-	1	3	3	1	3	3	1	3	3
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		4			3			3			3		
	Jumlah tiap kelompok		13											
3	10 tahun atau lebih	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	1	2	2	1	2	2
			5	3	15	5	3	15	4	3	12	4	3	12
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek		15			15			14			14		
	Jumlah tiap kelompok		58											

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.34 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 1 responden yang telah tinggal 1 - 4 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- Dari 1 responden yang telah tinggal 5 - 10 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana sangat tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

- c. Dari 5 responden yang telah tinggal lebih dari 10 tahun memiliki tingkat peran serta dalam pengelolaan prasarana tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran bersama tinggi.

Berdasarkan kajian tersebut diatas dapat disimpulkan semakin lama seseorang tinggal pada lingkungan tersebut maka tingkat peran sertanya semakin tinggi. Hal ini didukung dengan semakin tingginya tingkat peran serta masyarakat pada semua aspek.

#### **5. Hubungan antara tingkat peran serta selama peremajaan dengan tingkat peran serta dalam pengelolaan**

Telah dijelaskan pada kajian sebelumnya bahwa kontribusi masyarakat terhadap peremajaan yang telah dilaksanakan akan mempengaruhi tingkat peran sertanya dalam pengelolaan pasca peremajaan. Dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi kontribusi seseorang dalam peremajaan tersebut maka semakin tinggi tingkat peran sertanya dalam pengelolaan. Hubungan kedua variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel V.35 berikut ini.

TABEL V.35.  
HUB. TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT SELAMA PEREMAJAAN  
DGN TINGKAT PERAN SERTA DLM PENGELOLAAN DI RW VII (RESETTLEMENT)

No	Tingkat peran serta dalam peremajaan	Jml Respd	Perhitungan Skor											
			Kehadiran Pertemuan			Keaktifan Berdiskusi			Kehadiran Keg. Fisik			Keaktifan Membayar		
			a	b	nxb	a	b	nxb	a	b	nxb	a	b	nxb
1	Rendah	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	1	2	2	1	2	2	1	2	2
			-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek				1			2			2			2
	Jumlah tiap kelompok													7
2	Tinggi	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	1	2	2	1	2	2
			3	3	9	3	3	9	2	3	6	2	3	6
			-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek				9			9			8			8
	Jumlah tiap kelompok													34
3	Sangat tinggi	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
			-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-
			2	3	6	3	3	9	3	3	9	3	3	9
			1	4	4	-	4	-	-	4	-	-	4	-
	Jumlah tiap aspek				10			9			9			9
	Jumlah tiap kelompok													37

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.35 tersebut dan Tabel III.2 dalam bab metodologi maka dapat dikaji hal-hal sebagai berikut :

- Dari 1 responden yang memiliki tingkat peran serta rendah dalam peremajaan maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang rendah. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat rendah, tingkat keaktifan berdiskusi rendah, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik rendah dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama rendah.
- Dari 3 responden yang memiliki tingkat peran serta tinggi dalam peremajaan maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

- c. Dari 3 responden yang memiliki tingkat peran serta sangat tinggi dalam peremajaan maka dalam pengelolaan prasarana memiliki tingkat peran serta yang tinggi. Secara lebih rinci tingkat kehadirannya dalam pertemuan yang diadakan sangat tinggi, tingkat keaktifan berdiskusi tinggi, tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik tinggi dan tingkat keaktifan membayar iuran atau sumbangan yang telah disepakati bersama tinggi.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat peran serta masyarakat dalam peremajaan yang diadakan maka semakin tinggi pula tingkat peran sertanya dalam pengelolaan prasarana yang diadakan. Hal ini didukung dengan semakin tingginya tingkat peran serta masyarakat pada semua aspek peran serta.

#### **5.3.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat di RW VII (*Resettlement*)**

Berdasarkan pertanyaan terbuka yang diajukan pada warga maka secara umum hambatan yang berasal dari masyarakat untuk berperan serta adalah kemampuan ekonomi, kurangnya perhatian masyarakat, kondisi geografis yang berkontur dan masyarakat sering menyalahgunakan fungsi prasarana serta kurangnya kekompakan warga dalam memperbaiki lingkungannya.

Menurut Ketua RW hambatan yang dirasakan oleh warga masyarakat khususnya dalam melaksanakan kerja bakti di Kampung adalah kondisi geografis wilayah RW VII yang terlalu luas dan bergelombang. Jarak yang jauh membuat penduduk menjadi enggan datang sedangkan kondisi tanah yang naik turun akan menyulitkan dalam pekerjaan dan membuat pekerjaan menjadi lebih mahal. Selain itu terdapat hambatan ekonomi dimana penduduk lebih mencari uang dahulu daripada ikut dalam kegiatan bersama yang hasilnya belum tentu langsung dirasakan. Selain itu kesadaran warga yang menjadi warga baru khususnya dari relokasi bantaran Timur kali Anyar dan sekarang ditempatkan di Kedung Tungkul juga menjadi hambatan karena mereka relatif kurang peduli dengan lingkungan

sekitar dibandingkan dengan warga di RT lain. Dalam memindahkan warga lain ke dalam kampung menurut Ketua RW perlu dipikirkan sosialisasinya.

Untuk hambatan yang berasal dari pemerintah, menurut warga karena pemerintah masih lamban dalam menanggapi keluhan warga, komunikasi dengan pemerintah dirasakan warga masih searah, kurangnya bantuan pemerintah, jumlah petugas kelurahan yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan pemerintah kurang terlibat langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan warga.

Kepastian bantuan dari Pemerintah sangat diharapkan karena seperti yang terjadi selama ini warga telah mengadakan rapat untuk membuat usulan dan mengumpulkan dana swadaya sebagai salah satu syarat tetapi bantuan yang ditunggu-tunggu tidak datang. Menurut warga ketidakpastian ini mereka anggap sebagai kurangnya perhatian dari Pemerintah yang mengurangi keinginan mereka untuk mengelola prasarana yang ada.

#### **5.4. Analisis Peran Serta Masyarakat di Seluruh Kawasan yang Diremajakan**

##### **5.4.1. Analisis Bentuk Peran Serta Masyarakat**

Seperti dijelaskan di atas maka satu kegiatan pengelolaan dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk peran serta. Berdasarkan hasil dari analisis bentuk peran serta masyarakat di RW yang telah diremajakan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan maka dapat dikaji bentuk peran serta secara umum pada seluruh kawasan yang telah diremajakan. Dalam hal ini asumsi yang dipakai adalah semakin sering suatu bentuk peran serta terjadi pada beberapa kawasan dengan program peremajaan yang berbeda, maka bentuk peran serta tersebut dapat dikatakan akan muncul pada setiap kegiatan pengelolaan pasca peremajaan secara umum. Sehingga dari asumsi ini dapat dikaji bentuk peran serta yang terjadi pada seluruh kawasan yang telah diremajakan di Mojosoongo seperti Tabel V.36.

TABEL V.36.  
BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT  
PADA SELURUH KAWASAN YG TELAH DIREMAJAKAN

No	Bentuk Peran Serta	Skala Penilaian	Bentuk Peran Serta di ap Program						Kesimpulan Seluruh Kawasan	
			RW I (redevelopment)		RW II-VI		RW VII (resettlement)			
			Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
1	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan jalan & saluran	Tenaga	11	78,6	49	62	6	85,7	66	66
		Material	-	-	9	11,4	-	-	9	9
		Uang	1	7,1	13	16,5	-	-	14	14
		Usulan/pikiran	2	14,3	8	10,1	1	14,3	11	11
2	Bentuk sumbangan dlm pengelolaan sampah	Tenaga	10	71,4	46	58,2	6	85,7	62	62
		Material	-	-	3	3,8	-	-	3	3
		Uang	-	-	23	19,1	-	-	23	23
		Usulan/pikiran	4	28,6	7	8,9	1	14,3	12	12
3	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan jalan & saluran	Kerja bakti massal	9	64,3	65	82,3	6	85,7	80	80
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	4	28,6	8	10,1	-	-	12	12
		Di lingk. masing2 kapan saja	1	7,1	6	7,6	1	14,3	8	8
		Mengupah seseorang	-	-	-	-	-	-	0	0
4	Bentuk kegiatan dlm pengelolaan sampah	Kerja bakti massal	7	50	50	63,3	6	85,7	63	63
		Di lingk. masing2 waktu bersamaan	2	14,3	13	16,5	-	-	15	15
		Di lingk. masing2 kapan saja	4	28,6	8	10,1	1	14,3	13	13
		Mengupah seseorang	1	7,1	8	10,1	-	-	9	9
5	Jumlah kegiatan dlm satu bulan	≥ 3 x sebulan	3	21,4	16	20,3	2	28,6	21	21
		2 x sebulan	4	28,6	24	30,4	4	57,1	32	32
		1 x sebulan	7	50	35	44,3	1	14,3	43	43
		<1 x sebulan	-	-	4	5	-	-	4	4
6	Rutinitas kegiatan	Rutin, waktu & tempat sama	-	-	3	3,7	4	57,1	7	7
		Rutin, waktu atau tempat tdk sama	3	21,4	45	57	-	-	48	48
		Rutin, waktu dan tempat tdk sama	7	50	18	22,8	3	42,9	28	28
		Tidak rutin, sesuai kebutuhan	4	28,6	13	16,5	-	-	17	17
7	Sifat kehadiran	Datang sendiri	4	28,6	14	17,7	-	-	18	18
		Diwakili sebagian warga	4	28,6	35	44,3	2	28,6	41	41
		Diwakili pengurus RT	-	-	7	8,9	-	-	7	7
		Diwakili ketua RT	6	42,8	23	29,1	5	71,4	34	34
8	Derajat kesukarelaan	Tidak terpaksa sama sekali	13	92,9	71	89,9	7	100	91	91
		Sedikit terpaksa	1	7,1	2	2,5	-	-	3	3
		Terpaksa	-	-	4	5,1	-	-	4	4
		Sangat terpaksa	-	-	2	2,5	-	-	2	2

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk peran serta pada seluruh kawasan yang telah diremajakan pada dasarnya sama dengan bentuk peran serta pada tiap-tiap kawasan yang terkena program *redevelopment*, peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan dan *resettlement*. Untuk bentuk sumbangan dalam pengelolaan prasarana berupa tenaga dan bentuk kegiatan yang dilakukan berupa kerja bakti. Mengenai kegiatan pertemuan maka pertemuan dilakukan satu kali dalam sebulan dimana kehadiran warga diwakili oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan untuk tingkat RT dihadiri seluruh warga. Pertemuan tersebut dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau pada waktu berbeda dan tempat sama. Sedangkan mengenai derajat kesukarelaan maka pada

umumnya warga melakukan kegiatan peran serta tanpa merasa sama sekali atau dapat dikatakan berbentuk peran serta bebas.

#### 5.4.2. Analisis Tingkat Peran Serta Masyarakat

Seperti halnya pada bentuk peran serta di atas maka berdasarkan hasil dari analisis tingkat peran serta masyarakat di RW yang telah diremajakan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan, dapat dikaji tingkat peran serta secara umum pada seluruh kawasan yang telah diremajakan. Dalam hal ini tingkat peran serta dapat diketahui dengan menjumlahkan responden dan mengalikannya dengan bobot skala penilaian. Setelah diketemukan hasil nilai kali bobot maka dapat diketahui tingkat peran serta pada variabel tersebut maupun secara keseluruhan dengan memasukkannya ke dalam skala penilaian kategori peran serta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.37.

TABEL V.37.  
TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT  
PADA SELURUH KAWASAN YG TELAH DIREMAJAKAN

No	Variabel	Skala Penilaian	RW I ( <i>redevelopment</i> )			RW II-VI			RW VII ( <i>resettlement</i> )			Seluruh Kawasan yg Diremajakan		
			N	Bobot	Nx Bobot	N	Bobot	Nx Bobot	N	Bobot	Nx Bobot	N	Bobot	Nx Bobot
1	Tingkat kehadiran dalam pertemuan	Sngt Tinggi	-	4	-	10	4	40	1	4	4	11	4	44
		Tinggi	6	3	18	40	3	120	5	3	15	51	3	153
		Rendah	7	2	14	25	2	50	-	2	-	32	2	64
		Sngt Rendah	1	1	1	4	1	4	1	1	1	6	1	6
2	Tingkat keaktifan berdiskusi	Sngt Tinggi	-	4	-	6	4	24	-	4	-	6	4	24
		Tinggi	4	3	12	45	3	135	6	3	18	55	3	165
		Rendah	9	2	18	19	2	38	1	2	2	29	2	58
		Sngt Rendah	1	1	1	9	1	9	-	1	-	10	1	10
3	Tingkat kehadiran dalam kegiatan fisik	Sngt Tinggi	-	4	-	12	4	48	-	4	-	12	4	48
		Tinggi	8	3	24	52	3	156	5	3	15	65	3	195
		Rendah	5	2	10	12	2	24	2	2	4	19	2	38
		Sngt Rendah	1	1	1	3	1	3	-	1	-	4	1	4
4	Tingkat keaktifan membayar iuran / sumbangan yg telah disepakati bersama	Sngt Tinggi	-	4	-	5	4	20	-	4	-	5	4	20
		Tinggi	4	3	12	50	3	150	5	3	15	59	3	177
		Rendah	10	2	20	16	2	32	2	2	4	28	2	56
		Sngt Rendah	-	1	-	8	1	8	-	1	-	8	1	8
Jumlah			131			861			78			1070		

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan Tabel V.37 dan kajian tingkat peran serta yang telah dilakukan pada masing-masing kelompok maka guna menganalisis peran serta dapat disimpulkan kembali tingkat peran serta tersebut sebagai berikut :

- RW I (*redevelopment*) : tingkat peran serta rendah
- RW II-VI : tingkat peran serta tinggi
- RW VII (*resettlement*) : tingkat peran serta tinggi

Untuk tingkat peran serta keseluruhan kawasan dapat dipakai skala penilaian seperti yang tercantum dalam metodologi penulisan yaitu :

- Sangat tinggi bila jumlah skor : 1301 – 1600
- Tinggi bila jumlah skor : 1001 – 1300
- Rendah bila jumlah skor : 701 – 1000
- Sangat rendah bila jumlah skor : 400 - 700

Sehingga tingkat peran serta pada keseluruhan kawasan dengan total skor 1070 dapat dikategorikan dalam tingkat peran serta tinggi.

Mengenai penggolongan peran serta berdasarkan Arstein dapat dilihat dari prosesnya. Sebagaimana diketahui selama pelaksanaan peremajaan, Pemerintah telah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap prosesnya. Mengingat tanpa adanya pengelolaan yang memadai kawasan yang telah diremajakan akan menjadi kumuh kembali dan terbatasnya dana Pemerintah untuk mengelola maka keikutsertaan masyarakat ini selain ditujukan agar pelaksanaan peremajaan yang berlangsung dapat diterima juga agar masyarakat mau terlibat dalam pengelolaan pasca pelaksanaan.

Memang secara formal tidak ada acara khusus penyerahan hasil kegiatan dari Pemerintah kepada masyarakat. Tetapi berdasarkan tujuan pelibatan masyarakat dalam peremajaan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya pendelegasian wewenang oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk mengelola prasarana yang telah dibangun. Persiapan Pemerintah untuk memberi kewenangan ini dapat pula ditunjukkan dengan adanya pengenalan rebug warga pasca implementasi yang memperkenalkan cara-cara pengelolaan

prasarana pasca pembangunan dan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat selama peremajaan untuk mengorganisir kemampuan swadaya masyarakat dalam mengembangkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam peremajaan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya secara garis besar kegiatan yang dilakukan masyarakat dapat dibagi dalam dua hal yaitu pertemuan untuk memberikan usulan, merencanakan dan menilai hasil kegiatan serta kegiatan fisik yang biasanya berupa kerja bakti. Dalam hal ini jenis-jenis prasarana atau lokasi-lokasi prasarana yang akan dikelola atau diperbaiki ditentukan dan dikerjakan sendiri oleh warga masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut sesuai dengan McCommon (dalam UNICEF, 1999:20), ciri yang menonjol dari pengelolaan masyarakat adalah sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Keinginan bentuk peran serta dan tingkat peran serta yang terjadi tersebut lebih didorong oleh kemampuan dan kemauan masyarakat sendiri. Oleh karena keterbatasan kemampuan ini pulalah maka prasarana yang mampu dikelola oleh masyarakat baru pada taraf prasarana lingkungan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Peran pihak-pihak luar khususnya Pemerintah dalam hal ini terbatas sebagai stimulan yang mendorong terwujudnya peran serta pada bentuk tertentu atau peningkatan peran serta pada taraf tertentu.

Selain itu bila Pemerintah menginginkan terlibat dalam pengelolaan prasarana lingkungan yang ada maka diperlukan tawar menawar terlebih dahulu sebelum diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh bantuan dana *block grand* sebesar Rp 8.000.000,- untuk pelebaran jalan perbatasan RT 03 di RW VI oleh sebagian warga diusulkan untuk dikembalikan ke Pemerintah karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.

Masyarakat dalam hal ini memang memiliki kewenangan untuk mengelola prasarana yang ada tetapi masih dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh dalam mengelola prasarana tersebut masyarakat tidak dapat secara langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana seperti bank untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melewati pihak ketiga.

Berdasarkan kajian-kajian diatas maka untuk menentukan kategori peran serta dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Peran serta masyarakat yang terjadi dalam pengelolaan prasarana merupakan pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke masyarakat.
- Adanya sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal untuk mengelola prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Dalam pengelolaan prasarana oleh masyarakat, pihak-pihak luar khususnya Pemerintah tidak dapat memberikan tekanan-tekanan atau memaksakan kehendaknya tetapi harus mengadakan tawar-menawar terlebih dahulu dengan masyarakat setempat.
- Walaupun memiliki kewenangan penuh dalam mengelola prasarana tetapi ada batasan-batasan tertentu khususnya terhadap sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau meminjam.

Dari hal-hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo dalam kategori Arstein dapat digolongkan dalam tingkat peran serta yang tinggi yaitu pada tingkat *delegated power* atau pelimpahan kekuasaan.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya penilaian tingkat peran serta pada kawasan yang telah diremajakan di Mojosoongo yang rendah pada kenyataannya tidak selamanya benar. Dalam hal ini yang benar adalah tingkat peran serta masyarakat pada umumnya tinggi dan yang memiliki tingkat peran serta rendah adalah di RW I yang terkena program *redevelopment*.

### 5.4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bentuk dan Tingkat Peran Serta Masyarakat

Faktor yang dimaksudkan disini sesuai dengan tinjauan teori yang terdiri dari beberapa faktor yaitu yang dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal yang masyarakat serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana.

Seperti diketahui dalam analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat di RW I yang terkena program *redevelopment* dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan bila diberikan oleh Pemerintah. Untuk tingkat peran serta dipengaruhi oleh umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan, persepsi manfaat peran serta dan karakteristik prasarana.

Untuk RW II-VI yang terkena program peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan, bentuk peran serta dipengaruhi oleh umur, pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal, tanggung jawab pengelolaan prasarana dan bantuan pihak ketiga. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, pendapatan, tingkat peran serta dalam peremajaan, manfaat peran serta, bantuan dana dan bantuan material dari Pemerintah.

Mengenai bentuk peran serta masyarakat di RW VII yang terkena program *resettlement* dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang dikenal. Sedangkan untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lama tinggal, jumlah tetangga yang dikenal, tingkat peran serta selama peremajaan dan manfaat peran serta.

Dalam rangka melakukan analisis maka asumsi yang dipakai adalah bila suatu faktor berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat peran serta pada ketiga tempat yang diamati yaitu daerah yang terkena program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan maka faktor tersebut dianggap berpengaruh pada bentuk peran

serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan secara menyeluruh di Mojosongo Surakarta. Untuk itu faktor yang berpengaruh dapat dikaji dengan Tabel V.38.

TABEL V.38.  
FAKTOR YG MEMPENGARUHI PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI SELURUH KAWASAN YG TELAH DIREMAJAKAN

No	Kategori	Faktor yang Mempengaruhi			Seluruh Kawasan yg Diremajakan
		RW I ( <i>redevelopment</i> )	RW/RT (peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan)	RW/RT ( <i>resettlement</i> )	
1	Bentuk peran serta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jml tetangga yg dikenal</li> <li>▪ bentuk sumbangan dlm peremajaan</li> <li>▪ kehadiran pemimpin</li> <li>▪ besarnya bantuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ umur</li> <li>▪ pekerjaan</li> <li>▪ jml tetangga yg dikenal</li> <li>▪ tanggung jawab</li> <li>▪ bantuan pihak ketiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tingkat pendidikan</li> <li>▪ jml tetangga yg dikenal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ jml tetangga yg dikenal</li> </ul>
2	Tingkat peran serta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ umur</li> <li>▪ bentuk sumbangan dlm peremajaan</li> <li>▪ manfaat peran serta</li> <li>▪ karakter prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ umur</li> <li>▪ pendapatan</li> <li>▪ tingkat peran serta dlm peremajaan</li> <li>▪ manfaat peran serta</li> <li>▪ bantuan dana</li> <li>▪ bantuan material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tingkat pendidikan</li> <li>▪ lama tinggal</li> <li>▪ jml tetangga yg dikenal</li> <li>▪ tingkat peran serta dlm peremajaan</li> <li>▪ manfaat peran serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ manfaat peran serta</li> </ul>

Sumber : Data primer diolah, 2003

Berdasarkan kajian dari Tabel V.38. dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta adalah jumlah tetangga yang dikenal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat adalah persepsi manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana.

Tetapi kalau dilihat secara lebih jelas ternyata dampak pengaruh masing-masing faktor tersebut berbeda-beda pada masing-masing program. Pada RW yang terkena program *redevelopment* semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin besar bentuk sumbangan berupa tenaga pada jalan dan saluran tetapi pada sampah bentuk tersebut semakin berkurang. Selain itu pengaruh yang terjadi adalah semakin berkurangnya peluang terjadinya kegiatan kerja bakti.

Pada RW yang terkena program peremajaan tanpa perubahan struktur fisik kawasan semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka peluang terjadinya kerja bakti dan bentuk sumbangan tenaga dalam pengelolaan prasarana semakin besar. Demikian pula untuk RW yang terkena program *resettlement* semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka peluang terjadinya kerja bakti semakin besar sedangkan pengaruhnya pada bentuk sumbangan apabila dilihat dari prosentase responden adalah berkurangnya keinginan untuk menyumbangkan tenaga, walaupun dalam hal ini sumbangan tenaga masih tetap dominan.

Berbeda dengan pengaruh jumlah tetangga yang dikenal terhadap bentuk peran serta maka pengaruh persepsi manfaat kegiatan peran serta memiliki dampak yang hampir sama pada tiap-tiap RW yang terkena program yang berbeda. Dalam hal ini semakin tinggi persepsi manfaat kegiatan peran serta maka tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana juga semakin tinggi.

#### **5.4.4. Hambatan Peran Serta Masyarakat**

Mengenai hambatan-hambatan yang menjadi kendala peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan di Mojosongo maka masing-masing RW pada dasarnya memiliki hambatan peran serta masyarakat yang sama.

Berdasarkan hambatan peran serta masing-masing RW tersebut maka dapat dikelompokkan hambatan peran serta yang berasal dari masyarakat adalah keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi, masalah pekerjaan, perhatian masyarakat, pemanfaatan prasarana dan kerukunan warga. Sedangkan hambatan yang berasal dari pemerintah adalah birokrasi khususnya dalam berkomunikasi dengan warga, perhatian dan keterlibatan Pemerintah serta pada akhirnya hambatan yang berasal dari pemerintah berhubungan dengan aparat atau petugas lapangan yang berkaitan dengan jumlah, kemampuan dan penempatan pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel V.39 berikut ini.

TABEL V.39.  
HAMBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
DI SELURUH KAWASAN YANG DIREMAJAKAN

No.	Sumber	Hambatan Peran Serta Masyarakat			Kesimpulan Hambatan Peran Serta Masyarakat
		RW I ( <i>redevelopment</i> )	RW II-VI	RW VII ( <i>resettlement</i> )	
1	Dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kemampuan ekonomi</li> <li>▪ kesadaran</li> <li>▪ rasa memiliki</li> <li>▪ prasarana rusak</li> <li>▪ takut diminta pajak</li> <li>▪ kerukunan</li> <li>▪ pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kemampuan sdm</li> <li>▪ pekerjaan</li> <li>▪ kesadaran</li> <li>▪ penyalahgunaan fungsi prasarana</li> <li>▪ hanya terlibat kalau diundang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kemampuan ekonomi</li> <li>▪ kurangnya perhatian</li> <li>▪ kondisi geografis</li> <li>▪ penyalahgunaan fungsi prasarana</li> <li>▪ kekompakan warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keterbatasan sdm khususnya ekonomi</li> <li>▪ pekerjaan</li> <li>▪ perhatian masyarakat</li> <li>▪ pemanfaatan prasarana</li> <li>▪ kerukunan</li> </ul>
2	Dari Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pembangunan tdk tepat sasaran</li> <li>▪ penempatan pegawai</li> <li>▪ kurang perhatian pasca pelaksanaan</li> <li>▪ kurang aktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kurang tanggap thd laporan warga</li> <li>▪ panjangnya proses pengambilan keputusan</li> <li>▪ ketidaksesuaian reaksi pemerintah</li> <li>▪ pembagian wilayah administratif terlalu luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kurang tanggap</li> <li>▪ komunikasi searah</li> <li>▪ jumlah petugas tidak sesuai dengan luasnya wilayah</li> <li>▪ kurang terlibat langsung pada kegiatan yang diselenggarakan warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ birokrasi yg kaku khususnya dalam berkomunikasi dan keterlibatan</li> <li>▪ kemampuan pegawai</li> <li>▪ penempatan dan jumlah pegawai</li> </ul>

Sumber : Data primer diolah, 2003

## 5.5. Pembahasan

Berdasarkan analisis sebelumnya dapat diketahui bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana secara menyeluruh pada kawasan yang telah diremajakan terdiri dari bentuk sumbangan berupa tenaga, bentuk kegiatan berupa kerja bakti, pertemuan dilakukan sekali sebulan secara rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau sebaliknya yang dihadiri oleh sebagian warga tanpa merasa terpaksa sama sekali.

Mengenai tingkat peran serta masyarakat, secara keseluruhan tingkat peran serta tinggi dalam pengelolaan prasarana dan menurut kategori Arstein dapat digolongkan pada tingkat *delegated power*. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana di Mojosoongo tidak selamanya benar. Kesalahan penilaian ini lebih didasarkan karena tolok ukur yang dipakai adalah melihat pada produk yaitu kondisi kemampuan prasarana yang mengalami penurunan padahal menurut Schubeler (1996:32) untuk menilai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana seharusnya didasarkan pada prosesnya.

Penilaian peran serta didasarkan pada proses bukan pada produk tersebut dapat dijelaskan berdasarkan kondisi sebagai berikut. Kalau dikaji lebih jauh maka penurunan kemampuan prasarana tersebut pada dasarnya disebabkan oleh rendahnya mutu bangunan prasarana dan kurangnya perawatan bagi prasarana yang memerlukannya secara intensif. Bila penurunan kemampuan prasarana disebabkan karena mutu pembangunan yang rendah maka kemampuan prasarana tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tingkat peran serta. Dalam hal ini yang menjadi ukuran peran serta adalah seberapa besar inisiatif warga untuk memperbaikinya.

Sebagai contoh di Kali Kedung Jumbleng, sudah menjadi rahasia umum bahwa penurunan kemampuan prasarana disebabkan karena kesalahan teknis pengerjaan bukan karena rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan. Sementara itu untuk memperbaikinya diperlukan biaya yang besar dan sumber daya manusia yang memadai. Sebenarnya warga melalui pengurus RW setempat telah berulang kali mengajukan usulan perbaikan ke Pemerintah tetapi belum juga ditanggapi secara serius. Selain memberi usulan, karena kondisi prasarana tersebut mulai mengancam longornya rumah, jalan dan bangunan lain yang ada di sekitarnya maka warga juga berusaha memperbaiki talud dengan karung pasir dan bambu seadanya. Berdasarkan inisiatif untuk memperbaiki kemampuan prasarana tersebut maka sebenarnya peran serta masyarakat tinggi dalam pengelolaan prasarana. Sedangkan kemampuan prasarana yang masih tetap rendah lebih disebabkan karena hambatan dalam berperan serta yaitu terbatasnya kemampuan warga baik secara teknis maupun ekonomi untuk mengelolanya.

Mengenai munculnya permukiman kumuh kembali pada kawasan yang telah diremajakan. Dilihat dari potensi dan masalah permukiman di Mojosoongo secara keseluruhan maka kondisi tersebut lebih disebabkan karena migrasi masuk yang tinggi. Selain itu dampak adanya peremajaan dengan penataan permukiman (*redevelopment*) di

Bantaran Barat telah menjadi salah satu alasan bagi warga pendatang lain untuk tinggal di bantaran sungai di sebelahnya. Karena keterbatasan para pendatang baru maka permukiman yang terbentuk adalah permukiman kumuh dengan sarana dan prasarana terbatas dan berharap diperbaiki Pemerintah seperti Bantaran Barat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permukiman kumuh yang muncul akibat penurunan kemampuan prasarana lebih disebabkan karena migrasi dan dampak peremajaan (*redevelopment*) sendiri, bukan pada tingkat peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana.

Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh berdasarkan analisa sebelumnya dapat diketahui faktor yang berpengaruh terhadap bentuk peran serta pada seluruh kawasan yang telah diremajakan adalah jumlah tetangga yang dikenal. Sebagaimana diketahui bahwa prasarana yang ada mendukung kelancaran aktifitas masyarakat setempat. Masyarakat disini bukan merupakan jumlah anggotanya saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Hal ini sesuai dengan Bierens den Haan mengatakan (dalam Susanto,1999:33-37), bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan pada anggota-anggotanya. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak warga mengenal tetangga di sekitarnya maka semakin tinggi ikatan psikologis warga tersebut dengan lingkungan. Kondisi ini berpengaruh pada keinginan-keinginan bentuk peran serta untuk mengelola prasarana lingkungan yang ada.

Sedangkan untuk tingkat peran serta, faktor yang mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana secara menyeluruh adalah persepsi manfaat kegiatan peran serta bagi pengelolaan prasarana. Dalam persepsi terkandung penguat positif dan negatif hakekatnya memperkuat respon dan menaikkan kemungkinan terulangnya kembali di kelak kemudian hari (Thoah, 2002:56-71). Yang terjadi dalam masyarakat paska peremajaan selama ini dalam mengelola prasarana adalah semakin tinggi persepsi manfaat

kegiatan peran serta maka semakin tinggi pula tingkat peran sertanya. Hal ini menunjukkan adanya penguat positif. Penguat positif ini memperkuat dan menaikkan perilaku untuk berperan serta dengan cara menghadirkan keuntungan-keuntungan kegiatan peran serta bagi pengelolaan prasarana. Pengalaman melakukan kegiatan peran serta dan adanya manfaat langsung yang diperoleh misalnya saluran menjadi lancar atau jalan menjadi bersih akan mempengaruhi keinginan berperan serta di kemudian hari. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa penyebab masyarakat untuk berperan serta adalah pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat akan berperan serta jika merasa hasil peran sertanya memiliki manfaat pada hasil akhir serta kedua, masyarakat berperan serta dalam kegiatan yang menarik minat mereka atau aktifitas yang memiliki manfaat langsung yang dapat mereka rasakan.

Dari dua faktor tersebut yang berpengaruh pada keseluruhan kawasan yang telah diremajakan maka pada lingkup program peremajaan dan kawasan yang lebih kecil terdapat faktor-faktor lain yang muncul dan turut mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.

Di RW I yang terkena program redevelopment bentuk peran serta selain dipengaruhi jumlah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi oleh bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan dari pemerintah. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat selain faktor persepsi manfaat dipengaruhi pula oleh umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan dan karakteristik prasarana.

Di RW II-VI yang terkena program peremajaan tanpa merubah struktur kawasan permukiman, bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana selain faktor jumlah tetangga yang dikenal dipengaruhi pula oleh umur, jenis pekerjaan, persepsi tanggungjawab dan bantuan pihak ketiga. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat selain faktor persepsi

manfaat dipengaruhi pula oleh umur, tingkat pendapatan, tingkat peran serta selama peremajaan, pemberian bantuan dana dan material oleh pemerintah.

Di RW yang terkena program resettlement, bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana selain dipengaruhi faktor jumlah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sedangkan tingkat peran serta selain dipengaruhi jumlah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi manfaat peran serta, lama tinggal dan tingkat peran serta selama peremajaan.

Sehingga dari hal-hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada lingkup program dan kawasan yang lebih kecil, bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana paska peremajaan selain dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal juga dipengaruhi oleh faktor internal karakter umur penduduk, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin, persepsi tanggung jawab pengelolaan dan faktor eksternal masyarakat besarnya bantuan Pemerintah serta bantuan pihak ketiga.

Sedangkan tingkat peran serta masyarakat pada lingkup program dan kawasan yang lebih kecil selain dipengaruhi oleh persepsi manfaat dipengaruhi pula oleh faktor internal karakter umur penduduk, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, lama tinggal, bentuk sumbangan dan tingkat peran serta dalam peremajaan dan jumlah tetangga yang dikenal. Untuk faktor eksternal masyarakat yang berpengaruh adalah pemberian dana Pemerintah, pemberian material Pemerintah dan karakteristik prasarana.

Berkaitan dengan pengaruh tingkat peran serta selama peremajaan dengan tingkat peran serta dalam pengelolaan maka khusus mengenai RW yang terkena program *redevelopment* pada kenyataannya tingginya tingkat peran serta masyarakat selama peremajaan tidak mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan seperti RW lainnya. Padahal berdasarkan teori, tingginya tingkat peran serta masyarakat ini akan mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat selama pasca pelaksanaan.

Kalau ditinjau lebih mendalam lagi maka tingginya tingkat peran serta masyarakat yang terkena program *redevelopment* tersebut merupakan tingkat peran serta masyarakat terhadap proses kegiatan. Sedangkan terhadap hasil kegiatan maka perlu diketahui tingkat kesesuaian hasil kegiatan dengan keinginan masyarakat berdasarkan tabel data responden dalam lampiran. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL V.40.  
TINGKAT KESESUAIAN HASIL PEREMAJAAN DGN KEINGINAN WARGA

No	Tingkat Kesesuaian	Prosentase Kesesuaian Hasil Peremajaan dgn Keinginan warga					
		RW I ( <i>redevelopment</i> )		RW II-VI		RW VII ( <i>resettlement</i> )	
		Rencana	Hasil Fisik	Rencana	Hasil Fisik	Rencana	Hasil Fisik
1	Tidak sesuai	14.3	7.14	1.27	7.59	0	0
2	Kurang sesuai	50	50	24.1	25.3	42.9	42.9
3	Sesuai	35.7	35.7	64.6	62	57.1	57.1
4	Sangat sesuai	0	7.14	10.1	5.06	0	0

Sumber : Data primer diolah, 2003

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di RW I yang terkena program *redevelopment* beranggapan bahwa hasil dalam peremajaan tidak sesuai dengan keinginan warga.

Untuk dapat menilai tingkat peran serta masyarakat yang sesungguhnya di RW terhadap hasil peremajaan maka perlu dikaji kembali proses kegiatan dan latar belakang kegiatan untuk kemudian dibandingkan tingkat peran serta masyarakat yang terjadi dengan skala penilaian dari Arstein.

Seperti telah dijelaskan dimuka pelaksanaan *redevelopment* ditujukan untuk memperbaiki lingkungan kumuh baik secara fisik, sosial maupun ekonomi. Warga dalam program tersebut telah diajak menyampaikan aspirasinya dan diberdayakan dalam rembug warga. Dalam setiap rembug warga maka keterlibatan warga dalam proses pertemuan dapat dikategorikan tinggi. Tetapi kalau dilihat lebih jauh maka banyak dari keputusan rapat yang ada sebenarnya telah diketahui dahulu oleh pihak pendamping atau dengan kata lain sudah ada skenario untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga. Karena skenario

pemecahan masalah ini dianggap sebagai solusi tepat untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada maka usulan atau masukan-masukan dari masyarakat lebih banyak diterima untuk dibelokkan kepada skenario yang ada. Setahap demi setahap pola pikir masyarakat diarahkan sesuai skenario yang terjadi tanpa disadari oleh masyarakat sendiri. Pandangan ini diperoleh dari buku laporan peremajaan yang ada pada konsultan pendamping seperti yang tertera dalam Laporan Bulanan Proyek Pendamping *Technical Assistance* SSUDP tahun 1995/1996 dari konsultan pendamping yaitu :

*“..... upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dilaksanakan dengan hati-hati supaya tidak dicurigai datang dari atas. Jadi pendekatan dibuat sedemikian rupa sehingga awal pembangunan seolah-olah datang dari permintaan warga kepada Pemerintah.”*

Mengingat terdapatnya anggapan dari sebagian besar masyarakat setempat bahwa hasil dari rencana peremajaan kurang sesuai dengan keinginan warga, ada kemungkinan setelah peremajaan dengan proses rebug warga telah selesai dilakukan maka masyarakat mulai menyadari bahwa tidak sepenuhnya aspirasi yang telah diusulkan ditindaklanjuti.

Selain itu, seperti kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan *redevelopment* sebagian besar pekerjaan dikerjakan oleh kontraktor pembangun. Dalam hal ini warga turut serta membantu dalam pembuatan jalan lingkungan, pemasangan lampu taman dan kegiatan lain yang sifatnya tidak membutuhkan biaya besar dan mudah dikerjakan. Selama pelaksanaan ini maka rumah warga yang ada dibongkar dan untuk sementara warga tinggal dalam bedeng-bedeng yang telah disediakan menunggu hingga bangunan selesai dibangun. Dari kajian tingkat kesesuaian hasil peremajaan bahwa sebagian besar warga beranggapan hasil pelaksanaan fisik kurang sesuai dengan keinginan warga maka dapat disimpulkan bahwa, pada pekerjaan fisik kontraktor pembangun yang dipilih melalui tender proyek lebih mempertimbangkan aspirasi dari pemilik proyek daripada warga setempat. Pemilik proyek dalam hal ini Pemerintah daerah memberikan tugas pada

kontraktor berdasarkan dokumen lelang yang sifatnya tidak dapat diubah. Panjangnya proses antara hasil dari rebug warga untuk kemudian diusulkan oleh konsultan pendamping menjadi dokumen teknis sampai tahap pelaksanaan di lapangan memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak warga.

Berdasarkan dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam program *redevelopment* Pemerintah melaksanakan rebug warga lebih didasarkan sebagai terapi terhadap kondisi warga baik fisik, sosial dan ekonomi. Walaupun tingkat peran serta masyarakat tinggi dalam rebug warga tersebut tetapi pada kenyataannya kegiatan tersebut dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan atau usulan-usulan dari masyarakat. Skenario atau solusi yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaannya lebih diutamakan daripada pendapat warga sendiri. Untuk itu berdasar fakta-fakta tersebut dalam kategori Arstein tingkat peran serta yang terjadi merupakan tingkat peran serta sangat rendah yaitu termasuk dalam kategori *therapy* atau penyembuhan. Masyarakat yang tinggal dalam permukiman kumuh dianggap sebagai pasien dari segi fisik, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan penyembuhan berupa program *redevelopment* untuk mengatasi kondisi tersebut.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1. Kesimpulan**

Peremajaan lingkungan permukiman merupakan suatu proses penataan kembali kawasan kumuh perkotaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kegiatan masyarakat. Proses tersebut terutama diterapkan pada kawasan yang dihuni oleh kelompok masyarakat kota berpenghasilan rendah.

Demikian pula dengan Kota Surakarta, dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan permukimannya telah melakukan peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo yang dilakukan dengan pendekatan *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa merubah struktur kawasan.

Dalam peremajaan lingkungan permukiman tersebut terdapat penekanan pada pentingnya pengelolaan prasarana pasca pelaksanaan program. Tanpa pemeliharaan atau pengelolaan yang memadai maka permukiman yang telah diremajakan dapat segera menjadi kumuh kembali.

Memang Pemerintah pada umumnya memiliki peranan besar dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana kota. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana terutama dalam operasi dan pemeliharaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat tersebut yaitu faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal terdiri dari ciri-ciri individu, persepsi, ikatan psikologis dan kepemimpinan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari peran Pemerintah, peran pihak ketiga dan karakteristik prasarana.

Setelah dilaksanakannya peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo yang menjadi permasalahan adalah adanya penurunan kemampuan prasarana yang mendorong adanya penilaian rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaannya sehingga perlu upaya peningkatan peran serta masyarakat dengan mengetahui bentuk peran serta, tingkat peran serta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana untuk tiap-tiap kawasan dengan pendekatan peremajaan yang berbeda pada dasarnya memiliki bentuk yang sama. Untuk bentuk sumbangan dalam pengelolaan prasarana berupa tenaga dan bentuk kegiatan yang dilakukan berupa kerja bakti. Mengenai kegiatan pertemuan maka pertemuan dilakukan satu kali dalam sebulan dimana kehadiran warga diwakili oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan untuk tingkat RT dihadiri seluruh warga. Pertemuan tersebut dilakukan rutin pada waktu sama dan tempat berbeda atau pada waktu berbeda dan tempat sama. Dalam hal ini untuk tingkat RT cenderung berbentuk peran serta langsung sedangkan untuk tingkat RW berbentuk peran serta tak langsung. Sedangkan mengenai derajat kesukarelaan maka pada umumnya warga melakukan kegiatan peran serta tanpa merasa sama sekali atau dapat dikatakan berbentuk peran serta bebas.

Berdasarkan analisis mengenai tingkat peran serta masyarakat, secara keseluruhan tingkat peran serta tinggi dalam pengelolaan prasarana dan menurut kategori Arstein dapat digolongkan pada tingkat *delegated power*. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana di Mojosoongo tidak selamanya benar. Kesalahan penilaian ini lebih didasarkan karena tolok ukur yang dipakai untuk mengukur peran serta adalah melihat pada produk yaitu kondisi kemampuan prasarana yang mengalami penurunan. Padahal menurut Schubeler (1996:32) untuk menilai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana seharusnya didasarkan pada prosesnya.

Bentuk-bentuk dan tingkat peran serta tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada lingkungan yang diremajakan dengan merubah struktur lingkungan tanpa memindahkan warga maka bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal, bentuk sumbangan dalam peremajaan, kehadiran pemimpin dan besarnya bantuan dari pemerintah. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, bentuk sumbangan dalam peremajaan, persepsi manfaat peran serta dan karakteristik prasarana.

Pada lingkungan yang diremajakan tanpa merubah struktur lingkungan permukiman, bentuk peran serta dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi oleh umur, jenis pekerjaan, jumlah tetangga yang dikenal, persepsi tanggungjawab dan bantuan pihak ketiga. Sedangkan tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi oleh umur, tingkat pendapatan, tingkat peran serta selama peremajaan, persepsi manfaat, pemberian bantuan dana dan material oleh pemerintah.

Pada lingkungan yang diremajakan dengan merubah struktur lingkungan permukiman dan memindahkan warga ke lingkungan yang baru, bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jumlah tetangga yang dikenal. Sedangkan tingkat peran serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, persepsi manfaat peran serta, jumlah tetangga yang dikenal, lama tinggal dan tingkat peran serta selama peremajaan.

Secara keseluruhan maka dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman, bentuk peran serta masyarakat yang ada dipengaruhi oleh jumlah tetangga yang dikenal. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin banyak warga mengenal tetangga di sekitarnya semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang pada akhirnya mempengaruhi keinginan bentuk-bentuk peran sertanya.

Untuk tingkat peran serta masyarakat dipengaruhi persepsi manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana. Dalam hal ini semakin tinggi persepsi manfaat kegiatan peran serta semakin tinggi pula tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa penyebab masyarakat untuk berperan serta adalah pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat akan berperan serta jika merasa hasil peran sertanya memiliki manfaat pada hasil akhir serta kedua, masyarakat berperan serta dalam kegiatan yang menarik minat mereka atau aktifitas yang memiliki manfaat langsung yang dapat mereka rasakan.

Mengenai hambatan-hambatan yang timbul dari masyarakat dalam mengupayakan peningkatan peran serta adalah keterbatasan sumber daya manusia khususnya di bidang ekonomi, masalah pekerjaan, perhatian masyarakat, pemanfaatan prasarana dan kerukunan warga. Sedangkan hambatan yang berasal dari pemerintah adalah birokrasi khususnya dalam berkomunikasi dengan warga, perhatian dan keterlibatan Pemerintah, serta pada akhirnya hambatan yang berasal dari pemerintah berhubungan dengan aparat atau petugas lapangan yang berkaitan dengan jumlah, kemampuan dan kelangsungan penempatan pegawai. Hambatan yang terjadi ini sesuai dengan Korten (dalam Slamet, 1994 :66-74) yang menyatakan bahwa hambatan peran serta masyarakat terdapat dalam komunitas itu sendiri dan pada badan-badan terutama lembaga Pemerintahan.

## **6.2. Rekomendasi**

Dari kesimpulan seperti tersebut diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang berupa usulan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman terutama di Mojosongo Surakarta dan usulan bagi pengembangan studi lanjutan.

Usulan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana :

- Dalam proses pelaksanaan pembangunan harus benar-benar melibatkan peran serta masyarakat karena telah terbukti bila tingkat peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat rendah atau menurut kategori Arstein pada tingkat *therapy* berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pasca pelaksanaan.
- Dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan bentuk-bentuk ideal seperti yang diharapkan dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat kerukunan antar warga melalui kegiatan-kegiatan bersama yang sifatnya memudahkan warga untuk saling mengenal dengan tetangganya masing-masing. Selain itu upaya peningkatan peran serta masyarakat dapat dimulai dengan usaha pembinaan yang terus menerus mengenai pentingnya manfaat kegiatan peran serta dalam pengelolaan prasarana. Pengalaman-pengalaman positif mengenai keuntungan yang didapat dengan adanya peran serta ini akan meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan prasarana di kemudian hari. Namun upaya pembinaan ini jangan hanya terbatas pada usaha merubah bentuk peran serta saja tetapi secara lebih mendasar mempengaruhi perubahan sosial masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang terjadi.
- Selain itu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat seharusnya diimbangi dengan usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat khususnya di bidang ekonomi, menyesuaikan bentuk peran serta dengan karakter jenis mata pencaharian warga dan pembinaan berkaitan dengan kepedulian, pemanfaatan prasarana dan kerukunan warga. Sedangkan dari pemerintah seharusnya memberikan kemudahan birokrasi khususnya dalam berkomunikasi terkait dengan usaha masyarakat untuk mengelola prasarana dan

pembenahan aparat pemerintah yang terdiri dari peningkatan kemampuan, mutasi pegawai dan penyesuaian jumlah pegawai dengan karakter wilayah.

Sedangkan usulan bagi studi lanjutan atau pengembangan studi penunjang berkaitan dengan peran serta masyarakat pasca peremajaan lingkungan permukiman adalah dengan memperhatikan kelemahan dari studi ini :

- Dalam pengambilan sampel yang dianggap representatif terdapat kesan subyektifitas yang tinggi. Akan tetapi pengambilan sampel telah diusahakan mewakili dari seluruh populasi yang beragam dan mempunyai karakteristik yang beragam pula
- Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta masyarakat mempunyai sifat absolut yang belum mutlak benar dan masih dapat diperdebatkan. Hal ini terutama lebih disebabkan karena keterbatasan teoritis terutama pada upaya menjelaskan keterkaitan yang terjadi.
- Pada proses analisa studi ini terdapat metode statistik. Kelemahan dari metode ini adalah menghasilkan sesuatu dengan apa adanya yang kadangkala tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Teori statistik ini kadang-kadang juga mengalami kesulitan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

Demikian hasil studi ini, meskipun masih jauh dari kesempurnaan, tetapi minimal telah memberikan sedikit masukan bagi upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Budihardjo, Eko, 1998, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Bourne, Peter, 1984, *Water and Sanitation, Economic & Sociological Perspective*, London, Academic Press Ltd.
- Bryant, Coralie, Louse G. White alih bahasa Rusyanto, 1987, *Managemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta, LP3S.
- Conyers, Diana alih bahasa Susetiawan, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Couch, Chris, 1990, *Urban Renewal: Theory and Practice*, England, Macmillan.
- Dirjend Cipta Karya DPU bekerjasama dengan IAP, 1997, *Kamus Tata Ruang*, Jakarta, Dirjend Cipta Karya DPU.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1987, *Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota*, Jakarta, Yayasan Badan Penerbit PU.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Penerbit ANDI.
- Khairuddin, H, 1992, *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi dan Perencanaan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Levy, M. John , 1997, *Contemporary Urban Planning*, New Jersey, Prentice-Hall Inc.
- Midgley, James, 1986, *Community Participation Social Development and the State*, London, Mathuen.
- Nasir, Moh., 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nasution, 2002, *Metodologi Research*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Organisation for Economic Cooperation dan Development, 1991, *Urban Infrastructure: Finance and Management*, Cincinnati, University of Cincinnati Library.

- Panudju, Bambang, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Poerbo, Hasan, et al, 1995, *Working with People: Indonesian Experiences with Community-Based Development*, Canada, University of Toronto Press.
- Rukmana, Nana, Steinberg, Florian, Van der Hoff, Robert, 1993, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sanoff, Henry, 2000, *Community Participation Methods in Design and Planning*, USA, John Wiley & Sons Inc.
- Sastropoetro, Santoso, 1988, *Peran serta, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Schubeler, Peter, 1996, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*, Washington DC, The World bank.
- Sevilla, Consuelo, et al alih bahasa Tuwu, Alimuddin, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Silas, Johan, 1983, *KIP Program Perbaikan Kampung di Surabaya 1962-1982: Suatu Inventarisasi dan Evaluasi*, Surabaya, Penerbit Badan Pelaksana Pembangunan Program Perbaikan Kampung Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya bekerjasama dengan Penerbit ITS Surabaya.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Singh, Kulwant, et al, 1997, *Integrated Urban Infrastructure Development in Asia*, New Delhi, Mohan Pramlani.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Sujarto, Joko, 1980, *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*, Bandung, Departemen Planologi ITB.
- Sulaiman, Holil, 1985, *Peran Serta Masyarakat*, Bandung, STKS.
- Soedarno, et al, 1992, *Ilmu Sosial Dasar: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soehendy, Joesoef, 1997, *Peran serta Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan Terkendali di Kawasan Pinggiran Kota*, Bandung, Program Magister PWK, Program Pasca Sarjana ITB.

- Soekardi S., 1993, *Desentralisasi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Perkotaan dan Penyusunan Rencana Tindakan Peningkatan Kelembagaan*, Jakarta, LP3ES.
- Sugiarto, et al, 2001, *Teknik Sampling*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, Astrid, 1999, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta, CV Putra Bardin.
- Thoha, Miftah, 2002, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wilson, James.Q, 1973, *Urban Renewal: The Record and Controversy*, Massachusetts, The MIT Press.
- Yeung, Y.M, McGee, T.G., 1986, *Community Participation in Delivering Urban Services in Asia*, Ottawa, International Development Research Center.
- Yudohusodo, Siswono dkk, 1991, *Rumah untuk Seluruh Rakyat*, Jakarta, Yayasan Padamu Negeri.

#### ARTIKEL

- JICA, 1990, *Community Participation in Urban Renewal*, <http://www4.justnet.ne.jp>
- Landecker, Wermer, 1971, *Types of Integration and Their Measurement*, American Journal of Sociology, vol LVI, No 4 January.
- Lee, Graeme (Senior Municipal Finance Specialist at the World Bank), 1996, *Pakistan's NWFP to Upgrade Infrastructure Through Community Participation*, <http://www.worldbank.org/html>
- McCommon, C, Waener, D dan Yohalem, D, 1990, *Community Management of Rural Water Supply and Sanitation Services UNDP/World Bank, WASH technical Report* dalam UNICEF, 1999, *A Water Handbook*, New York, UNICEF, <http://www.unicef.org/html>
- Peter, Schubeler, 1996, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*, <http://www.worldbank.org/html>
- UNICEF, 1999, *A Water Handbook*, New York, UNICEF, <http://www.unicef.org/html>
- Whyte, A, 1986, *Guidelines for Planning Community Participation Activities in Water Supply and Sanitation Projects*, WHO, Geneva Offset Publication No.96 dalam UNICEF, 1999, *A Water Handbook*, New York, UNICEF, <http://www.unicef.org/html>

**MAKALAH SEMINAR/LOKAKARYA**

Danisworo, Mohammad, 1988, *Konsepsualisasi Gagasan dan Upaya Penanganan Proyek Peremajaan lingkungan permukiman. Pembangunan Kembali sebagai Fokus*, makalah dalam Seminar Strategi Perumahan Perkotaan, Bandung, Kerjasama antara Puslitbang Permukiman dan JICA.

Diwiryo, Ruslan, 1996, Panel Nasional Ahli Pembangunan Prasarana Perkotaan : *Pembangunan Prasarana Perkotaan di Indonesia*, Jakarta, Departemen Pekerjaan Umum.

Hanafie, Jahja, 1998, *Peran Serta Masyarakat dalam Tertib Tata Kehidupan Perkotaan* dipresentasikan pada Seminar Nasional Hari Habitat Sedunia 1998: Safer Cities, Jakarta.

Kamulyan B., 1997, *Perencanaan Prasarana Air Bersih, Sanitasi, Drainase dan Persampahan*, materi Kursus Singkat Drainase dan Sanitasi Kota, Yogyakarta, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM.

Kusuma, Sonny, 1997, *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat* dalam Lokakarya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Jakarta, BKP4N.

**LAPORAN PROYEK**

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah, 1996, SSUDP: *Usulan Teknik Housing And Urban Renewal For Surakarta*.

Departemen Kimpraswil, 2001, *SSUDP: Consulting Services for Benefit Monitoring and Evaluation and Implementation Completion Report*.

Wastuwidaywan, PT, 2001, *Bantuan Teknis Kawasan Perkotaan Kota Surakarta*, Jakarta, Departemen Kimpraswil Dirjend Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Bagian Proyek Pengendalian Pelaksanaan Revitalisasi Kawasan.

Wastuwidyawan, PT, 1995/1996, Laporan Bulanan (Juni 1996-Desember 1996), Proyek Pendamping Technical Assistance SSUDP Bidang Cipta Karya (PPMU) Tahun Anggaran 1995/1996.

**TESIS**

Nurcahyanto, Herbasuki, 2001, *Potensi Peran Serta Masyarakat di dalam Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang*, Semarang, Magister Teknik Perencanaan Kota UNDIP.

Poerbowidjojo, Sri Wardhani, 2000, *Peran Serta Masyarakat pada Pengelolaan Prasarana Lingkungan Paska Proyek Perbaikan Kampung (KIP)*, Yogyakarta, Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM.

Dalam peremajaan lingkungan permukiman tersebut masyarakat dilibatkan secara aktif dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal tersebut selain untuk memperlancar jalannya proyek juga agar keterlibatan masyarakat pada tahap pengelolaan selanjutnya terus berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa dalam peremajaan lingkungan permukiman tersebut terdapat penekanan pada pentingnya pengelolaan prasarana pasca pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan pernyataan oleh JICA (1990:2) bahwa aspek yang sangat penting dalam peremajaan dan peningkatan permukiman adalah pemeliharaan. Tanpa pemeliharaan peremajaan bisa segera menjadi kumuh kembali.

Memang Pemerintah pada umumnya memiliki peranan besar dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana kota. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana terutama dalam operasi dan pemeliharaan. Dinyatakan pula oleh Senior Municipal Finance Specialist di Bank Dunia bahwa :

*“The problem is not just building the infrastructure but using and maintaining it. Through participation, we hope to establish sustainable operating and maintenance procedures”* (Lee,1996:2).

Dari hal tersebut dapat diketahui harapan secara eksplisit adanya pengelolaan lebih lanjut oleh masyarakat setelah beberapa prasarana fisik dibangun. Pengelolaan disini adalah wewenang dan tanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan prasarana.

Secara teoritis, tingginya peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana dipengaruhi faktor internal dan eksternal di masyarakat. Faktor internal terdiri dari ciri-ciri individu, persepsi, ikatan psikologis dan kepemimpinan. Ciri-ciri individu yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet,1994:137-143) akan mempengaruhi

keterlibatan seseorang untuk berperan serta. Dalam kategori ini terdapat pula ciri sosial status hunian dan lama tinggal seseorang dalam suatu lingkungan.

Setiap orang bertindak dan berinteraksi dilandasi pula oleh adanya persepsi yang ia terima terhadap suatu kegiatan (Thoah,2002:123) dan pengaruh ikatan psikologis dengan lingkungan sekitarnya (Susanto,1999:33-37). Selain itu dalam kegiatan bersama faktor kepemimpinan juga berpengaruh pada keterlibatan warga masyarakat untuk berperan serta.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari Pemerintah atau lembaga-lembaga pendamping. Menurut WHO (dalam Hanafie,1998:8) bahwa dukungan Pemerintah dalam peran serta merupakan faktor yang penting. Di samping itu adanya lembaga-lembaga pendamping dapat mendampingi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan, membina serta sebagai fasilitator kelompok untuk mengakses sumber daya di luar kelompok.

Selain itu terdapat pula faktor eksternal karakteristik prasarana yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berperan serta. Karakteristik prasarana ini merupakan kondisi prasarana berkaitan dengan fungsinya untuk mendukung aktifitas penduduk. Dalam hal ini masyarakat akan sulit terlibat dalam pengelolaan prasarana apabila prasarana tersebut tidak dapat difungsikan atau kondisinya terlalu parah untuk diperbaiki yang perbaikannya membutuhkan biaya besar di luar kemampuan masyarakat.

Perlu digarisbawahi bahwa tingginya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan berpengaruh pada tingginya peran serta masyarakat pada tahap pengelolaannya. Dinyatakan bahwa peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan. (Rukmana ,et al,1993: 214).

Dalam peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoong Surakarta, masyarakat telah dilibatkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana. Sehingga

ada dugaan bahwa peran serta masyarakat tersebut dapat terus berlanjut pada tahap pengelolaan prasarana pasca proyek.

Senada dengan Silas (1983:303) yang menyatakan peran serta masyarakat secara fisik terlihat setelah proyek tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan, maka tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana selama pasca proyek tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik prasarana yang ada.

Tetapi kondisi fisik prasarana permukiman di Mojosoongo yang terkena peremajaan lingkungan permukiman dengan pendekatan *redevelopment*, *resettlement* dan pendekatan tanpa perubahan struktur fisik kawasan, pada saat ini kondisinya sangat bervariasi. Bahkan pada daerah tertentu yang termasuk pada kawasan yang telah diremajakan, kemampuan prasarana telah mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan adanya permukiman kumuh yang kualitas lingkungannya rendah dengan luas mencapai 6,6 ha (Wastuwidyan, 2001: Bab 2-7). Penurunan kemampuan prasarana lingkungan permukiman tersebut tentunya tidak terlepas dari rendahnya perawatan dan pengembangan prasarana setelah dibangun. Menurut Pemerintah mengenai kondisi tersebut disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan prasarana yang telah dibangun dinilai masih rendah. Tentunya penilaian mengenai peran serta ini perlu diuji kebenarannya. Hal ini menyangkut bentuk peran serta, tolok ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat peran serta dan faktor pendukungnya.

Berdasarkan pada hal-hal di atas maka perlu adanya upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca *peremajaan lingkungan permukiman* di Mojosoongo Surakarta. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengenali dan mengembangkan faktor-faktor internal dan eksternal masyarakat yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta.

## 1.2. Permasalahan

Dalam rangka peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo yang dilakukan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan, Pemerintah telah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar kegiatan tersebut dapat diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di samping itu secara eksplisit diharapkan nantinya masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengelolaan prasarana yang dibangun.

Secara teoritis tingginya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan berpengaruh terhadap tingginya peran serta masyarakat pada tahap pengelolaannya. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam perawatan dan pengembangan prasarana yang telah dibangun dinilai masih rendah. Sehingga perlu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo yang telah dilakukan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan dengan tanpa merubah struktur fisik kawasan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut maka perlu diketahui dahulu bentuk dan tingkat peran serta masyarakat yang ada serta faktor-faktor internal dan eksternal masyarakat yang mempengaruhinya. Kemudian dicari hubungan antara bentuk dan tingkat peran serta dengan faktor-faktor tersebut. Dari faktor-faktor inilah dijadikan dasar bagi peningkatan peran serta masyarakat.

Dengan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian yang adalah :

1. Bagaimana bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan dengan tanpa merubah struktur kawasan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta.

3. Seberapa jauh pengaruh antara faktor internal masyarakat yaitu ciri-ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal yang terdiri dari Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana dengan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran

Melihat latar belakang dan perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah dalam rangka mendukung usaha peningkatan peran serta masyarakat dengan mengetahui bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan tujuan seperti tersebut diatas maka yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam mengelola prasarana yang ada pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan program *redevelopment*, peremajaan tanpa merubah struktur kawasan dan *resettlement*.
2. Mengetahui tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan program *redevelopment*, peremajaan dengan tanpa merubah struktur kawasan dan *resettlement*.
3. Mengetahui pengaruh antara faktor internal yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal dukungan dari Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana yang mempengaruhi bentuk dan tingkat peran serta yang ada.

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ditunjukkan pada pembahasan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo Surakarta.

#### 1.5.1. Ruang Lingkup Materi

#### 1.5. Ruang Lingkup

peremajaan lingkungan permukiman.

c. Bagi pengembangan ilmu akan memberikan wawasan baru mengenai tingkat peran serta masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan.

b. Bagi Pemerintah, dengan mengetahui keinginan-keinginan masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat peran serta yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi maka Pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai apa yang harus dilakukan guna meningkatkan peran serta masyarakat pasca proyek peremajaan lingkungan permukiman.

a. Manfaat penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat dipakai untuk membantu mengembangkan cara pandang, kemampuan, kepercayaan diri serta komitmen masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan prasarana. Selain itu usulan yang diberikan agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok lain guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya pasca pelaksanaan proyek.

Pemerintah maupun untuk pengembangan ilmu. Manfaat tersebut diantaranya adalah :

dilakukan dengan program *redevelopment, resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan maka terdapat manfaat yang dapat dipetik baik oleh masyarakat, prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo Surakarta yang telah Dengan melakukan penelitian mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan

#### 1.4. Manfaat Penelitian

2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana yang dimaksudkan disini merupakan keterlibatan masyarakat dalam perawatan dan pengembangan fisik prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsinya dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat.
3. Pengertian prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan dimana kondisi dan kinerjanya berpengaruh pada kelancaran aktifitas masyarakat yang dilayaninya. Adapun jenis prasarana yang dikaji dalam penelitian ini adalah prasarana lingkungan yang mampu dikelola oleh masyarakat, yaitu :
  - Prasarana jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II karena masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan tingkat layanan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.
  - Prasarana drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
  - Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.
4. Peremajaan lingkungan permukiman yang dimaksud adalah peremajaan lingkungan permukiman yang telah dilakukan di Mojosongo Surakarta terdiri dari *redevelopment* yang telah dilakukan di RW I, peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan yang telah dilakukan di RW II-VI dan *resettlement* yang telah dilakukan di RW VII. Karena penelitian ini lebih memfokuskan pada peran serta masyarakat pasca perencanaan dan pelaksanaan dimana kegiatan peremajaan telah selesai dilaksanakan maka kajian peremajaan lingkungan permukiman ini dibahas sebatas pendukung dalam analisa.

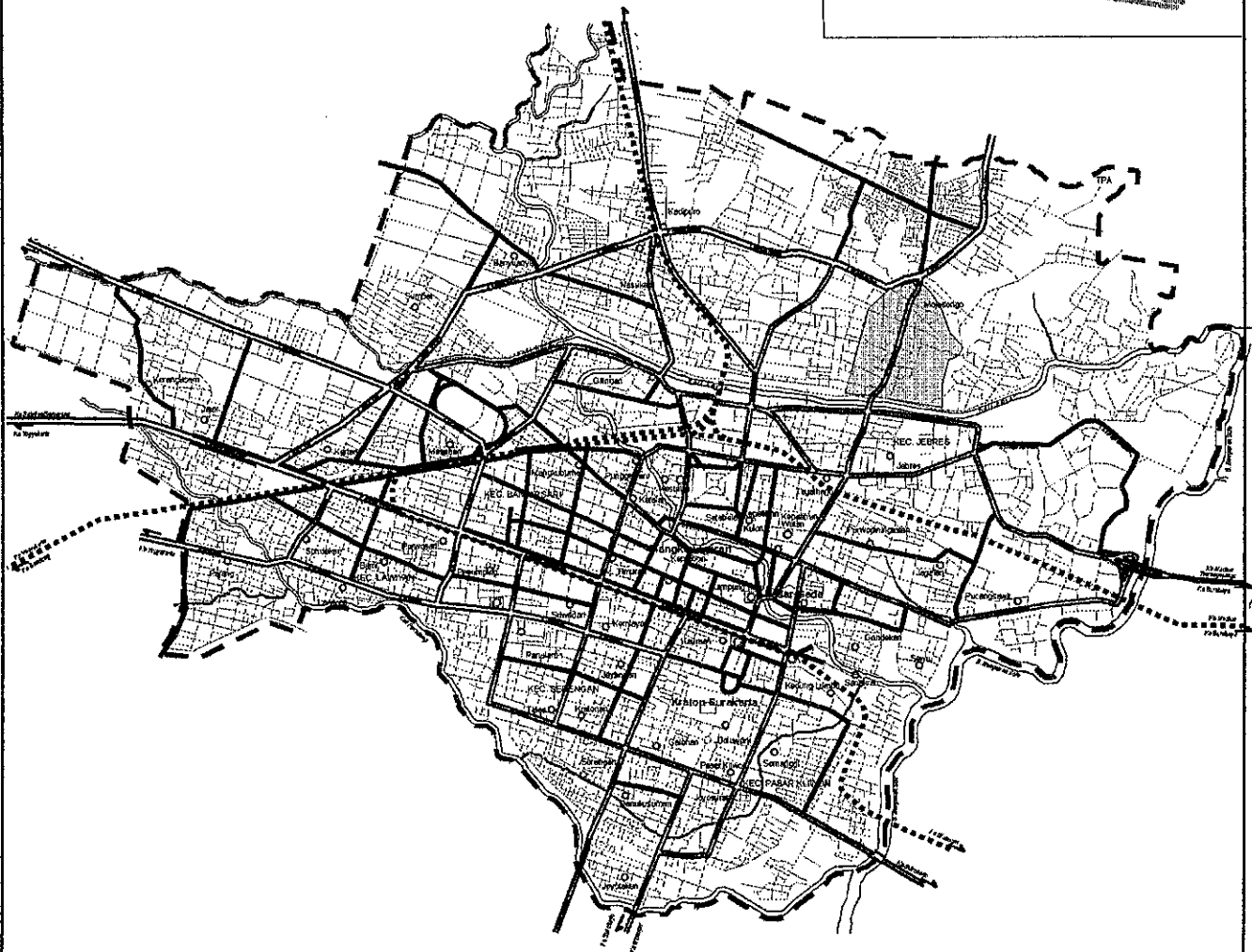
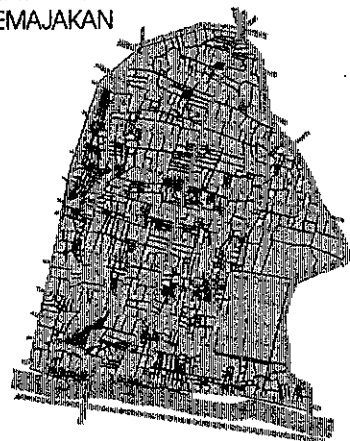
5. Pembahasan ditekankan pada peran serta masyarakat pasca kegiatan peremajaan lingkungan permukiman sedangkan peran serta masyarakat selama perencanaan dan pelaksanaan proyek peremajaan lingkungan permukiman di Mojosoongo dibahas sebatas bentuk sumbangan dan tingkat peran serta masyarakat yang terjadi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ikatan psikologis.
6. Mengenai variabel-variabel penelitian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta digali dari studi literatur dan dikelompokkan dalam faktor internal masyarakat yang terdiri dari ciri-ciri individu, ikatan psikologis, persepsi dan kepemimpinan serta faktor eksternal masyarakat yang terdiri dari peran Pemerintah, pihak ketiga sebagai pendamping dan karakteristik prasarana. Dalam hal ini faktor-faktor lain di luar faktor tersebut tidak dibahas dan diasumsikan stabil.



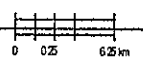

### **1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah**

Kota Surakarta merupakan pusat wilayah pengembangan VIII Jawa Tengah Bagian Selatan-Timur, memiliki wilayah seluas 44,04 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2000 adalah 550.251 jiwa serta dengan tingkat kepadatan 12.494 jiwa/km<sup>2</sup>. Dalam hal ini wilayah Kalurahan Mojosoongo masuk dalam SWP X yang di dalam RUTRK termasuk wilayah pengembangan perumahan dan permukiman, memiliki luas wilayah 5,33 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2000 adalah 38.659 jiwa dan tingkat kepadatan 7.254 jiwa/km<sup>2</sup>.

Adapun kawasan yang terkena proyek peremajaan lingkungan permukiman merupakan bagian wilayah Kalurahan Mojosoongo yang terletak di sebelah Utara Sungai Kali Anyar terdiri dari 7 RW dengan luas luas  $\pm$  30 Ha seperti yang terlihat pada Gambar 1.1.

KAWASAN YANG  
DIREMAJAKAN



 MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	TESIS	PETA	KETERANGAN	NO. GAMBAR	UTARA
	PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRARARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DI MOJOSONGO	PETA LOKASI KAWASAN MOJOSONGO	 WILAYAH MOJOSONGO YANG DIREMAJAKAN	1.1. SKALA 	 SUMBER : BAPPEDA KOTA SURAKARTA 2003

Pertimbangan pemilihan lokasi studi ini didasarkan karena pada kawasan Mojosongo telah dilaksanakan proyek peremajaan lingkungan permukiman yang telah dilakukan dalam prosesnya menggunakan pendekatan peran serta masyarakat dan merupakan proyek pertama Pemerintah dalam peremajaan lingkungan permukiman di Surakarta dengan skala yang besar.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program peremajaan lingkungan permukiman, unit pendekatan yang dipakai adalah RW di Kelurahan Mojosongo Surakarta yang terkena proyek peremajaan lingkungan permukiman, sehingga penelitian ini menggunakan unit spasial lingkungan RW pula. Alasan pemilihan lingkup RW ini adalah :

- a. Sejak perencanaan dan pelaksanaan masyarakat yang dilibatkan untuk berkoordinasi adalah pada lingkup RW.
- b. Pada tingkat RW sudah dimungkinkan terjadinya pengelolaan prasarana oleh masyarakat sendiri.

#### **1.6.Kerangka Pemikiran**

Dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Surakarta adalah melakukan peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo yang telah dilakukan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan. Dalam kegiatan peremajaan ini masyarakat setempat diikutsertakan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek dengan maksud untuk memperoleh dukungan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta adanya pengelolaan lebih lanjut oleh masyarakat.

Secara teoritis tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan mempengaruhi tingginya tingkat keterlibatan dalam pengelolaan pasca

proyek berlangsung. Tetapi didasarkan kondisi fisik terdapat pernyataan bahwa masyarakat kurang berperan aktif dalam pengelolaan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka permasalahan yang diangkat berhubungan dengan upaya meningkatkan peran serta masyarakat yang ada dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta yang telah dilakukan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka mendukung usaha peningkatan peran serta masyarakat tersebut. Selanjutnya mengetahui seberapa besar hubungan antara faktor tersebut dengan keinginan bentuk dan tingkat peran serta masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan tersebut, setelah mengkaji teori tentang peran serta masyarakat dan mengkaji data faktor-faktor yang berpeluang mempengaruhi peran serta dilakukan analisa. Analisa dilakukan pada tiga kawasan yang telah dilakukan peremajaan dengan program *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan. Pada masing-masing kawasan tersebut dilakukan penggolongan peran serta yang ada pada bentuk dan tingkat peran serta yang diperoleh dari kajian teori dan tingkat peran. Di samping itu dianalisa pula hubungan antar faktor-faktor yang berpengaruh dengan bentuk dan tingkat peran serta sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan secara menyeluruh di Mojosongo Surakarta.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi beberapa bab-bab yang menguraikan :

Bab I Pendahuluan : Berisi latar belakang; permasalahan dan rumusan masalah; tujuan dan sasaran; manfaat penelitian; ruang lingkup kajian dan wilayah; kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

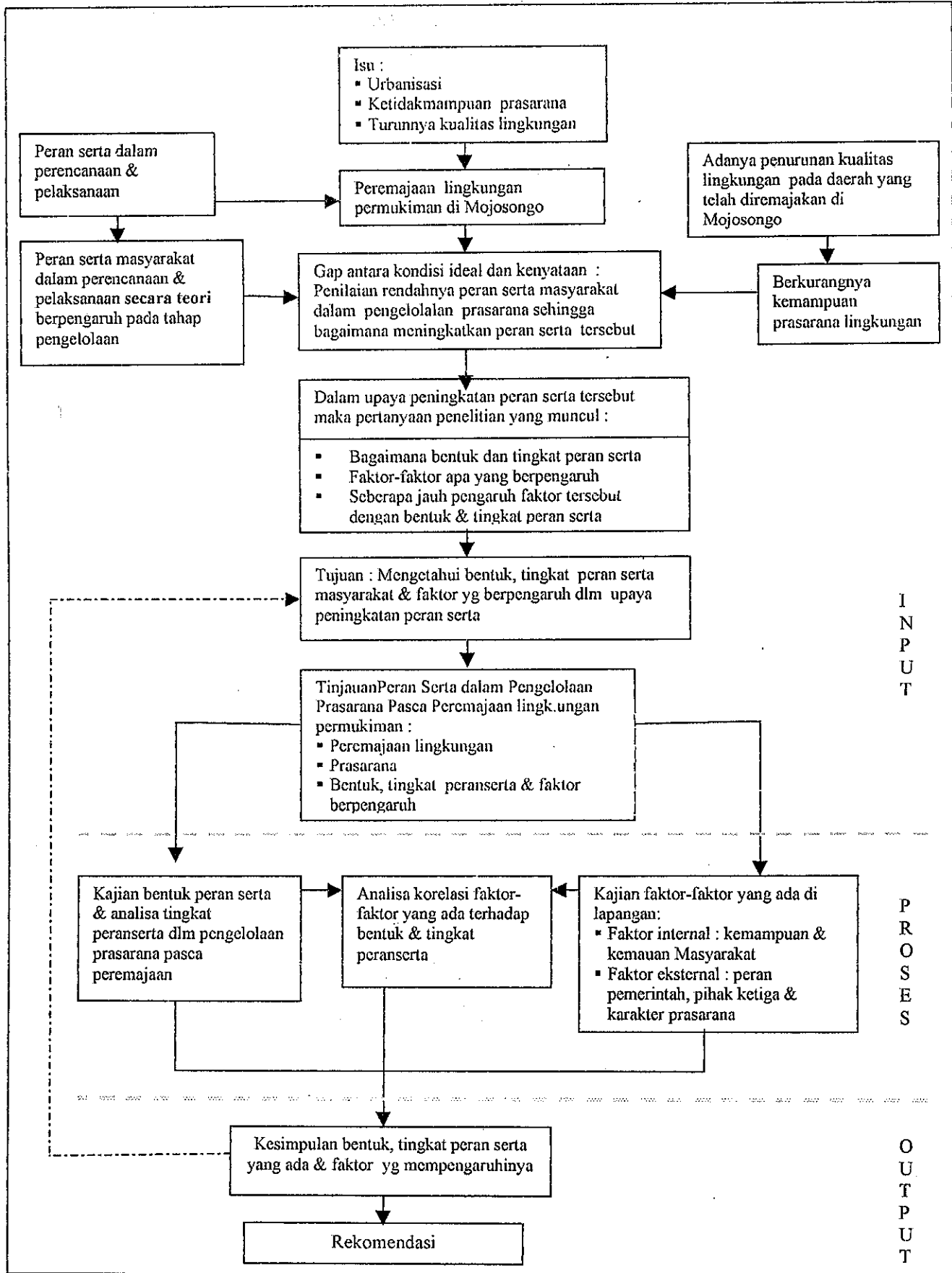
Bab II Kajian Teori : Berisi teori-teori yang digunakan untuk menentukan variabel penelitian sebagai input dalam analisa pendekatan.

Bab III Pendekatan dan Metodologi : Bab ini berisi pendekatan studi dan metodologi studi yang menyangkut : jenis penelitian; jenis data; teknik pengumpulan data; teknik pengambilan sampel dan metode analisa.

Bab IV Gambaran Umum Peremajaan Lingkungan Permukiman di Mojosongo : Bab ini berisi gambaran umum kota Surakarta; gambaran umum kelurahan Mojosongo dan diakhiri dengan gambaran umum kawasan yang telah diremajakan di Mojosongo yang meliputi kondisi wilayah sebelum peremajaan, pelaksanaan peremajaan dan kondisi wilayah sesudah diremajakan.

Bab V Analisa peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana pasca peremajaan lingkungan permukiman : Bab ini berisi analisa peran serta masyarakat pada RW yang terkena program redevelopment, resettlement dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan serta diakhiri dengan analisa peran serta masyarakat di seluruh kawasan yang telah diremajakan. Masing-masing analisa tersebut mengkaji bentuk peran serta, tingkat peran serta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab VI Kesimpulan dan rekomendasi : Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.



GAMBAR 1.2.  
BAGAN PEMIKIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

#### **2.1. Tinjauan Peremajaan Lingkungan Permukiman**

Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, merupakan penyebab utama pesatnya perkembangan kegiatan suatu kota. Perkembangan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap struktur kota. Perubahan tersebut akan mengarah pada kemerosotan suatu lingkungan permukiman, tidak efisiennya penggunaan tanah daerah pusat kota, dan mengungkapkan bahwa penurunan kualitas tersebut bisa terjadi di setiap bagian kota. Kemerosotan lingkungan seringkali dikaitkan dengan masalah sosial, seperti kriminalitas, kenakalan remaja, prostitusi sebagainya (Sujarto, 1980:17). Meskipun sulit untuk bisa diukur, peremajaan kota diyakini akan membawa perbaikan-perbaikan keadaan sosial pada wilayah-wilayah yang mengalami kemerosotan lingkungan. Peremajaan kota adalah upaya pembangunan yang terencana untuk merubah atau memperbaharui suatu kawasan di kota yang mutu lingkungannya rendah (Yudohusodo dkk,1991:332).

Dalam Panudju (1999:181-182), peremajaan lingkungan permukiman merupakan bagian dari program peremajaan kota. Peremajaan lingkungan permukiman adalah pembongkaran sebagian atau seluruh permukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah negara dan selanjutnya ditempat sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkungan, rumah susun serta bangunan-bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Sedangkan menurut Cipta Karya (1996:III-6) peremajaan lingkungan permukiman di kota merupakan proses penataan kembali kawasan kumuh perkotaan agar

dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang kegiatan masyarakatnya. Proses tersebut terutama diterapkan pada kawasan permukiman yang dihuni oleh kelompok masyarakat kota berpenghasilan rendah.

Lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan lengkap dengan sarana dan prasarana kebutuhan hidup sehari-hari serta merupakan bagian dari suatu kota (Dirjend Cipta Karya PU, IAP, 1997:60). Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan upaya peremajaan pada suatu lingkungan (Danisworo, 1988:8-13) yaitu :

- a. *Redevelopment* atau pembangunan kembali, adalah upaya penataan kembali suatu kawasan kota dengan terlebih dulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana pada sebagian atau seluruh kawasan tersebut yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi kehadirannya. Biasanya, dalam kegiatan ini terjadi perubahan secara struktural terhadap peruntukan lahan, profil sosial ekonomi, serta ketentuan-ketentuan pembangunan lainnya yang mengatur intensitas pembangunan baru.
- b. *Gentrifikasi* adalah upaya peningkatan vitalitas suatu kawasan kota melalui upaya peningkatan kualitas bangunan atau lingkungannya tanpa menimbulkan perubahan berarti terhadap struktur fisik kawasan tersebut. Gentrifikasi bertujuan memperbaiki nilai ekonomi suatu kawasan kota dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas serta kemampuannya tanpa harus melakukan pembongkaran berarti.
- c. *Rehabilitasi* pada dasarnya merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
- d. *Preservasi* merupakan upaya untuk memelihara dan melestarikan lingkungan pada kondisinya yang ada, dan mencegah terjadinya proses kerusakannya. Metode ini biasanya diterapkan untuk obyek memiliki arti sejarah atau arti arsitektur tertentu.

e. *Konservasi* merupakan upaya untuk melestarikan, melindungi serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat, seperti kawasan dengan kehidupan budaya dan tradisi yang mempunyai arti, kawasan dengan kepadatan penduduk yang ideal, cagar budaya, hutan lindung, dan sebagainya. Konservasi dengan demikian, sebenarnya merupakan pula upaya preservasi, namun dengan tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung dan memberi wadah bagi kegiatan yang sama seperti kegiatan asalnya atau bagi kegiatan yang sama sekalibaru melalui usaha penyesuaian, sehingga dapat membiayai sendiri kelangsungan eksistensinya.

Selain itu terdapat *resettlement*, *resettlement* adalah proses pemindahan penduduk dari lokasi permukiman yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru yang sudah disiapkan sesuai dengan rencana permukiman kota. Dalam hal ini peremajaan lingkungan permukiman di Mojosongo Surakarta dilakukan dengan *redevelopment*, *resettlement* dan peremajaan tanpa perubahan struktur kawasan.

Perlu ditekankan di sini bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari usaha peremajaan yang telah dilakukan dan dari teori tentang manajemen menekankan pada keuntungan dan pentingnya *peran serta* masyarakat lokal (Couch,1990:176). Mengenai peran serta masyarakat dalam peremajaan lingkungan permukiman di kota, Weaver mengemukakan, bahwa pengertian peran serta bukanlah menerima saja secara pasif terhadap apa yang akan dilakukan terhadap mereka, tetapi adalah peran aktif tokoh-tokoh setempat beserta lembaga-lembaga yang ada sebagai usaha untuk mendorong kegiatan komunitas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa, masyarakat perlu dilibatkan dalam peremajaan lingkungan permukiman dengan maksud agar mereka tidak melakukan oposisi terhadap program tersebut, karena adanya reaksi menentang dari masyarakat akan membawa dampak sosial dan politis yang merugikan, terutama bila menyangkut kelompok atau etnis tertentu (Wilson, 1973:408).

## 2.2. Tinjauan Prasarana Lingkungan Permukiman

### 2.2.1. Pengertian Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan banjir setempat.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu waktu tertentu, keseimbangan diantara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas (Diwiryo, 1996:1).

Dari pengertian di atas terlihat bahwa prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan dimana kondisi dan kinerjanya akan berpengaruh pada kelancaran aktifitas dari masyarakat sebagai pengguna atau pemanfaat prasarana. Sementara itu upaya-upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan prasarana dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (1991:19) prasarana kota meliputi penyediaan air dan fasilitas limbah, drainase air permukaan, jalan

raya, fasilitas transportasi, jaringan distribusi energi, fasilitas telekomunikasi dan jaringan pelayanan lainnya. Secara lebih rinci komponen dari prasarana perkotaan terdiri dari tujuh macam yaitu air bersih, drainase, air kotor/sanitasi, sampah, jalan kota, jaringan listrik dan jaringan telepon dimana tiap-tiap komponen mempunyai karakteristik yang berbeda.

Dari jenis-jenis prasarana di atas maka prasarana telekomunikasi, listrik, air bersih sistem perpipaan dan air limbah sistem pengolahan terpusat, biasanya dikelola langsung oleh instansi Pemerintah atau *badan pengelola khusus* karena membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang besar. Dan mengenai prasarana air bersih non perpipaan serta air limbah sistem pengolahan setempat, biasanya dikelola oleh warga secara individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri.

Sedangkan prasarana yang biasanya dikelola oleh masyarakat merupakan prasarana yang dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat bukan individu-individu tertentu dan pengoperasian serta pemeliharannya sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada.

Prasarana tersebut yaitu :

- a. Prasarana jalan yaitu Jalan Lokal Sekunder Tipe I dan II karena sebenarnya masyarakatlah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan tingkat layanan prasarana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.
- b. Prasarana drainase yaitu saluran di sepanjang kiri kanan jalan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari dan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memeliharanya. Rendahnya kinerja saluran akan mengakibatkan genangan yang berpengaruh langsung pada aktifitas masyarakat dan kondisi lingkungan.
- c. Prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan di tempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

### **2.2.2. Pengelolaan Prasarana oleh Masyarakat**

Secara sederhana, pengelolaan pelayanan prasarana dapat dipandang sebagai proses yang terus menerus dalam pengoperasian dan pemeliharaan terhadap prasarana yang telah ada/dibangun (Schubeler, 1996:36). Kegiatan masyarakat yang relevan dengan pengoperasian dan pemeliharaan ini adalah perawatan dan pengembangan prasarana yang telah dibangun dalam rangka menjamin keberlanjutan fungsi atau operasionalisasi prasarana.

Menurut McCommon (dalam UNICEF, 1999:20), ciri yang menonjol dari pengelolaan masyarakat adalah sifat pengambilan keputusan dan tanggung jawab lokal untuk melaksanakan keputusan tersebut. Syarat bagi pengelolaan oleh masyarakat adalah adanya kemauan untuk memperbaiki kondisi yang ada, informasi, teknologi yang sesuai, kemampuan sumber daya, terdapat kerangka kebijakan memberikan peluang dan adanya dukungan eksternal baik dari pemerintah ataupun lembaga swasta.

Dari pengertian-pengertian diatas maka pengelolaan prasarana oleh masyarakat sejalan dengan Silas (1983:304) adalah kegiatan masyarakat untuk merawat dan mengembangkan prasarana yang telah dibangun guna menjamin keberlanjutan fungsinya sehingga tetap mampu mendukung aktifitas yang dilayaninya.

## **2.3. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan**

### **2.3.1. Pengertian Peran Serta Masyarakat**

Menurut Pongquan (dalam Hanafie,1998:2) konsep peran serta masyarakat telah banyak dibahas dalam berbagai sudut pandang oleh peneliti, perencana, dan kalangan birokrat. Tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan pendapat dari ketiga unsur di atas, pada umumnya literatur tentang peran serta masyarakat melihat distribusi sumber daya sebagai fokus perhatian.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan menurut PBB adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil (United Nations dalam Midgley, 1986: 24). Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992:124-125) menyatakan bahwa peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan kata lain, ada keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan untuk mengambil bagian.

Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:69-71).

Menurut Ramos dan Roman (dalam Yeung, Mc Gee, 1986: 97) peran serta masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktifitas tertentu.

Dari hal-hal diatas maka pengertian peran serta masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu serta dengan memberikan kontribusi sumber daya yang dimilikinya.

Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produser pelayanan prasarana dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan prasarana yang tersedia untuk mereka. Terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan dalam peran serta masyarakat pada pengelolaan prasarana yaitu (Schubeler, 1996:32):

- a. Peran serta tidak terbatas pada proyek pembangunannya saja tetapi termasuk berbagai aktifitas kehidupan tiap-tiap hari diluar konteks proyek tersebut.
- b. Peran serta dalam pengelolaan prasarana lebih merupakan proses dan bukan produk.
- c. Penduduk yang berperan serta tidak terbatas pada penduduk setempat tetapi dapat pula pihak-pihak luar yang menaruh perhatian dalam pengelolaan tersebut.
- d. Peran serta dalam pengelolaan pelayanan prasarana didasarkan pada kesediaan hubungan antara kelompok, aktor atau stakeholder.

Berdasarkan hal tersebut maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan prasarana. Kegiatan tersebut dapat berupa perawatan dan pengembangan fisik prasarana yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan fungsi prasarana dalam rangka mendukung aktifitas masyarakat.

### **2.3.2. Kebutuhan Peran Serta Masyarakat**

Kebutuhan peran serta dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Alasan-alasan efektifitas dan efisiensi adanya peran serta masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut (Rukmana, et al,1993: 214):

- a. Peran serta masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas.
- b. Peran serta masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu

memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang dan tenaga.

- c. Peran serta masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikutsertakan dalam aktifitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Pemerintah mungkin saja memberikan proyek untuk meningkatkan suatu fasilitas umum. Namun meskipun fasilitas itu telah berdiri sering kali tidak digunakan dengan efektif. Skala prioritas masyarakat mungkin saja berbeda dari skala prioritas yang dimiliki oleh perencana, walaupun masyarakat telah diberi informasi mengenai pilihan yang ada (Conyers,1994: 189). Mereka memiliki kepekaan tentang apa yang bisa dijalankan dan apa yang akan mengalami hambatan (Sanoff,2000:7). Karena itu dalam tahap awal masyarakat diikutsertakan dalam pertemuan membahas proyek. Dengan memahami tujuan proyek masyarakat dapat memberikan umpan balik, yang akhirnya bisa menjadi suatu proyek yang betul-betul memenuhi keinginan mereka.

Kondisi-kondisi tersebut membuat perencana sadar untuk membagi tanggung jawab dalam pemeliharaan, masyarakat sebagai pemanfaat atau pengguna dilibatkan dalam berbagai cara untuk memelihara sistem masyarakatnya sendiri. Disadari saat ini jika masyarakat diberi tanggung jawab dalam pemeliharaan mereka seharusnya dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi proyek. Mereka harus membangun rasa kepemilikan dan mengetahui bahwa pemeliharaan tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat. (UNICEF,1999:14).

Misalnya dalam hal pemilihan dan penetapan jenis sarana dan prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi pemanfaatannya agar langsung dirasakan masyarakat, serta dapat

merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki dari masyarakat yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut. (Yudohusodo dkk,1991:148)

Lebih jauh menurut Conyers (Conyers,1994: 154-155) peran serta masyarakat penting sebab pertama, peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, kedua, masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan ketiga, anggapan merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan lingkungan mereka sendiri.

### 2.3.3. Bentuk Peran Serta Masyarakat

Menurut Derick (dalam Bryant,1987:280) nilai peran serta tidak hanya terletak pada ada tidaknya peran serta itu. Hal yang terpenting adalah menentukan jenis peranserta yang tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mengenali klasifikasi atau tipe dan bentuk peran serta masyarakat.

Menurut Parwoto (dalam Soehendy,1997:28), bentuk kontribusi dalam berperan serta dapat berbentuk gagasan, tenaga dan materi. Sedangkan Keith Davis (Sastropetro,1988:16) menyebutkan bahwa bentuk peran serta terdiri dari :

- a. konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga
- d. mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri
- e. sumbangan dalam bentuk kerja
- f. aksi massa
- g. mengadakan pembangunan di kalangan keluarga
- h. membangun proyek masyarakat yang bersifat otonomi

Dusseldorp (dalam Slamet;1994:10-21)mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe peranserta. Klasifikasi didasarkan pada sembilan dasar. Masing-masing dasar jarang

terpisah satu sama lain, artinya dalam banyak hal mengidentifikasi suatu kegiatan peran serta yang sama.

- a. Penggolongan peran serta berdasarkan pada derajat kesukarelaan
- b. Penggolongan peran serta berdasarkan cara keterlibatan.
- c. Penggolongan peran serta berdasarkan pada kelengkapan keterlibatan berbagai tahap dalam proses pembangunan.
- d. Penggolongan peran serta berdasarkan pada tingkatan organisasi
- e. Penggolongan peran serta berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan
- f. Penggolongan peran serta berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan.
- g. Penggolongan peran serta berdasarkan pada efektifitas
- h. Penggolongan peran serta berdasarkan pada siapa yang terlibat
- i. Penggolongan berdasarkan pada gaya peran serta

Telah dijelaskan di atas bahwa berbicara mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana maka hal-hal yang harus diperhatikan yaitu (Schubeler, 1996:32) peran serta lebih merupakan proses bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, peran serta dapat dilakukan oleh pihak lain dan pentingnya unsur kesediaan masyarakat. Sehingga dari berbagai pandangan bentuk peran serta yang ada maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana lingkungan permukiman dapat dikategorikan dalam :

- a. Bentuk sumbangan yaitu material, uang, tenaga dan pikiran.
- b. Bentuk kegiatan yaitu peran serta dilakukan bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan peran serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat atau diserahkan pihak lain. Selain itu bentuk peran serta dapat dikenali dari intensitas dan frekuensi kegiatan serta derajat kesukarelaan untuk melakukan kegiatan bersama.

#### **2.3.4. Ciri-ciri dan Hambatan dalam Peran Serta Masyarakat**

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

- a. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Dengan demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya kesepakatan, adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja serta tanggung jawab dalam suatu organisasi kerja.

Dalam fase-fase pembangunan sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa penyebab keengganan masyarakat untuk *berperan serta* adalah pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tidak akan *berperan serta* jika merasa hasil *peran sertanya* tidak berpengaruh pada hasil akhir serta kedua, masyarakat enggan *berperan serta* dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktifitas yang tidak berpengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

Korten (dalam Slamet,1994:66-74) menunjuk sejumlah hambatan berkaitan dengan peran serta masyarakat yaitu:

- a. Hambatan dalam badan-badan, tempat pembentukan keputusan, sikap-nilai-keahlian, sistem evaluasi, stabilitas penempatan pegawai. Dalam hal terdapat pula hambatan birokrasi.
- b. Hambatan dalam komunitas, kurangnya organisasi lokal yang memadai, kurangnya keahlian berorganisasi, lemahnya fasilitas komunikasi, perbedaan dalam golongan-golongan.

### 2.3.5. Tingkat Peran Serta Masyarakat

Menurut Arstein (dalam Panudju,1999:69-76) tingkat peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

*a. Manipulation atau manipulasi*

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

*b. Therapy atau penyembuhan*

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

*c. Informing atau pemberian informasi*

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. *Consultation atau konsultasi*

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survei tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

e. *Placation atau perujukan*

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. *Partnership atau kemitraan*

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

g. *Delegated power atau pelimpahan kekuasaan*

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik

kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

*h. Citizen control atau masyarakat yang mengontrol*

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

8	<b>CITIZEN CONTROL</b>	<b>DEGREES OF CITIZEN POWER</b>
7	<b>DELEGATED POWER</b>	
6	<b>PARTNERSHIP</b>	
5	<b>PLACATION</b>	<b>DEGREES OF TOKENISM</b>
4	<b>CONSULTATION</b>	
3	<b>INFORMING</b>	
2	<b>THERAPY</b>	<b>NON PARTICIPATION</b>
1	<b>MANIPULATION</b>	

**GAMBAR 2.1.**  
**TIPOLOGI TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DARI ARSTEIN**  
*Sumber : Pamudju 1999 diolah, 2003*

Dari ke delapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy.
- b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau degrees of tokenism yang meliputi informing, consultation dan placation.
- c. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau degrees of citizen power yang meliputi partnertship, delegated power dan citizen control.

Meskipun tipologi tersebut di atas berdasarkan kasus-kasus peremajaan kota, dapat pula dipakai sebagai gambaran atau contoh pada kegiatan-kegiatan lain.

Untuk mengukur tingkat peran serta dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994:82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu :

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
- b. Kehadiran dalam pertemuan
- c. Membayar iuran/sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Menurut Goldhamer untuk mengukur peran serta dengan menggunakan lima variabel yaitu :

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memegang jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala peran serta individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk mengukur peran serta masyarakat yaitu :

- a. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan
- b. Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi
- c. Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik
- d. Kesiediaan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan

### **2.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta**

Beberapa faktor yang berpengaruh untuk membuat pendekatan peran serta masyarakat bekerja yaitu (Yeung, McGee, 1986:97-99):

- a. Motivasi, insentif bagi kelompok untuk bekerja sama harus ada jika interaksi dan keterlibatan ingin diberlanjtkan.
- b. Kepemimpinan masyarakat, keberadaan struktur kepemimpinan dalam organisasi formal dan informal di masyarakat.

- c. Kemampuan untuk melakukan Learning approach, adanya fleksibilitas untuk mencoba aktivitas dan metode baru serta memberi peluang mekanisme feedback untuk belajar dari kesuksesan dan kesalahan. Dalam hal ini masyarakat diberi hak untuk menentukan pilihannya sendiri dan menanggung konsekuensinya.
- d. Sumber daya, kemampuan sumber daya di masyarakat.

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi masyarakat. (Schubeler, 1996:66). Sedangkan menurut Sulaiman (1985:39) selain adanya kepercayaan diri, tanggung jawab sosial, peranan pemimpin, prakarsa dan kepekaan masyarakat maka salah satu unsur peran serta adalah kemauan dan kemampuan masyarakat.

Dalam Sastropetro (1988:12-13), Gordon W. Allport berpendapat bahwa seseorang yang *berperan serta* sebenarnya mengalami keterlibatan egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Sedangkan Keith Davis mengatakan bahwa *peran serta* adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri personal individu dengan tingkat *peran serta*. Tentunya ciri-ciri individu tersebut yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet, 1994:137-143) akan sangat berpengaruh pada kegiatan peran serta.

Salah satu ciri sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di kota adalah pada umumnya mereka menunjukkan jiwa bersatu, kepercayaan pada diri sendiri dan kestabilan yang kuat. Orang-orang rela bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan bersama

dan dalam banyak kasus telah mengorganisasikan diri untuk menyelamatkan rumah dan masyarakat mereka. Ada suatu sikap informal dan hubungan bertetangga yang baik, yang mendukung serta memperingan beban orang-orang itu. Banyak daerah yang sangat stabil, kebanyakan keluarga sudah hidup bertahun-tahun di sana dan telah ikut membentuk kelompok gubuk-gubuk di tengah masyarakat. Dalam hal ini salah satu ciri sosial ekonomi penduduk berkaitan erat dengan lama tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lama tinggal ini akan mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta terlibat dalam kegiatan bersama.

Ciri-ciri tersebut juga berhubungan dengan status seseorang dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan perumahan seperti disebutkan Turner (dalam Panudju, 1999:10), tanpa kejelasan tentang status kepemilikan hunian dan lahannya seseorang atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman sehingga mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini status hunian seseorang akan berpengaruh pada tingkat peran sertanya dalam kegiatan bersama untuk memperbaiki lingkungan.

Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan muncul golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno, 1992:136). Faktor usia tentunya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Penemuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamet, 1994:142).

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap

terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Sedangkan faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. (Slamet, 1994, 115-116)

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Besarnya biaya investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak semata-mata bergantung kepada kemampuan menanamkan uangnya, tetapi juga pada keuntungan dan kepuasan dari apa yang akan mereka dapatkan dari investasi tersebut. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999: 77-78).

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok kepentingan yang akan dilayani oleh adanya peran serta tersebut. Kelompok ini merupakan wujud dari interaksi sosial antar warga. Lebih jauh Bierens dan Haan mengatakan (dalam Susanto, 1999: 33-37), bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan pada anggota-anggotanya. Suatu kelompok bukan merupakan jumlah anggotanya saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Adanya suatu kebutuhan psikologis manusia untuk mempunyai dan digolongkan pada suatu kelompok, tempat ia berlindung dan merasa aman. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Seperti yang diuraikan dalam sub bab sebelumnya mengenai kebutuhan akan peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana yang telah dibangunnya. Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi pemanfaatannya agar langsung dirasakan masyarakat, serta dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki dari masyarakat yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut (Yudohusodo dkk,1991:148).

Sebenarnya setiap orang bertindak dan berinteraksi dilandasi pula oleh adanya persepsi yang ia terima terhadap kegiatan peran serta. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Thoha,2002:123). Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Dalam persepsi terkandung penguat positif dan negatif hakekatnya memperkuat respon dan menaikkan kemungkinan terulangnya kembali di kelak kemudian hari (Thoha, 2002:56-71). Tetapi penguat positif dan negatif tersebut di dalam mencapai implikasi terhadap perilaku menempuh cara yang berbeda. Penguat positif memperkuat dan menaikkan perilaku dengan cara menghadirkan konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan. Adapun penguat negatif di dalam rangka memperkuat dan menaikkan perilaku tersebut dengan memperhentikan atau menarik dari konsekuensi-konsekuensi yang

tidak diinginkan. Pengalaman melakukan kegiatan peran serta tanpa mendapatkan manfaat langsung yang diperoleh akan mempengaruhi keinginan berperan serta di kemudian hari.

Di samping itu teori keseimbangan yang dikembangkan Theodore Newcomb menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain untuk bertindak dan berinteraksi dapat didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Individu A akan berinteraksi dengan individu B lantaran adanya sikap dan nilai yang sama dalam rangka mencapai suatu tujuan X. Kesamaan ini dapat berupa kesamaan pandangan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini keinginan berperan serta dipengaruhi oleh kesamaan pandangan mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan prasarana yang telah ada.

Keaktifan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama dipengaruhi pula oleh kepemimpinan. Dalam Thoha (2002,226-240) disebutkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan, lebih jauh George R. Terry merumuskan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Untuk mengarahkan tersebut dibutuhkan adanya legitimasi berupa dukungan dari anggota terhadap kepemimpinannya. Perilaku mengarahkan tersebut dikombinasikan perilaku mendukung akan membentuk gaya kepemimpinan.

Selain itu terdapat faktor dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan pemberian perintisan (Yudohusodo dkk,1991:148-149). Di dalam kasus "Perbaikan Kampung" investasi oleh pihak pemerintah dalam prasarana fisik telah mendorong swadaya dalam pengelolaan lingkungan yang lebih

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesesuaian hasil peremajaan lingkungan permukiman dengan keinginan dan usulan masyarakat</li> </ul>	<p>diukur dengan tipologi Arstein</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kesesuaian hasil peremajaan dengan keinginan dan usulan warga</li> </ul>
3.3.	Persepsi kegiatan peran serta	Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian kegiatan peran serta</li> <li>▪ Persepsi mengenai tanggung jawab pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian warga terhadap manfaat kegiatan bersama warga RW</li> <li>▪ Tanggapan warga mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan prasarana yang telah dibangun dlm peremajaan lingkungan permukiman.</li> </ul>
3.4.	Kepemimpinan	Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang2 agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kemampuan pemimpin tersebut dpt dilihat berdasar perannya dlm masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keaktifan pemimpin dlm setiap pertemuan/ kegiatan bersama</li> <li>▪ Peran pemimpin dlm memberikan pengarahan</li> <li>▪ Dukungan pemimpin dari warga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat kehadiran pemimpin dlm setiap kegiatan bersama/pertemuan</li> <li>▪ Intensitas pemimpin dlm memberikan pengarahan</li> <li>▪ Intensitas dukungan warga terhadap pemimpin</li> </ul>
4	<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>			
4.1.	Peran Pemerintah	Peran pemerintah adalah peran dalam memberikan stimulan berupa konsultasi, material atau dana dan dari manfaat yang diperoleh masyarakat berkaitan dengan prasarana yang telah dibangunnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stimulan konsultasi dan kemudahan</li> <li>▪ Stimulan dana</li> <li>▪ Stimulan material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada/tidaknya pemberian bantuan oleh pemerintah</li> <li>▪ Prosentase jumlah dana kegiatan yg telah diberikan pemerintah dgn dana yg disediakan warga.</li> <li>▪ Prosentase besarnya nilai material yg telah diberikan dibandingkan dgn yg disediakan warga.</li> </ul>
4.2.	Peran ketiga sebagai pendamping	Pihak-pihak diluar masyarakat non pemerintah yang ikut mengarahkan, membina dan mendampingi kegiatan peran serta dan memberikan akses sumber daya di luar jangkauan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keaktifan pendamping</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterlibatan pihak ketiga sebagai pendamping dalam kegiatan peran serta.</li> </ul>
4.3.	Karakteristik prasarana	Kondisi dan kinerja dari prasarana yang mempengaruhi aktsf masy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinerja Prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi prasarana dan fungsi untuk melayaninya</li> </ul>

Sumber :Literatur diolah,2003

### **BAB III**

## **METODE PENDEKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PRASARANA PASCA PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) dengan maksud untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Namun demikian, penelitian ini tidak mengesampingkan penelaahan pustaka (*literature study*), terutama pada awal penyusunan kerangka pemikiran dan landasan teori.

### **3.2. Jenis Data**

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

#### *a. Data Primer*

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiarto, et al,2001:16-17). Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data primer melalui survey (field research) yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan tertulis kepada responden.

- a. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Dengan demikian peran serta harus mengandung unsur-unsur adanya kesepakatan, adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja serta tanggung jawab dalam suatu organisasi kerja.

Dalam fase-fase pembangunan sesuai dengan pandangan Conyers (1994:186) bahwa penyebab keengganan masyarakat untuk *berperan serta* adalah pertama, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri dimana masyarakat tidak akan *berperan serta* jika merasa hasil *peran sertanya* tidak berpengaruh pada hasil akhir serta kedua, masyarakat enggan *berperan serta* dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktifitas yang tidak berpengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.

Korten (dalam Slamet,1994:66-74) menunjuk sejumlah hambatan berkaitan dengan peran serta masyarakat yaitu:

- a. Hambatan dalam badan-badan, tempat pembentukan keputusan, sikap-nilai-keahlian, sistem evaluasi, stabilitas penempatan pegawai. Dalam hal terdapat pula hambatan birokrasi.
- b. Hambatan dalam komunitas, kurangnya organisasi lokal yang memadai, kurangnya keahlian berorganisasi, lemahnya fasilitas komunikasi, perbedaan dalam golongan-golongan.

### 2.3.5. Tingkat Peran Serta Masyarakat

Menurut Arstein (dalam Panudju, 1999:69-76) tingkat peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Manipulation atau manipulasi*

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

b. *Therapy atau penyembuhan*

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

c. *Informing atau pemberian informasi*

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. *Consultation atau konsultasi*

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survei tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

e. *Placation atau perujukan*

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering kali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. *Partnership atau kemitraan*

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

g. *Delegated power atau pelimpahan kekuasaan*

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik

kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

*h. Citizen control atau masyarakat yang mengontrol*

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

8	<b>CITIZEN CONTROL</b>	<b>DEGREES OF CITIZEN POWER</b>
7	<b>DELEGATED POWER</b>	
6	<b>PARTNERSHIP</b>	
5	<b>PLACATION</b>	<b>DEGREES OF TOKENISM</b>
4	<b>CONSULTATION</b>	
3	<b>INFORMING</b>	
2	<b>THERAPY</b>	<b>NON PARTICIPATION</b>
1	<b>MANIPULATION</b>	

GAMBAR 2.1.  
TIPOLOGI TINGKAT PERAN SERTA MASYARAKAT DARI ARNSTEIN  
*Sumber : Pamudju 1999 diolah, 2003*

Dari ke delapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan therapy.
- b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau degrees of tokenism yang meliputi informing, consultation dan placation.
- c. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau degrees of citizen power yang meliputi partnertship, delegated power dan citizen control.

Meskipun tipologi tersebut di atas berdasarkan kasus-kasus peremajaan kota, dapat pula dipakai sebagai gambaran atau contoh pada kegiatan-kegiatan lain.

Untuk mengukur tingkat peran serta dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet,1994:82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu :

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial
- b. Kehadiran dalam pertemuan
- c. Membayar iuran/sumbangan
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Menurut Goldhamer untuk mengukur peran serta dengan menggunakan lima variabel yaitu :

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki
- b. Frekuensi kehadiran
- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan
- d. Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala peran serta individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk mengukur peran serta masyarakat yaitu :

- a. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan
- b. Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi
- c. Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik
- d. Kesiediaan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan

### **2.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta**

Beberapa faktor yang berpengaruh untuk membuat pendekatan peran serta masyarakat bekerja yaitu (Yeung,McGee,1986:97-99):

- a. Motivasi, insentif bagi kelompok untuk bekerja sama harus ada jika interaksi dan keterlibatan ingin diberlanjutkan.
- b. Kepemimpinan masyarakat, keberadaan struktur kepemimpinan dalam organisasi formal dan informal di masyarakat.

- c. Kemampuan untuk melakukan Learning approach, adanya fleksibilitas untuk mencoba aktivitas dan metode baru serta memberi peluang mekanisme feedback untuk belajar dari kesuksesan dan kesalahan. Dalam hal ini masyarakat diberi hak untuk menentukan pilihannya sendiri dan menanggung konsekuensinya.
- d. Sumber daya, kemampuan sumber daya di masyarakat.

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan prasarana lokal tergantung pada sikap warga dan efektifitas organisasi masyarakat. (Schubeler, 1996:66). Sedangkan menurut Sulaiman (1985:39) selain adanya kepercayaan diri, tanggung jawab sosial, peranan pemimpin, prakarsa dan kepekaan masyarakat maka salah satu unsur peran serta adalah kemauan dan kemampuan masyarakat.

Dalam Sastropetro (1988:12-13), Gordon W. Allport berpendapat bahwa seseorang yang *berperan serta* sebenarnya mengalami keterlibatan egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Sedangkan Keith Davis mengatakan bahwa *peran serta* adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri personal individu dengan tingkat *peran serta*. Tentunya ciri-ciri individu tersebut yang terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota dan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan serta besarnya pendapatan (Slamet, 1994:137-143) akan sangat berpengaruh pada kegiatan peran serta.

Salah satu ciri sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di kota adalah pada umumnya mereka menunjukkan jiwa bersatu, kepercayaan pada diri sendiri dan kestabilan yang kuat. Orang-orang rela bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan bersama

dan dalam banyak kasus telah mengorganisasikan diri untuk menyelamatkan rumah dan masyarakat mereka. Ada suatu sikap informal dan hubungan bertetangga yang baik, yang mendukung serta memperingan beban orang-orang itu. Banyak daerah yang sangat stabil, kebanyakan keluarga sudah hidup bertahun-tahun di sana dan telah ikut membentuk kelompok gubuk-gubuk di tengah masyarakat. Dalam hal ini salah satu ciri sosial ekonomi penduduk berkaitan erat dengan lama tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lama tinggal ini akan mempengaruhi orang untuk bekerjasama serta terlibat dalam kegiatan bersama.

Ciri-ciri tersebut juga berhubungan dengan status seseorang dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan perumahan seperti disebutkan Turner (dalam Panudju, 1999:10), tanpa kejelasan tentang status kepemilikan hunian dan lahannya seseorang atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman sehingga mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal ini status hunian seseorang akan berpengaruh pada tingkat peran sertanya dalam kegiatan bersama untuk memperbaiki lingkungan.

Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan muncul golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno, 1992:136). Faktor usia tentunya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Penemuan menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta (Slamet, 1994:142).

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap

terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Sedangkan faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu.(Slamet,1994,115-116)

Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta. Tingkat pendapatan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Besarnya biaya investasi yang akan dilakukan oleh masyarakat tidak semata-mata bergantung kepada kemampuan menanamkan uangnya, tetapi juga pada keuntungan dan kepuasan dari apa yang akan mereka dapatkan dari investasi tersebut. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju,1999:77-78).

Peran serta masyarakat hanya akan terjadi bila sejumlah warga dalam unit geografi tertentu merupakan sebuah komunitas atau minimal merupakan sebuah kelompok kepentingan yang akan dilayani oleh adanya peran serta tersebut. Kelompok ini merupakan wujud dari interaksi sosial antar warga. Lebih jauh Bierens den Haan mengatakan (dalam Susanto,1999:33-37), bahwa suatu kelompok memperoleh bentuknya dari kesadaran akan keterikatan pada anggota-anggotanya. Suatu kelompok bukan merupakan jumlah anggotanya saja, akan tetapi mempunyai suatu ikatan psikologis. Adanya suatu kebutuhan psikologis manusia untuk mempunyai dan digolongkan pada suatu kelompok, tempat ia berlindung dan merasa aman. Semakin banyak orang berinteraksi semakin kuat ikatan psikologisnya dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal maka semakin tinggi ikatan psikologisnya dengan lingkungan yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

Seperti yang diuraikan dalam sub bab sebelumnya mengenai kebutuhan akan peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan akan ikut mempengaruhi ikatan psikologis masyarakat dalam berperan serta mengelola prasarana yang telah dibangunnya. Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi pemanfaatannya agar langsung dirasakan masyarakat, serta dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki dari masyarakat yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas tersebut (Yudohusodo dkk,1991:148).

Sebenarnya setiap orang bertindak dan berinteraksi dilandasi pula oleh adanya persepsi yang ia terima terhadap kegiatan peran serta. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Thoah,2002:123). Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Dalam persepsi terkandung penguat positif dan negatif hakekatnya memperkuat respon dan menaikkan kemungkinan terulangnya kembali di kelak kemudian hari (Thoah, 2002:56-71). Tetapi penguat positif dan negatif tersebut di dalam mencapai implikasi terhadap perilaku menempuh cara yang berbeda. Penguat positif memperkuat dan menaikkan perilaku dengan cara menghadirkan konsekuensi-konsekuensi yang diinginkan. Adapun penguat negatif di dalam rangka memperkuat dan menaikkan perilaku tersebut dengan memperhentikan atau menarik dari konsekuensi-konsekuensi yang

tidak diinginkan. Pengalaman melakukan kegiatan peran serta tanpa mendapatkan manfaat langsung yang diperoleh akan mempengaruhi keinginan berperan serta di kemudian hari.

Di samping itu teori keseimbangan yang dikembangkan Theodore Newcomb menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain untuk bertindak dan berinteraksi dapat didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Individu A akan berinteraksi dengan individu B lantaran adanya sikap dan nilai yang sama dalam rangka mencapai suatu tujuan X. Kesamaan ini dapat berupa kesamaan pandangan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini keinginan berperan serta dipengaruhi oleh kesamaan pandangan mengenai tanggung jawab dalam pengelolaan prasarana yang telah ada.

Keaktifan warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama dipengaruhi pula oleh kepemimpinan. Dalam Thoha (2002,226-240) disebutkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan, lebih jauh George R. Terry merumuskan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi. Untuk mengarahkan tersebut dibutuhkan adanya legitimasi berupa dukungan dari anggota terhadap kepemimpinannya. Perilaku mengarahkan tersebut dikombinasikan perilaku mendukung akan membentuk gaya kepemimpinan.

Selain itu terdapat faktor dari pemerintah yang berpengaruh terhadap peran serta masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam membina swadaya dan peran serta masyarakat melalui pemberian penyuluhan, penyebaran informasi dan pemberian perintisan (Yudohusodo dkk,1991:148-149). Di dalam kasus "Perbaikan Kampung" investasi oleh pihak pemerintah dalam prasarana fisik telah mendorong swadaya dalam pengelolaan lingkungan yang lebih